

Pengaruh Dana Desa, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan,
Bidang Ekonomi, dan Bidang Perlindungan Sosial Terhadap Kemiskinan
di Jawa Tahun 2015 - 2023

SKRIPSI



Oleh

Fatma Andrianti Putri

NIM. 20313077

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

2025

HALAMAN JUDUL

Pengaruh Dana Desa, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Bidang Ekonomi,
dan Bidang Perlindungan Sosial Terhadap Kemiskinan di Jawa Tahun 2015 – 2023

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir
guna memperoleh gelar Sarjana jenjang Strata 1
Program Studi Ekonomi Pembangunan,
pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Fatma Andrianti Putri
NIM : 20313077
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
2025

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh – sungguh dan tidak ada bagian yang dikategorikan dalam Tindakan plagiasi seperti dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan FBE UIR. Apabila kemudian hari terbuka bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun yang berlaku.

Yogyakarta, Maret 2025

Penulis



Fatma Andrianti Putri

HALAMAN PENGESAHAN

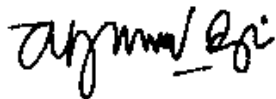
Pengaruh Dana Desa, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Bidang Ekonomi,
dan Bidang Perlindungan Sosial Terhadap Kemiskinan di Jawa Tahun 2015 – 2023

Nama : Fatma Andrianti Putri
NIM : 20313077
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, Maret 2025

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing



Prof. Drs. Agus Widarjono, S.E., M.A., Ph.D.

NIP : 933130103

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

SKRIPSI BERJUDUL

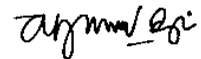
Pengaruh Dana Desa, Pengeluaran Pemerintah pada Bidang Pendidikan, Bidang Ekonomi, dan Bidang Perlindungan Sosial terhadap Kemiskinan di Jawa Tahun 2015
– 2023

Nama : FATMA ANDRIANTI P

NIM : 20313077

Telah dipertahankan/diujikan dan disahkan untuk
memenuhi syarat guna memperoleh gelar
Sarjana dan dinyatakan lulus pada hari, tanggal : Selasa, 15 Juli 2025

Penguji/Pembimbing Skripsi : Prof. Agus Widarjono, SE., MA., Ph.D :



Penguji

: Diana Wijayanti, S.E., M.Si.

:



Mengetahui,

Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia



Prof. Johan Arifin, S. E., M. Si., Ph.D.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Mengucap rasa syukur kepada Allah SWT
tugas akhir skripsi ini penulis persembahkan kepada :

Kedua orang tua saya

Bapak Supriyo dan Ibu Karsumi

Seluruh keluarga yang telah memberikan semangat, motivasi, serta dukungan dan doa
dengan tulus dan ikhlas

Motto

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai
dari pekerjaan/tugas, kerjakanlah yang lain dengan sungguh “

(Terjemahan : QS. Al-Nasyirah 6-7)

Almamater tercinta

Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam
Indonesia

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohiim...

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji dihaturkan hanya kepada Allah, Tuhan yang merajai seluruh alam. Rasa syukur dan terima kasih penulis haturkan kepada-Nya atas nikmat serta rahmat-Nya yang tidak terhitung, serta kekuatan yang diberikan untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam juga Penulis sampaikan kepada baginda habibillah Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi perantara untuk merasakan nikmat kehidupan di zaman ini.

Dengan ikhtiar, sabar, fokus, yakin, dan kerja keras alhamdulillah penulis berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul "Pengaruh Dana Desa, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Bidang Ekonomi, dan Bidang Perlindungan Sosial Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah." Skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) Ekonomi Pembangunan di Universitas Islam Indonesia.

Selama proses penulisan, Penulis menyadari adanya kekurangan dan keterbatasan ilmu yang dimiliki. Oleh karena itu, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak sangat membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan rendah hati, Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Agus Widarjono, S.E., M.A., Ph.D. selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa sabar dalam memberikan saran, bimbingan dan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Achmad Tohirin, MA., Ph.D. selaku dosen penguji skripsi yang telah memberikan saran, bimbingan dan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Abdul Hakim, S.E., M.Ec., Ph.D. Selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Bisnis Dan Ekonomika.
5. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi yang telah menularkan dan mengajarkan ilmunya kepada penulis selama menuntut ilmu di kampus ini.
6. Dosen serta seluruh staf Akademik Jurusan Ekonomi Pembangunan khususnya dan Dosen serta Staf Tata Usaha dan Staf Akademik di Lingkungan Fakultas Bisnis Dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

7. Kepada Guru saya KH. Moch. Najib Abdul Hakim, S.Fil., M.Phil. selaku Guru, Kyai, Kakak penulis yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada kawan seperjuangan Jauharil, Tegar, dan Devara yang terus memberikan semangat dan dukungan tanpa henti selama perjalanan perkuliahan.
9. Rekan-rekan di Jurusan Ekonomi Pembangunan angkatan 2020 yang selalu solid dimanapun berada.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan ikut andil serta dalam memberikan bantuan dan kontribusi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Penulis dengan sepenuh hati menyadari bahwa Skripsi ini belum mencapai tingkatan kesempurnaan dan masih memiliki kekurangan. Meskipun demikian, harapannya adalah agar Skripsi ini dapat memberikan manfaat serta nilai tambah bagi para pembaca. Semoga dukungan, bimbingan, dan doa yang diterima oleh Penulis dapat mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT.

Yogyakarta, Maret 2025



Fatma Andrianti Putri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	Error! Bookmark not defined.

HALAMAN PENGESAHAN	iv
PENGESAHAN UJIAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1. Latar Belakang Masalah.....	2
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	9
2.1. Kajian Pustaka	9
2.2. Landasan Teori.....	12
2.3. Pengaruh Variabel Bebas terhadap Variabel Terikat.....	26
2.4. Kerangka Berpikir	28
2.5. Hipotesis Penelitian	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1. Jenis dan Cara Pengumpulan Data	29
3.2. Variabel Penelitian	29
3.3. Metode Analisis Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1. Hasil Penelitian	37
4.2. Pembahasan	45
BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI.....	48
5.1. Kesimpulan	48
5.2. Implikasi	50
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN.....	55

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1. Definisi Operasional Variabel.....	30
Tabel 4. 1. Hasil Analisis Deskriptif (per sejuta).....	37
Tabel 4. 2. Hasil Uji Common Effect Model (CEM).....	39
Tabel 4. 3. Hasil Uji Fixed Effect Model (FEM)	39
Tabel 4. 4. Hasil Uji Random Effect Model (REM) (REM).....	40

Tabel 4. 5. Hasil Uji Chow	41
Tabel 4. 6. Hasil Uji Hausman	41
Tabel 4. 7. Hasil Uji Multikolinearitas	42

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Penelitian Tahun 2015	56
Lampiran 2. Data Penelitian Tahun 2016	60
Lampiran 3. Data Penelitian Tahun 2017	64
Lampiran 4. Data Penelitian Tahun 2018	68
Lampiran 5. Data Penelitian Tahun 2019	72
Lampiran 6. Data Penelitian Tahun 2020	76
Lampiran 7. Data Penelitian Tahun 2021	80

Lampiran 8. Data Penelitian Tahun 2022	84
Lampiran 9. Data Penelitian Tahun 2023	88
Lampiran 10. Hasil Analisis Data.....	92
Lampiran 11. Surat Ijin Penelitian	103

ABSTRAK

Berdasarkan data dari BPS hingga 2023, jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa mengalami penurunan di tahun 2015 hingga tahun 2019, kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2020 hingga tahun 2023. Salah satu belanja pemerintah pusat yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan adalah belanja Dana Desa yang disalurkan pemerintah mulai tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dana desa dan pengeluaran pemerintah bidang Pendidikan, ekonomi, serta perlindungan sosial terhadap kemiskinan di pulau Jawa dari tahun 2015 sampai tahun 2023. Sampel pada penelitian ini yaitu seluruh kabupaten/kota di Pulau Jawa. Data dalam penelitian ini merupakan data panel. Metode analisis data menggunakan metode analisis regresi data panel menggunakan Eviews 13. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa dana desa, pengeluaran pemerintah bidang Pendidikan,

ekonomi, serta perlindungan sosial berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di pulau Jawa.

Kata kunci: kemiskinan, dana desa, pengeluaran pemerintah bidang Pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang ekonomi, pengeluaran pemerintah bidang perlindungan sosial.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan salah satu upaya peningkatan kesejahteraan dari semua segi kehidupan bangsa, mencakup pembangunan manusia seutuhnya maupun pembangunan infrastruktur ataupun sumber daya yang ada di Indonesia (Kaharudin et al., 2019). Salah satu indikator ekonomi makro yang digunakan untuk melihat/mengukur stabilitas perekonomian suatu negara adalah tingkat kesejahteraan masyarakat, dimana kesejahteraan masyarakat ini dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan (Susanto & Pangesti, 2020).

Indonesia merupakan salah satu negara agraris yang masih tersiksa oleh masalah kemiskinan karena membuat banyak masyarakat Indonesia mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya (Carolina, 2022). Kemiskinan menjadi salah satu agenda yang patut diperhatikan karena secara tersirat merupakan permasalahan yang dihadapi dalam mencapai salah satu tujuan pembangunan nasional dalam menciptakan keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat yang merata secara material dan spiritual (Leonita & Sari, 2019).

Upaya pemerintah untuk menyejahterahkan masyarakat dilaksanakan melalui program-program pengentasan kemiskinan, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) oleh Kementerian Sosial, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri oleh Pemerintah Pusat atau Daerah, sementara di daerah ada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) oleh Pemerintah Daerah, Program Keluarga Harapan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dan lain-lain (Sumargo & Simanjuntak, 2019). Putri & Putri (2021) juga menyatakan bahwa pemerintah telah berinovasi dan melaksanakan beberapa kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan kronis seperti subsidi pendidikan, beasiswa, transfer tunai bersyarat, program pemberdayaan masyarakat, kredit untuk usaha kecil menengah dan proyek pembangunan infrastruktur, menyediakan jaring pengaman sosial untuk melindungi masyarakat miskin dari beberapa guncangan eksternal melalui penyaluran

beras bersubsidi, bantuan tunai dan asuransi kesehatan yang ditargetkan untuk masyarakat miskin.

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi mengandung tujuan yaitu menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat serta membudayakan dan menciptakan ruang publik bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan, sehingga pemerintah memberikan bantuan keuangan untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang outputnya pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa berupa dana desa yang merupakan bentuk hubungan keuangan antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan desa melalui pemerintah kabupaten/kota. (Risnasari et al., 2022). Desa merupakan kata kunci penting yang mengandung konsekuensi diberikannya kewenangan yang lebih luas dan alokasi anggaran lebih besar kepada desa guna mendukung kemajuan serta kemandirian desa. UU Desa melakukan reformasi atas uang masuk desa, dimana selain Alokasi Dana Desa (ADD), desa juga diberikan Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Anggoro et al., 2022).

Salah satu belanja pemerintah pusat yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan adalah belanja Dana Desa yang disalurkan pemerintah mulai tahun 2015 sebagai amanah dari disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan adanya penyaluran Dana Desa diharapkan kemiskinan di kabupaten/kota secara keseluruhan dapat dikurangi (Sigit & Kosasih, 2020). Desa sebagai unit administrasi pemerintahan terkecil memegang peranan penting dan diharapkan menjadi titik awal berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan perekonomian masyarakat sebagai upaya menciptakan pertumbuhan yang tinggi, pembangunan harus berupaya untuk menghapus dan mengurangi tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan atau upaya menciptakan kesempatan kerja bagi penduduk (Arina et al., 2021).

Pembangunan manusia adalah salah satu tolak ukur bagi perkembangan dan kemajuan suatu negara. Negara dinyatakan maju tidak hanya dihitung dalam hal pendapatan produk domestik bruto saja, tetapi juga dari segi harapan hidup dan tingkat pendidikan masyarakatnya (Hasibuan & Syahbudi, 2022). Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal yaitu suatu tindakan

pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional (Rahim et al., 2021). Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan ditujukan untuk mendukung pendidikan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia supaya masyarakat ikut berkontribusi terhadap pembangunan daerah secara maksimal (Rahmah et al., 2023).

Pemerintah sangat diperlukan dalam perekonomian suatu daerah terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui alokasi belanja atau pengeluaran pemerintah. Perekonomian akan tumbuh dengan baik jika pemerintah menurunkan pajak atau menaikkan pengeluarannya (Angraini et al., 2023). Dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, pejabat pemerintahan diberikan kebebasan bertindak untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan (Juliani, 2020).

Pemerintah hadir untuk memberikan segala jenis perlindungan dari risiko-risiko mikro yang dapat mengancam masyarakat sejak di kandungan hingga usia senja, seperti risiko bayi terkena stunting hingga ketidakmampuan mengurus diri dan hidup sebatang kara di masa tua, maupun risiko makro seperti bencana alam dan krisis ekonomi yang kapan saja bisa datang menyerang (Hidarini & Bawono, 2020). Pengeluaran untuk perlindungan sosial juga diperhitungkan, karena pengeluaran pada bidang ini terus meningkat setiap tahunnya yang mana akan digunakan untuk mendanai program seperti Dana Desa, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan dan Indonesia Pintar, dan banyak lagi akan diluncurkan (Setiawan & Fikriah, 2020). Pengeluaran pemerintah di sektor perlindungan sosial merupakan kebijakan rasional yang diciptakan dalam rangka mewujudkan suatu perlindungan komprehensif yang tidak hanya memberikan perlindungan dari sisi keamanan juga perlindungan social bagi kesejahteraan masyarakat sehingga akan tercipta kehidupan kondusif dan Sejahtera (Ramdayani et al., 2019).

Tabel 1.1. Jumlah masyarakat miskin di Jawa Tahun 2015 – 2023

Provinsi	Jumlah Masyarakat Miskin (ribu jiwa)								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
DKI Jakarta	443.2	413.91	389.69	373.12	365.55	480.86	501.92	502.04	477.83
Banten	649.19	702.4	658.11	675.04	661.36	654.46	775.99	867.23	814.02
Jawa Barat	4435.7	4224.3	4168.4	3615.8	3399.2	3920.2	4195.3	4071	3888.6
Jawa Tengah	4577	4506.89	4450.72	3897.2	3743.23	3980.9	4109.75	3831.44	3791.5
DI Yogyakarta	550.23	494.94	488.53	460.1	448.47	475.72	506.45	454.76	448.47
Jawa Timur	4789.12	4703.3	4617.01	4332.59	4112.25	4419.1	4572.73	4181.29	4188.81

Berdasarkan data dari BPS hingga 2023, jumlah penduduk negara Indonesia paling tinggi berada di pulau Jawa. Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa mengalami penurunan di tahun 2015 hingga tahun 2019, kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2020. Data BPS juga menunjukkan bahwa struktur perekonomian Indonesia secara spasial masih didominasi kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) (Violin & Lutfi, 2022). Dari latar belakang tersebut, maka peneliti ingin melakukan penelitian mengenai pengaruh dana desa, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pemerintah bidang ekonomi, dan pemerintah bidang perlindungan sosial terhadap kemiskinan di Jawa tahun 2015 – 2023.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Bagaimana pengaruh antara dana desa dengan kemiskinan di Jawa tahun 2015 - 2023?
- 2) Bagaimana pengaruh antara pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dengan kemiskinan di Jawa tahun 2015 - 2023?
- 3) Bagaimana pengaruh antara pengeluaran pemerintah bidang ekonomi dengan kemiskinan di Jawa tahun 2015 - 2023?
- 4) Bagaimana pengaruh antara pengeluaran pemerintah bidang perlindungan sosial dengan kemiskinan di Jawa tahun 2015 - 2023?

- 5) Bagaimana terdapat pengaruh antara dana desa, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang ekonomi, dan pengeluaran pemerintah bidang perlindungan sosial terhadap kemiskinan di Jawa tahun 2015 - 2023?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

- 1) Melakukan analisis pengaruh antara dana desa dengan kemiskinan di Jawa tahun 2015 - 2023?
- 2) Melakukan analisis pengaruh antara pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dengan kemiskinan di Jawa tahun 2015 - 2023?
- 3) Melakukan analisis pengaruh antara pengeluaran pemerintah bidang ekonomi dengan kemiskinan di Jawa tahun 2015 - 2023?
- 4) Melakukan analisis pengaruh antara pengeluaran pemerintah bidang perlindungan sosial dengan kemiskinan di Jawa tahun 2015 - 2023?
- 5) Melakukan analisis pengaruh antara dana desa, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang ekonomi, dan pengeluaran pemerintah bidang perlindungan sosial terhadap kemiskinan di Jawa tahun 2015 - 2023?

1.4. Manfaat Penelitian

- 1) Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang baru serta penelitian ini ditujukan guna memperoleh gelar S1 Ekonomi Pembangunan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.
- 2) Bagi akademisi, dapat digunakan sebagai referensi sarana pembelajaran dan tambahan informasi untuk mengaplikasikan teori-teori dalam perkuliahan mengenai topik yang terkait.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1. Kajian Pustaka

Penelitian ini merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya yang dijadikan referensi atau acuan. Hasil penelitian yang terkait dengan topik dalam penelitian ini dijabarkan menjadi 5 topik yaitu dana desa, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang ekonomi, pengeluaran pemerintah bidang perlindungan sosial, dan kemiskinan. Penelitian Ade Irma Seska Arina, Vecky Masinambow dan Een N. Walewangko pada tahun 2021 bertujuan untuk untuk mengetahui pengaruh dana desa dan alokasi dana desa terhadap indeks desa membangun secara simultan di Kabupaten Minahasa Tenggara baik secara simultan maupun parsial. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kantor desa se- Kabupaten Minahasa Tenggara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) secara simultan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Indeks Desa Membangun Di Kabupaten Minahasa Tenggara, (2) Secara parsial Dana Desa dan alokasi na desa berpengaruh signifikan terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Penelitian lain tentang Dana Desa juga dilakukan oleh Anjelita Liana Risnasari, Andreas Rengga, dan Elisabet Luju pada tahun 2022. Penelitian tersebut bertujuan untuk: (1) mengetahui gambaran Kesejahteraan Masyarakat, Pemanfaatan Dana Desa, dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes); (2) menganalisis pengaruh Pemanfaatan Dana Desa dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) terhadap Kesejahteraan Masyarakat baik secara parsial maupun secara simultan. Hasil statistik uji t menunjukkan bahwa secara parsial variabel Pemanfaatan Dana Desa berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat sedangkan variabel Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Hasil statistik uji F menunjukkan bahwa secara

simultan kedua variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Hasil analisis determinasi menunjukan kedua variabel bebas dalam penelitian ini mampu menjelaskan terhadap variasi naik turunnya Kesejahteraan Masyarakat Desa Iligai Kecamatan Lela Kabupaten Sikka sebesar 55,4%.

Penelitian mengenai pengeluaran pemerintah bidang pendidikan yang pertama yaitu penelitian Abdul Rahim, Marisa Sutanty, Putri Anggita tahun 2021 yang bertujuan untuk untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Sumbawa. Teknik yang digunakan untuk menganalisis data adalah regresi linier berganda, uji t, uji f dan R^2 . Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia, variabel pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan secara parsial berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia, pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan secara simultan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Sumbawa, dan nilai R^2 sebesar 0,922 yang berarti bahwa pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Sumbawa tahun 2015-2020 sebesar 92,2%.

Penelitian lain yang dilakukan Nadhifa Ar Rahmah, Lukman, Resi Pratiwi, dan Nur Ari Sufiawan pada tahun 2022 bertujuan untuk melihat pengaruh dari variabel-variabel jumlah penduduk miskin, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Payakumbuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk miskin berpengaruh positif dan tidak signifikan, variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan dan variabel pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh positif dan tidak signifikan.

Penelitian tentang pengeluaran pemerintah bidang ekonomi sebelumnya dilakukan oleh Deva Angraini, Fathiyah, Masnun pada tahun 2022 yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah pada sektor ekonomi dan pelayanan publik terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari situs resmi

Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jambi pada tahun 2014-2018 yang berjumlah 55. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi data panel Fixed Effect Model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang ekonomi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian selanjutnya tentang pengeluaran pemerintah bidang perlindungan sosial dilakukan oleh Rolanda Aisha Hidarini dan Andy Dwi Bayu Bawono tahun 2020 yang bertujuan untuk mengetahui peran belanja pendidikan dan belanja perlindungan sosial sebagai variabel *moderating* terhadap ruang fiskal dengan indeks pembangunan manusia. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa ruang fiskal secara signifikan mempengaruhi IPM, dan pengeluaran pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap hubungan antara ruang fiskal dan IPM. Namun, belanja perlindungan sosial memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap hubungan antara ruang fiskal dan IPM.

Penelitian mengenai pengeluaran pemerintah bidang perlindungan sosial juga dilakukan oleh Angga Setiawan dan Fikriah tahun 2020 yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja Pemerintah bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah bidang perlindungan sosial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Penelitian mengenai kemiskinan sebelumnya dilakukan oleh Martha Carolina pada tahun 2021 yang bertujuan untuk membahas dampak pengeluaran pemerintah pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, kesehatan, dan subsidi terhadap kemiskinan di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk periode tahunan dari tahun 1992 hingga 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika subsidi meningkat, maka kemiskinan meningkat, ketika pengeluaran pendidikan meningkat, kemiskinan menurun, sedangkan pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Lily Leonita dan Rini Kurnia Sari pada tahun 2018 bertujuan memverifikasi apakah produk domestik regional bruto, tingkat

pengangguran, dan IPM memberikan kontribusi pada kemiskinan pada 34 provinsi di Indonesia selama periode 2011-2017. Hasil penelitian menunjukkan laju PDRB, IPM, dan pengangguran secara simultan memberikan pengaruh pada kemiskinan. Pengujian secara parsial menunjukkan tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh laju PDRB dan pengangguran, sedangkan IPM tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.

Penelitian terkait kemiskinan, dana desa, pengeluaran pemerintah bidang Pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang ekonomi, dan pengeluaran pemerintah bidang perlindungan sosial telah banyak dilakukan sebelumnya. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena dalam penelitian ini, variabel kemiskinan menjadi variabel terikat sebagai akibat adanya variabel dana desa, pengeluaran pemerintah bidang Pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang ekonomi, dan pengeluaran pemerintah bidang perlindungan sosial. Selain itu, rentang waktu pada penelitian ini dimulai dari tahun 2015 hingga tahun 2023, dengan Lokasi di pulau Jawa.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Kemiskinan

Secara umum, kemiskinan diartikan sebagai kondisi ketidak mampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok sehingga kurang mampu untuk menjamin kelangsungan hidup (Haryadi, 2005). Kemiskinan merupakan standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Ahmadi, 2009). Kemiskinan diartikan sebagai kekurangan, terutama kekurangan sandang, pangan dan papan, keadaan dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya sehingga mengalami kesengsaraan dalam hidupnya (Mawardi & Hidayati, 2000).

Beik dan Arsyianti (2017) menyatakan bahwa kemiskinan didefinisikan sebagai suatu situasi yang dihadapi oleh seorang individu dimana mereka tidak memiliki kecukupan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang nyaman, baik ditinjau dari sisi ekonomi, sosial, psikologis, maupun dimensi spiritual. Kemiskinan dalam arti luas adalah keterbatasan yang dimiliki oleh seseorang, keluarga, komunitas, bahkan negara yang menyatakan ketidaknyamanan dalam kehidupan, terancamnya penegakan hak dan keadilan, terancamnya posisi tawar (*bargaining*) dalam pergaulan dunia,

hilangnya generasi, serta suramnya masa depan bangsa (Bayo, 2009). Dari beberapa definisi kemiskinan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan keadaan dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dan tidak mampu mengembangkan kehidupannya sehingga akan menimbulkan kesengsaraan.

1) Jenis – Jenis Kemiskinan

Widodo (2006) menyatakan bahwa kemiskinan paling tidak memiliki tiga dimensi, yaitu:

a. Kemiskinan Politik.

Kemiskinan politik memfokuskan pada derajat akses terhadap kekuasaan (*power*). Kekuasaan meliputi tatanan sistem sosial politik yang menentukan alokasi sumber daya untuk kepentingan sekelompok orang atau tatanan sistem sosial dan menentukan alokasi sumber daya.

b. Kemiskinan Sosial.

Kemiskinan sosial adalah kemiskinan karena kekurangan jaringan sosial dan struktur yang mendukung untuk mendapat kesempatan agar produktivitas seseorang meningkat. Dengan kata lain kemiskinan sosial adalah kemiskinan yang disebabkan adanya faktor-faktor menghambat yang mencegah dan menghalangi seseorang untuk memanfaatkan kesempatan yang tersedia.

c. Kemiskinan Ekonomi

Kemiskinan dapat diartikan suatu keadaan kekurangan sumber daya (*resources*) yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Kemiskinan dapat diukur secara langsung dengan menetapkan persediaan sumber daya yang tersedia pada kelompok ini dan membandingkannya dengan ukuran-ukuran baku. Sumber daya yang dimaksud dalam pengertian ini mencakup konsep ekonomi yang luas tidak hanya merupakan pengertian finansial, dalam hal ini kemampuan finansial keluarga untuk memenuhi kebutuhan, tetapi perlu mempertimbangkan semua jenis kekayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Alfian (2000) menyebutkan bahwa kemiskinan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

a. Kemiskinan Alamiah

Kemiskinan alamiah terjadi dikarenakan akibat dari rendahnya kualitas sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM). Dengan rendahnya

kedua faktor tersebut membuat tingkat produksi juga rendah. Dalam pengertian ini dapat kita melihat contoh kasus di dalam sektor pertanian. Dengan kondisi iklim yang tidak menentu membuat petani tidak mampu untuk mengolah dan memaksimalkan lahan pertanian yang dimiliki.

b. Kemiskinan Kultural.

Kemiskinan kultural terjadi akibat dari tidak ada kemauan dari masyarakat baik secara kelompok maupun perorangan untuk berusaha memperbaiki kualitas hidup mereka. Hal ini biasa terjadi akibat dari system budaya tradisi masyarakat yang sudah melekat. Sebagai contoh kasus adalah terdapatnya sistem waris dari sekelompok masyarakat.

c. Kemiskinan Struktural.

Kemiskinan struktural terjadi akibat dari suatu kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga menyebabkan kemiskinan pada sekelompok masyarakat. Asumsi dasar dari Teori Fungsionalisme Struktural, salah satu paham atau prespektif di dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain dan bagian yang satu tidak dapat berfungsi tanpa adanya hubungan dengan bagian yang lainnya. Kemudian perubahan yang terjadi pada satu bagian akan menyebabkan ketidak seimbangan dan pada gilirannya akan menciptakan perubahan pada bagian lainnya. Perkembangan fungsionalisme didasarkan atas model perkembangan sistem organisasi yang di dapat dalam biologi, asumsi dasar teori ini ialah bahwa semua elemen harus berfungsi atau fungsional sehingga masyarakat bisa menjalankan fungsinya dengan baik.

Sukandar, dkk (2008) juga menyebutkan bahwa kemiskinan dapat diklasifikasikan kedalam beberapa kelompok sesuai dengan pemahaman atas kondisi kemiskinan yang dihadapi, yaitu:

a. Kemiskinan absolut, kemiskinan yang terjadi bila seseorang, keluarga, atau masyarakat yang tingkat pendapatan atau pengeluarannya berada di bawah suatu batas minimal tertentu untuk dapat hidup layak sebagai manusia. Batas tersebut disebut garis kemiskinan.

- b. Kemiskinan relatif, kemiskinan yang terjadi jika seseorang, keluarga, atau masyarakat yang tingkat pendapatannya atau pengeluarannya relatif lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan atau pengeluaran Masyarakat sekitarnya.
- c. Kemiskinan Kronis (*chronic*) atau struktural, kemiskinan ini terjadi jika kondisi kemiskinan ini yang terjadi terus menerus dalam jangka waktu yang lama.
- d. Kemiskinan sementara (*transitory*) atau accidental, kemiskinan ini terjadi akibat adanya perubahan atau “*shock*” yang mengakibatkan seseorang atau keluarga atau masyarakat berubah dari tidak miskin menjadi miskin.
- e. Kemiskinan massal, terjadi jika sebagian besar dari masyarakat mengalami kemiskinan.
- f. Kemiskinan individual, yaitu kemiskinan yang terjadi jika hanya beberapa orang atau sebagian kecil masyarakat yang mengalami kemiskinan.

2) Faktor – Faktor Penyebab Kemiskinan

Ahmadi (2009) menyebutkan beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan, yaitu:

a. Pendidikan yang Terlampau Rendah

Pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupan. Keterbatasan pendidikan /keterampilan yang dimiliki menyebabkan keterbatasan untuk masuk dalam dunia kerja.

Pendidikan adalah investasi jangka panjang, sebagai sebuah investasi pendidikan merupakan komoditi dalam pandangan ekonomi. Hal ini menempatkan bahwa penguasaan pengetahuan, keterampilan dan keahlian yang dihasilkan dan dimiliki oleh individu-individu dapat diukur dari sisi nilai-nilai ekonomi yang dapat dikembalikan dalam jangka waktu tertentu, melalui jenis pekerjaan yang bisa didapatkan dengan tingkat kompetensi yang dimiliki dan latar belakang yang dijalani.

Pendidikan memberikan andil signifikan terhadap peningkatan kemampuan ekonomi suatu bangsa, sebab manusia merupakan pelaku utama dalam pertumbuhan sosial ekonomi. Kemampuannya dalam menggali dan mengembangkan sumber-sumber daya alam untuk kesejahteraan, membangun kehidupan sosial dan perekonomian yang lebih baik serta kehidupan politik yang

lebih demokratis merupakan perwujudan dari kualitas hidup masyarakat terdidik. Akal dan keterampilan hasil pendidikannya terus digunakan untuk memperbaiki kondisi kehidupan supaya lebih baik.

b. Malas Bekerja

Sikap malas merupakan suatu masalah yang cukup memprihatinkan, karena menyangkut mentalitas dan kepribadian seseorang. Sikap malas membuat seseorang bersikap acuh tak acuh dan tidak bergairah untuk bekerja, bersikap pasif dalam hidupnya (sikap bersandar pada nasib). Sikap malas cenderung menggantungkan hidupnya pada orang lain, baik dari keluarga, atau saudara yang dipandang mempunyai kemampuan untuk menanggung kebutuhan hidup mereka.

c. Masalah Ketenagakerjaan

Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang begitu nyata dan dekat dengan lingkungan kita. Bahkan, masalah ketenagakerjaan dapat menimbulkan masalah-masalah baru di bidang ekonomi maupun nonekonomi. Tingkat pengangguran yang tinggi menyebabkan rendahnya pendapatan yang selanjutnya memicu munculnya kemiskinan. Faktor – faktor yang mempengaruhi perluasan kesempatan kerja antara lain: perkembangan jumlah penduduk dan angkatan kerja, pertumbuhan ekonomi dan kebijaksanaan mengenai perluasan kesempatan kerja itu sendiri. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting disamping sumber alam, modal dan teknologi. Tenaga kerja mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan, yaitu sebagai pelaku pembangunan.

Keterbatasan lapangan kerja akan membawa konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat. Secara ideal banyak orang mengatakan bahwa seseorang atau masyarakat harus mampu menciptakan lapangan kerja baru. Tetapi secara faktual hal tersebut kecil kemungkinannya, karena adanya keterbatasan kemampuan seseorang baik berupa “*skill*” maupun modal.

d. Keterbatasan Modal

Keterbatasan modal adalah sebuah kenyataan yang ada di negara-negara yang sedang berkembang, kenyataan tersebut membawa kemiskinan pada sebagian besar masyarakat di negara tersebut. Seorang miskin sebab mereka tidak

mempunyai modal untuk melengkapi alat ataupun bahan dalam rangka menerapkan keterampilan yang mereka miliki dengan suatu tujuan untuk memperoleh penghasilan. Keterbatasan modal bagi negara-negara yang sedang berkembang dapat diibaratkan sebagai suatu lingkaran yang tidak berujung pangkal baik dari segi permintaan akan modal maupun dari segi penawaran akan modal.

e. Beban Keluarga

Jumlah anggota rumah tangga merupakan indikasi dalam menentukan miskin atau tidaknya suatu rumah tangga. Semakin besar jumlah anggota keluarga akan semakin besar pendapatan yang dikeluarkan untuk biaya hidup. Sehingga menurut masyarakat miskin, jumlah anggota keluarga yang banyak akan mengakibatkan kondisi menjadi semakin miskin. Menurut Rivani dalam penelitiannya menunjukkan bahwa jumlah anggota rumah tangga mempengaruhi kemiskinan. Alasan jumlah tanggungan keluarga yang banyak, dapat disebabkan oleh beberapa penyebab antara lain, banyak anak, ada anggota keluarga yang tidak produktif (usia lanjut atau alasan lain) dan kesulitan memperoleh pekerjaan bagi anggota keluarga yang sebenarnya sudah mencapai usia produktif.

Semakin banyak anggota keluarga akan semakin banyak/meningkat pula tuntutan/beban hidup yang harus dipenuhi. Seseorang yang mempunyai anggota keluarga banyak apabila tidak diimbangi dengan usaha peningkatan pendapatan sudah pasti akan menimbulkan kemiskinan karena mereka memang berangkat dari kemiskinan. Kenaikan pendapatan yang dibarengi dengan pertambahan jumlah keluarga, berakibat kemiskinan akan tetap melanda dirinya dan bersifat latent.

f. Terbatasnya Sumber Daya Alam

Sumber daya alam bukanlah pilihan atau buatan manusia tetapi sudah tersedia di bumi dan manusia dapat mengambil manfaat darinya. Tanah yang subur atau kaya bahan tambangnya, misalnya bukanlah dibuat atas kehendak manusia. Kalau sumber daya alam ini buatan seseorang atau bangsa, tentu negara yang miskin sumber daya alam akan berusaha untuk membuatnya. Sumber daya alam ini merupakan salah satu ukuran kekayaan suatu bangsa atau negara. Walaupun begitu bukan berarti bahwa bangsa atau negara yang menyimpan banyak sumber

daya alam akan lebih makmur. Tentu tidak, hal ini masih memerlukan pengelolaan yang baik. Pengelolaan yang kurang baik, selain tidak dapat memberikan manfaat yang optimal, juga tidak dapat dilestarikan dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

Sumber daya alam ini ada yang dapat diperbarui seperti kekayaan hutan yang berupa flora dan faunanya dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui seperti minyak bumi, emas, nikel, baja, dan sebagainya. Untuk kelestarian sumber daya alam ini perlu adanya konservasi dan aturan untuk mengelola sumber daya alam ini. Pengelolaan yang baik akan memberikan kemakmuran, sedangkan kemakmuran merupakan tingkat kesejahteraan suatu bangsa.

g. Terbatasnya Sumber Daya Manusia

Kelangkaan sumber daya manusia pada suatu daerah atau negara menyebabkan sumber daya alamnya tidak dapat dikelola dengan sempurna. Di daerah atau negara yang sumber daya manusianya sedikit walaupun kaya sumber daya alam, ia tetap tidak menikmati sumber daya alam itu. Untuk mengelola sumber daya alam itu, diperlukan tenaga manusia. Maka dengan transmigrasi, sumber daya alam itu dapat dikelola dan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia.

h. Rendahnya Produktivitas

Kemiskinan suatu negara dapat disebabkan oleh rendahnya produktivitas sumber daya manusia dan barang modal. Sumber daya manusia yang dimilikinya tidak mampu banyak berbuat untuk mengejar ketertinggalannya dari negara maju karena mempunyai produktivitasnya sangat rendah.

Bagi negara yang produktivitasnya sangat rendah, tentu sulit untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan rakyatnya sehingga dia selalu berada dalam kekurangan. Agar sumber daya alam tidak musnah seperti bahan tambang yang tidak dapat diperbarui, penggunaannya diatur pada batas-batas tertentu agar tidak habis dalam waktu yang relatif singkat. Adapun sumber daya alam yang dapat diperbarui harus tetap dijaga kelestariannya, misal dengan mengadakan reboisasi dan konservasi.

2.2.2. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan Masyarakat (Raharjo, 2020).

1) Tujuan Dana Desa

Tim Yustisia (2015) menyebutkan bahwa menurut undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan dana desa yaitu:

- a. meningkatkan pelayanan publik di desa
- b. mengangkat kemiskinan
- c. memajukan perekonomian desa
- d. mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta
- e. memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

2) Sumber Dana Desa

Tim Yustisia (2015) menyebutkan bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71 Ayat (2), pemerintah memberikan mandat untuk mengalokasikan dana desa yang dianggarkan APBN sebagai suatu hasil pendapatan desa. Hasil pendapatan dana desa yaitu:

- a. Pendapatan asli daerah
- b. Dana yang bersumber dari APBN
- c. Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Kabupaten/Kota
- d. Alokasi dana desa dari kabupaten/kota
- e. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota
- f. Hibah dan sumbangan pihak ketiga
- g. Maupun pendapatan desa yang sah.

3) Fungsi Pengelolaan Dana Desa

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi berikut:

- a. Perencanaan (Pasal 20)

- i) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
 - ii) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
 - iii) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
 - iv) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- b. Pelaksanaan (Pasal 24)
- i) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
 - ii) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - iii) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- c. Penatausahaan (Pasal 35)
- i) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
 - ii) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
 - iii) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
 - iv) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- d. Pelaporan (Pasal 37)
- i) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa: a. laporan semester pertama; dan b. laporan semester akhir tahun.
 - ii) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.

- iii) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
 - iv) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- e. Pertanggungjawaban (Pasal 38)
- i) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
 - ii) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
 - iii) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 - iv) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan
 - b) Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan
 - c) Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

4) Penyaluran Dana Desa

Yustisia (2015) menyebutkan bahwa aspek penting dalam melaksanakan dana desa yang akan disalurkan yaitu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke pemerintah desa. Meskipun dalam hal tersebut pemerintah desa mempunyai wewenang sebagai penyalur dana desa, tetapi dalam kewenangannya pelaksanaan tersebut harus tetap menyertakan fungsi dan peran pemerintah kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan prinsip pertanggungjawaban (*accountability*) dan keterbukaan (*transparency*) serta memastikan jangkauan penggunaan dana desa, dalam beberapa ketentuan ini proses penyaluran dana desa harus terpenuhi terlebih dulu, baik dari pemerintah desa ataupun pemerintah kabupaten. Dana desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) oleh menteri keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Kemudian penyaluran dana desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) yang menyalurkan ke Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

5) Penggunaan Dana Desa

Sejalan dengan sasaran pembangunan wilayah perdesaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, maka penggunaan dana desa perlu diarahkan untuk mendukung pengentasan desa tertinggal demi terwujudnya kemandirian desa. Penggunaan dana desa pada dasarnya merupakan hak pemerintah desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan. Namun demikian, dalam rangka mengawal dan memastikan capaian sasaran pembangunan desa, Pemerintah menetapkan prioritas penggunaan dana desa setiap tahun. Prinsip-prinsip penggunaan dana desa yaitu:

- a. Keadilan, mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membedakan.
- b. Kebutuhan Prioritas, mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa
- c. Kewenangan Desa, mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa
- d. Partisipatif, mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat
- e. Swakelola dan Berbasis Sumber Daya Desa, mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal
- f. Tipologi Desa, mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

Sesuai dengan permandes Nomor 19 Tahun 2017, prioritas penggunaan Dana Desa digunakan untuk:

a. Pembangunan desa

Diarahkan untuk pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana seperti:

- i) Desa
- ii) Sosial pelayanan dasar
- iii) Usaha ekonomi desa
- iv) Lingkungan hidup dan lainnya.

b. Pemberdayaan masyarakat desa

Diarahkan untuk :

- i) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan desa
- ii) Pengembangan kapasitas dan ketahanan masyarakat desa
- iii) Pengembangan sistem informasi desa
- iv) Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial desa
- v) Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif
- vi) Dukungan pengelolaan usaha ekonomi
- vii) Dukungan pengelolaan pelestarian lingkungan hidup
- viii) Pengembangan menghadapi dan mengenai bencana alam dan KLB lainnya
- ix) Bidang kegiatan lainnya.

6) Indikator Pengelolaan Dana Desa

Adapun Indikator pengelolaan dana desa menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 Pasal 2 yaitu:

- a. Transparan, yaitu keterbukaan dalam manajemen pemerintah, lingkungan, ekonomi, dan sosial.
- b. Partisipasi, yaitu penerapan pengambilan keputusan yang demokratis serta pengakuan HAM, kebebasan pers dan mengemukakan partisipasi atau aspirasi masyarakat
- c. Akuntabilitas, yaitu kewajiban melaporkan dan menjawab dari yang dititipi amanah untuk mempertanggungjawabkan kesuksesan maupun kegagalan kepada penitip amanah sampai yang memberi amanah puas. Bila belum ada atau tidak mencapai titik puas maka dapat dikenakan sanksi.

7) Pelaksanaan Dana Desa

Menurut Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, peran kepala desa dalam menjalankan penatausahaan keuangan desa harus terdapat bendahara desa untuk mengatur dana tersebut. Bendahara desa harus ditetapkan sebelum tahun anggaran bersangkutan dimulai dan berdasarkan keputusan dari kepala desa. Bendahara merupakan seseorang yang dipilih kepala desa untuk mengatur masalah keuangan, baik itu menerima, menyimpan, membayar, dan mempertanggungjawabkan uang tersebut dalam rangka melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Menurut Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 wajib mencatat setiap pengeluaran dan penerimaan serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan dengan tertib. Bendahara harus menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa setiap bulan atau paling lambat 10 bulan berikutnya. Pengeluaran dan pendapatan dicatat melalui Buku Kas Umum, Buku Kas Harian Pembantu, Buku Kas Pajak Pembantu, dan Buku Bank Desa. Berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 hanya buku-buku itulah yang dilengkapi dengan bukti-bukti transaksi, jika tidak ada buku tersebut maka bendahara wajib melaporkan keuangan dengan menggunakan neraca untuk mengetahui aktiva, kewajiban, dan modal dana pada satu periode. Setiap belanja desa dan mengeluarkan pembiayaan dari desa maka wajib mendapatkan persetujuan yang sah terlebih dahulu dari kepala desa dan pengeluaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

2.2.3. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah menyangkut seluruh pengeluaran untuk membiayai kegiatannya, pengeluaran tersebut bertujuan agar tercapainya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Marzuki, 2005). Pengeluaran pemerintah (*government expenditure/government purchase*) meliputi semua pengeluaran dimana pemerintah secara langsung menerima balasan jasanya.

Kebijakan pemerintah untuk belanja daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas manusia dalam bentuk pelayanan masyarakat. Berdasarkan UU

No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Kuncoro, 2013).

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah merupakan pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah baik untuk kegiatan-kegiatan, konsumsi pemerintah, dan pengeluaran lainnya guna tercapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

1) Faktor – Faktor Pengeluaran Pemerintah

Marzuki (2005) menyebutkan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya pengeluaran pemerintah, antara lain sebagai berikut:

a. Faktor ekonomi

Faktor yang berhubungan dengan tujuan dalam pencapaian penggunaan tenaga penuh tanpa menyebabkan inflasi sehingga pertumbuhan perekonomian dapat berjalan pesat secara menyeluruh.

b. Faktor sosial dan politik

Faktor yang menggunakan anggaran pengeluaran yang besar seperti untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara, bantuan-bantuan sosial, menjaga kestabilan politik dan lainnya.

2) Klasifikasi Pengeluaran Pemerintah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan diperbaharui oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011, Klasifikasi Belanja Pemerintah menurut fungsinya dibagi menjadi sembilan fungsi yaitu fungsi pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan dan perlindungan sosial. Kesembilan fungsi tersebut dikelompokkan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara.

2.3. Pengaruh Variabel Bebas terhadap Variabel Terikat

2.3.1. Pengaruh Dana Desa Terhadap Kemiskinan di Pulau Jawa

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan Masyarakat (Raharjo, 2020). Salah satu sasaran utama dari alokasi Dana Desa adalah penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program prioritas seperti pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan pelayanan sosial. Hasil penelitian Putra (2019) di provinsi Aceh, menyimpulkan bahwa peningkatan dana desa sebesar 1 % dapat menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,316 %. Killai et al. (2022) juga menyatakan bahwa Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, dengan nilai efektivitas sekitar 50,8 %. Hasil penelitian Sabuna & Ruslan (2022) berbeda dengan penelitian sebelumnya karena menunjukkan bahwa meskipun Dana Desa telah disalurkan sejak 2015–2022, kontribusinya terhadap penurunan kemiskinan di Nusa Tenggara Timur belum optimal karena beberapa faktor seperti rendahnya kapasitas aparat desa dan kurangnya pengawasan.

2.3.2. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Terhadap Kemiskinan di Pulau Jawa

Pengeluaran pemerintah dalam sektor pendidikan merupakan salah satu instrumen fiskal penting dalam strategi pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. Hasil penelitian Misdawita & Putri Sari (2022) menemukan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan efektif mengurangi angka kemiskinan. Yusri (2022) menyatakan bahwa pembiayaan pendidikan yang lebih besar meningkatkan akses sekolah dan berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan secara signifikan di Aceh. Hasil penelitian Akbar & Taufiq (2022) juga menyimpulkan bahwa pengelolaan anggaran pendidikan terbukti tepat sasaran dan berhasil menurunkan kemiskinan.

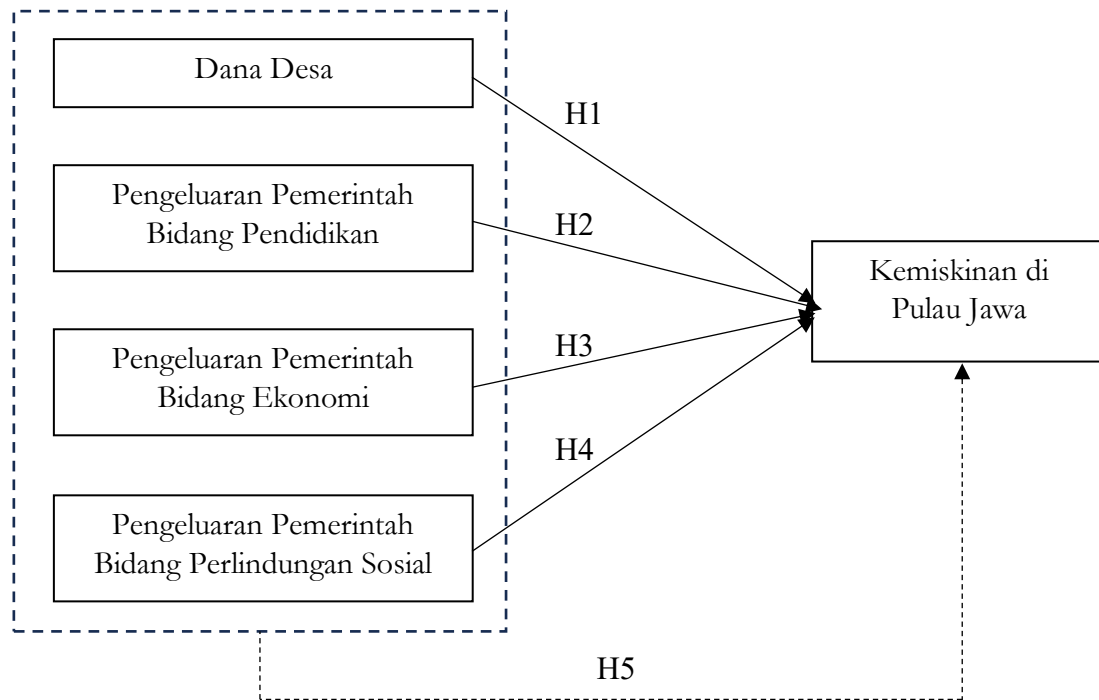
2.3.3. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Pulau Jawa

Pengeluaran pemerintah bidang ekonomi seperti subsidi, pembangunan infrastruktur ekonomi, dan pengeluaran publik, dianggap sebagai instrumen kebijakan fiskal penting dalam menurunkan angka kemiskinan. Hasil penelitian Alviano, Aini & Kusuma (2020) menemukan bahwa variabel pengeluaran pemerintah memiliki efek negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan pengangguran dan pertumbuhan ekonomi juga berpengaruh kuat. Fadillah & Sabar (2023) menyimpulkan bahwa pengeluaran sektor ekonomi (bersamaan dengan pendidikan dan kesehatan) tidak langsung signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Gowa, kecuali melalui efek tidak langsung seperti adanya pengangguran.

2.3.4. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Perlindungan Sosial Terhadap Kemiskinan di Pulau Jawa

Pengeluaran pemerintah pada fungsi perlindungan sosial mencakup subsidi langsung tunai (BLT), bantuan sosial berbasis keluarga (PKH), kartu sembako, dan program seperti Kartu Prakerja. Penelitian Irawan, Junaidi & Sultan (2024) di Kabupaten/kota Sulawesi Selatan (2018–2020) menyimpulkan bahwa pengeluaran bantuan sosial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengurangan kemiskinan, demikian pula belanja modal tidak berpengaruh signifikan. Hasil penelitian Rizki (2020) juga menyimpulkan bahwa sektor perlindungan sosial mampu menahan lonjakan kemiskinan selama masa pandemi COVID-19, meskipun efektivitas distribusi bantuan perlu ditingkatkan. Studi Sinaga, Lubis, Situmorang & Harahap (2022) di Sumatra Utara menunjukkan bahwa program perlindungan sosial efektif memperlambat laju kenaikan angka kemiskinan, terutama melalui Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Kartu Prakerja

2.4. Kerangka Berpikir



Gambar 2.1. Kerangka Berpikir

2.5. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan beberapa pemaparan kajian pustaka sebelumnya, maka hipotesis yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

H₁: diduga Dana Desa berpengaruh negative terhadap kemiskinan di pulau Jawa

H₂: diduga pengeluaran pemerintah bidang Pendidikan berpengaruh negative terhadap kemiskinan di pulau Jawa

H₃: diduga pengeluaran pemerintah bidang ekonomi berpengaruh negative terhadap kemiskinan di pulau Jawa

H₄: diduga pengeluaran pemerintah bidang perlindungan sosial berpengaruh negative terhadap kemiskinan di pulau Jawa

H₅: diduga secara simultan, Dana Desa, pengeluaran pemerintah bidang Pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang ekonomi, pengeluaran pemerintah bidang perlindungan sosial berpengaruh terhadap kemiskinan di pulau Jawa

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Cara Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa informasi ataupun fakta yang dipublikasikan oleh suatu instansi ataupun pihak tertentu yang memiliki kredibilitas. Penelitian ini memperoleh data dari berbagai sumber seperti website Badan Pusat Statistik (BPS) dan website Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan (DJPK Kemenkeu). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dan menggunakan metode data panel.

Data panel merupakan data gabungan yang terdiri dari data *time series* dan *cross section*. Data *time series* merupakan sekumpulan data yang diperoleh berdasarkan rentang waktu tertentu sedangkan data *cross section* adalah sekumpulan data yang terdiri dari berbagai variabel tertentu dalam satu waktu. Penelitian ini menggunakan data *time series* 9 periode dari tahun 2015 hingga tahun 2023 sedangkan data *cross section* dalam penelitian ini mencakup seluruh kabupaten/kota di Pulau Jawa yang memperoleh Dana Desa.

3.2. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari satu variabel terikat (*dependen*) dan empat variabel bebas (*independen*). Variabel *dependen* dalam penelitian ini yaitu kemiskinan dengan menggunakan jumlah penduduk miskin sebagai indikator dari variabel tersebut. Variabel *independen* dalam penelitian ini terdiri dari Dana Desa, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang ekonomi, dan pengeluaran pemerintah bidang perlindungan sosial. definisi operasional variabel dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3. 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Satuan
Variabel Bebas (Dependen)		
Kemiskinan (Y)	adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Ahmadi, 2009).	Ribu jiwa
Variabel Terikat (Independen)		
Dana Desa (X ₁)	Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan Masyarakat (Raharjo, 2020)	Juta Rupiah
Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan (X ₂)	pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah baik untuk mencapai tujuan Pendidikan nasional	Juta Rupiah
Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi (X ₃)	pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah baik untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi	Juta Rupiah
Pengeluaran Pemerintah Bidang Perlindungan Sosial (X ₄)	pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah baik untuk perlindungan sosial	Juta Rupiah

3.3. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode analisis regresi data panel yang merupakan gabungan dari data *time series* dan *cross section*. Metode tersebut digunakan untuk mengetahui korelasi antara Dana Desa, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Perlindungan Sosial terhadap Kemiskinan di Pulau Jawa. Metode data panel dapat meningkatkan efisiensi dengan

meningkatkan derajat kebebasan (*degree of freedom*). Selain itu, metode tersebut memiliki beberapa keunggulan, antara lain:

- a. Metode data panel terdiri dari dua data gabungan, yaitu data *time series* dan *cross section*. Metode tersebut dianggap unggul karena berpeluang menghasilkan *degree of freedom* yang lebih besar karena memberikan lebih banyak data.
- b. Melalui informasi gabungan dari data *time series* dan data *cross section*, metode tersebut dapat mengatasi masalah yang timbul jika ada tindakan menghilangkan variabel (Widarjono, 2018)

Penelitian ini memiliki satu variabel dependen, yaitu variabel kemiskinan (Y), dengan 4 variabel independen, yaitu variabel dana desa (X₁), Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan (X₂), Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi (X₃), dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Perlindungan Sosial (X₄),

Fungsi persamaan yang digunakan dalam penelitian ini ditulis sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it}$$

Keterangan:

Y = kemiskinan (ribu jiwa)

β_0 = koefisien intersep

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = koefisien variabel independent

X₁ = Dana Desa (rupiah)

X₂ = Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan (rupiah)

X₃ = Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi (rupiah)

X₄ = Pengeluaran Pemerintah Bidang Perlindungan Sosial (rupiah)

i = cross section (kabupaten/kota di Jawa yang menerima Dana Desa)

t = time series (2015 – 2023)

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel menggunakan Eviews 13, yang terdiri dari:

3.3.1. Model *Common Effect*

Common effect merupakan metode sederhana yang digunakan mengestimasi data panel dengan menggabungkan data *time series* dan data *cross section*. Menurut Widarjono (2018) dalam melakukan estimasi data panel, model tersebut umumnya menggunakan metode *Ordinary Least Squares* (OLS). Metode tersebut merupakan pendekatan yang

mengabaikan dimensi individu ataupun waktu yang memungkinkan terdapat pengaruh. Hasil estimasi menggunakan metode tersebut menunjukkan perbedaan antar individu ataupun antar waktu yang tidak dapat diketahui.

3.3.2. *Fixed Effect Model*

Fixed effect merupakan model yang menggunakan variabel dummy untuk mengestimasi data panel yang bertujuan untuk mengetahui adanya perbedaan pada intersep. Model ini memiliki nama lain sebagai model *Least Square Dummy Variable* (LSDV) yang memiliki asumsi bahwa koefisien dari regresi (*slope*) tetap antar daerah dan waktu. Meskipun subjek setiap intersep memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya, tetapi intersep pada setiap entitas tidak terdapat perubahan seiring waktu atau biasa dikenal dengan *time variant*.

3.3.3. *Random Effect Model*

Random Effect merupakan model estimasi data menggunakan *error term* dan random yang mungkin terdapat hubungan antara individu dan waktu. Model ini biasa dikenal dengan teknik *General Least Square* (GLS) dan *Error Component Model* (ECM). Metode *random effect* memiliki kelebihan untuk mengatasi permasalahan pada heterogenitas dan memungkinkan untuk mengurangi konsekuensi derajat kebebasan (*degree of freedom*) yang berakibat pada berkurangnya efisiensi parameter. Metode yang dianggap tepat untuk estimasi data menggunakan model *random effect* adalah *Generalized Least Squares* (Widarjono, 2018).

3.3.4. Uji Kesesuaian Model

Pemilihan model terbaik dalam analisis data panel dapat diketahui dengan uji kesesuaian model. Dalam analisis data panel terdapat tiga pengujian yang dapat digunakan untuk memilih teknik yang tepat dalam melakukan estimasi. Ketiga uji analisis data tersebut terdiri dari uji chow test yang digunakan untuk menguji model terbaik antara *common effect* dengan *fixed effect*, uji *lagrange multiplier* (LM) yang berguna untuk mengetahui model terbaik antara *common effect* dengan *random effects*, dan uji *hausman test* yang berguna untuk memilih model terbaik antara *random effects* dengan *fixed effect*.

3.3.5. *Chow Test*

Chow test merupakan model pengujian yang digunakan untuk membandingkan model *common effect* dengan model *fixed effect* untuk mendapatkan model terbaik. Hipotesis yang digunakan dalam *Chow Test* adalah sebagai berikut:

H₀: Model *Common Effect*

H₁: Model *Fixed Effect*

Penentuan model terbaik dilakukan dengan membandingkan nilai F_{tabel} dan F_{hitung} . Jika nilai F_{hitung} lebih kecil dibandingkan dengan F_{tabel} , maka H₀ ditolak dalam artian model terbaik yang digunakan adalah model *fixed effect*. Begitupun sebaliknya, jika nilai F_{hitung} lebih besar dibandingkan F_{tabel} , maka H₀ diterima dalam artian model terbaik yang digunakan adalah *common effect*.

3.3.6. *Lagrange Multiplier*

Lagrange Multiplier test merupakan model pengujian yang digunakan untuk membandingkan model estimasi terbaik antara *common effect* dan *random effect*. *Lagrange Multiplier test* memiliki hipotesis sebagai berikut:

H₀: Model *common effect*

H₁: Model *random effect*

Pemilihan model terbaik dalam *Lagrange Multiplier test* ditentukan berdasarkan probabilitas. Jika probabilitas kurang dari 5%, maka H₀ ditolak yang artinya model yang tepat untuk estimasi adalah *random effect*. Sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih dari 5%, maka H₀ diterima sehingga model yang paling tepat digunakan adalah *common effect*.

3.3.7. *Hausman Test*

Hausman test merupakan model pengujian yang dikembangkan oleh Hausman yang bertujuan untuk memilih model terbaik diantara model *fixed effect* dan *random effect*. Berikut merupakan hipotesis *Hausman test*:

H₀: Model *random effect*

H₁: Model *fixed effect*

Jika probabilitas *correlated random effect* kurang dari 5% maka H₀ ditolak sehingga model yang digunakan untuk estimasi data adalah *fixed effect*. Sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih dari 5% maka H₀ diterima sehingga model yang digunakan untuk estimasi adalah model *random effect*.

3.3.8. Uji Regresi

Uji regresi dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk menginterpretasikan hasil analisis dari pengujian model terbaik yang berkaitan dengan hubungan variabel dependen dan variabel independen. Dalam penelitian ini terdapat beberapa tahapan untuk menafsirkan uji regresi, yaitu koefisien determinasi, Uji F (simultan), dan Uji t (parsial).

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi atau biasa disebut dengan uji *R-Square* merupakan pengujian yang dilakukan untuk melihat seberapa besar proporsi variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Pengujian ini dianggap penting karena hasil pengujian ini dapat menunjukkan layak atau tidaknya model regresi yang telah terestimasi. Apabila nilai R^2 semakin mendekati angka 1, maka semakin besar proporsi variabel independen untuk menggambarkan variabel dependen. Jika nilai R^2 mendekati angka 0, maka semakin kecil kemampuan variabel independen dalam menggambarkan variabel dependen.

b. Uji F (Simultan)

Uji F merupakan pengujian yang memiliki tujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh dari variabel independen secara bersamaan terhadap variabel dependen dengan berdasar pada nilai dari koefisien (*slope regresi*). Berikut merupakan hipotesis pada uji F:

$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$ (tidak terdapat pengaruh secara bersamaan antara variabel independen terhadap variabel dependen)

$H_1: \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$ (terdapat pengaruh secara bersamaan antara variabel independen terhadap variabel dependen)

Kesimpulan yang didapatkan ditentukan dengan membandingkan nilai probabilitas F dan derajat keyakinan. Jika nilai probabilitas F-stat lebih kecil dari $\alpha = 5\%$, maka H_0 ditolak dalam artian variabel independen secara bersamaan mempengaruhi variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai probabilitas F_{hitung} lebih besar dari $\alpha = 5\%$, maka H_0 diterima sehingga variabel independen secara bersamaan tidak mempengaruhi variabel dependen.

c. Uji t (Parsial)

Uji t memiliki tujuan untuk mengetahui hubungan masing-masing variable independen terhadap variabel dependen. Pengujian dalam Uji t menggunakan perbandingan pada nilai probabilitas t dengan derajat keyakinan, Uji t memiliki hipotesis sebagai berikut:

i) Pengaruh Dana Desa (X_1) terhadap Kemiskinan (Y)

Hipotesis:

$H_0: \beta_1 > 0$, Dana Desa tidak berpengaruh terhadap Kemiskinan

$H_1: \beta_1 \leq 0$, Dana Desa berpengaruh terhadap Kemiskinan

ii) Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan (X_2) terhadap Kemiskinan (Y)

Hipotesis:

$H_0: \beta_2 > 0$, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan tidak berpengaruh terhadap Kemiskinan

$H_1: \beta_2 \leq 0$, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan berpengaruh terhadap Kemiskinan

iii) Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi (X_3) terhadap Kemiskinan (Y)

Hipotesis:

$H_0: \beta_3 > 0$, Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Kemiskinan

$H_1: \beta_3 \leq 0$, Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi berpengaruh terhadap Kemiskinan

iv) Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Perlindungan Sosial (X_4) terhadap Kemiskinan (Y)

Hipotesis:

$H_0: \beta_4 > 0$, Pengeluaran Pemerintah Bidang Perlindungan Sosial tidak berpengaruh terhadap Kemiskinan

$H_1: \beta_4 \leq 0$, Pengeluaran Pemerintah Bidang Perlindungan Sosial berpengaruh terhadap Kemiskinan

Dalam pengambilan kesimpulan yang berdasar pada hipotesis, Uji t menggunakan perbandingan antara nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} . Jika nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} , maka H_0 ditolak sehingga masing-masing variabel independent

mempengaruhi variabel dependen. Jika nilai t_{hitung} lebih kecil dari nilai t_{tabel} , maka H_0 diterima sehingga masing-masing variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Deskripsi Objek Penelitian

Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh kabupaten/kota yang ada di tiap provinsi di pulau Jawa. Teknik pengambilan sample pada penelitian ini yaitu *purposive sampling*, dengan kriteria kabupaten/kota yang mendapatkan Dana Desa dari tahun 2015 – 2023. Hasil analisis deskriptif pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4. 1. Hasil analisis deskriptif (per sejuta)

Sample: 2015 2023

Statistik Deskriptif	X1 (Dana Desa)	X2 (Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan)	X3 (Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi)	X4 (Pengeluaran Pemerintah Bidang Perlindungan Sosial)	Y (Kemiskinan)
Mean	144355.4	177737.3	242886.9	659007.8	21180.71
Median	128110.0	184414.6	148779.5	680555.5	18248.46
Maximum	491200.0	506923.4	2619158.	3382704.	98242.65
Minimum	7100.000	9.018600	595.0000	288.9200	100.0000
Std. Dev.	72187.08	124630.6	273517.3	464661.9	13669.17
Skewness	1.331206	0.148983	3.400267	1.030177	1.644415
Kurtosis	6.527716	2.162960	19.80959	5.897159	7.193663
Jarque-Bera Probability	609.5993 0.000000	24.63644 0.000004	10261.59 0.000000	394.4292 0.000000	886.4171 0.000000
Sum	1.08E+08	1.33E+08	1.82E+08	4.94E+08	15864348
Sum Sq. Dev.	3.90E+12	1.16E+13	5.60E+13	1.62E+14	1.40E+11
Observations	749	749	749	749	749

Pada tabel 4.1., dapat dilihat bahwa jumlah kabupaten/kota yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 749 kabupaten/kota di Pulau Jawa yang mendapatkan Dana Desa dari tahun 2015 - 2023. Rata – rata jumlah penduduk miskin tahun 2015 – 2023 di kabupaten/kota di pulau Jawa sebesar 144.355,4 jiwa. Penduduk miskin yang terdata paling banyak ada di Kabupaten Bogor pada tahun 2021 sebanyak 491.200 jiwa,

sedangkan jumlah penduduk miskin paling sedikit ada di Kota Batu pada tahun 2023 sebanyak 7.100 jiwa. Rata – rata dana desa yang diperoleh kabupaten/kota di pulau Jawa dari tahun 2015 – 2023 sebesar Rp 178.000.000.000,-. Dana desa yang paling besar diterima oleh Kab. Bogor pada tahun 2020 sebesar Rp 506.923.429.252,- sedangkan dana desa yang paling kecil diterima oleh Kabupaten Pangandaran pada tahun 2023 sebesar Rp 9.018.623,-.

Pengeluaran pemerintah bidang Pendidikan dari tahun 2015 – 2023 di kabupaten/kota di pulau Jawa rata – rata sebesar Rp 242.886.909.018,-. Kabupaten/kota yang mempunyai pengeluaran paling tinggi yaitu Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2023 sebesar Rp 2.619.157.956.389,-, sedangkan kabupaten/kota yang paling rendah yaitu Kabupaten Tangerang pada tahun 2016 sebesar Rp 595.000.000,-. Pengeluaran pemerintah bidang ekonomi di kabupaten/kota di pulau Jawa pada tahun 2015 – 2023 rata – rata sekitar Rp 659.007.815.656,-. Pemerintah Kabupaten Ciamis pada tahun 2015 mempunyai pengeluaran paling tinggi di bidang ekonomi sebesar Rp 3.382.703.915.037,-, sedangkan pemerintah Kabupaten Tangerang pada tahun 2016 memiliki pengeluaran di bidang ekonomi yang paling rendah yaitu Rp 288.920.000,-. Pengeluaran pemerintah bidang perlindungan sosial di kabupaten/kota di pulau Jawa pada tahun 2015 – 2023 rata – rata sekitar Rp 21.180.705.318,00. Pemerintah Kabupaten Kudus pada tahun 2022 memiliki pengeluaran bidang perlindungan sosial yang paling tinggi yaitu Rp 98.242.647.294,-, sedangkan pemerintah Kabupaten Tangerang pada tahun 2016 memiliki pengeluaran bidang perlindungan sosial yang paling rendah yaitu Rp 100.000.000,-.

4.1.2. Hasil Analisis Data

1) Pemilihan Model Regresi

Metode regresi data panel memiliki tiga jenis model untuk estimasi data penelitian, yaitu model *Common Effect* (CEM), *Fixed Effect* (FEM), dan *Random Effect* (REM). Pemilihan model regresi yang terbaik diantara ketiga model tersebut, diperlukan pengujian untuk memilih model yang tepat agar mendapatkan hasil terbaik.

a. Hasil Uji *Common Effect Model* (CEM)

Hasil Uji model estimasi *Common Effect Model* (CEM) dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4. 2. Hasil uji *Common Effect Model* (CEM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.432474	0.804585	6.751893	0.0000
X1	0.048088	0.008358	5.753581	0.0000
X2	0.124191	0.025274	4.913692	0.0000
X3	0.093629	0.020702	4.522754	0.0000
X4	-0.025308	0.032485	-0.779053	0.4362
R-squared	0.104556	Mean dependent var		11.74185
Adjusted R-squared	0.099742	S.D. dependent var		0.587641
S.E. of regression	0.557565	Akaike info criterion		1.676177
Sum squared resid	231.2937	Schwarz criterion		1.707010
Log likelihood	-622.7285	Hannan-Quinn criter.		1.688059
F-statistic	21.71828	Durbin-Watson stat		0.208160
Prob(F-statistic)	0.000000			

Pada tabel 4.2., dapat dilihat bahwa nilai Adjusted R-squared sebesar 0,099, hal ini berarti dalam persamaan regresi menggunakan model CEM, variabel dana desa (X_1), pengeluaran pemerintah bidang Pendidikan (X_2), pengeluaran pemerintah bidang Ekonomi (X_3), dan pengeluaran pemerintah bidang perlindungan sosial (X_4) hanya berpengaruh sebesar 9,9% terhadap kemiskinan di pulau Jawa.

b. Hasil Uji *Fixed Effect Model* (FEM)

Hasil Uji model estimasi *Fixed Effect Model* (FEM) dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4. 3. Hasil Uji Fixed Effect Model (FEM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	12.88799	0.124644	103.3982	0.0000
X1	-0.001110	0.001189	-0.933958	0.3507
X2	-0.016068	0.004235	-3.794536	0.0002
X3	-0.018473	0.003280	-5.632621	0.0000
X4	-0.008881	0.004737	-1.874604	0.0613
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.986543	Mean dependent var		11.74185
Adjusted R-squared	0.984655	S.D. dependent var		0.587641
S.E. of regression	0.072793	Akaike info criterion		-2.286633
Sum squared resid	3.476056	Schwarz criterion		-1.713144
Log likelihood	949.3439	Hannan-Quinn criter.		-2.065642
F-statistic	522.7219	Durbin-Watson stat		1.128322
Prob(F-statistic)	0.000000			

Pada tabel 4.3., dapat dilihat bahwa nilai Adjusted R-squared sebesar 0,984, hal ini berarti dalam persamaan regresi menggunakan model FEM, variabel dana desa (X_1), pengeluaran pemerintah bidang Pendidikan (X_2), pengeluaran pemerintah bidang Ekonomi (X_3), dan pengeluaran pemerintah bidang perlindungan sosial (X_4) hanya berpengaruh sebesar 98,4% terhadap kemiskinan di pulau Jawa.

c. Hasil Uji *Random Effect Model* (REM)

Hasil Uji model estimasi *Fixed Effect Model* (REM) dapat dilihat pada tabel 4.4.

Tabel 4. 4. Hasil Uji Random Effect Model (REM) (*REM*)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	12.82058	0.131617	97.40824	0.0000
X1	-0.000858	0.001188	-0.722458	0.4702
X2	-0.015715	0.004228	-3.717207	0.0002
X3	-0.017497	0.003275	-5.342776	0.0000
X4	-0.009370	0.004734	-1.979150	0.0482
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.398996	0.9678
Idiosyncratic random			0.072793	0.0322
Weighted Statistics				
R-squared	0.120102	Mean dependent var		0.731944
Adjusted R-squared	0.115372	S.D. dependent var		0.104210
S.E. of regression	0.079595	Sum squared resid		4.713528
F-statistic	25.38820	Durbin-Watson stat		0.820335
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	-0.036670	Mean dependent var		11.74185
Sum squared resid	267.7725	Durbin-Watson stat		0.014440

Pada hasil regresi dengan model REM, dapat dilihat bahwa nilai Adjusted R-squared sebesar 0,115, hal ini berarti dalam persamaan regresi menggunakan model REM, variabel dana desa (X_1), pengeluaran pemerintah bidang Pendidikan (X_2), pengeluaran pemerintah bidang Ekonomi (X_3), dan pengeluaran pemerintah bidang perlindungan sosial (X_4) hanya berpengaruh sebesar 11,5% terhadap kemiskinan di pulau Jawa.

d. Hasil uji *Chow*

Hasil Uji *Chow* dapat dilihat pada tabel 4.5.

Tabel 4. 5. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	240.839108	(88,656)	0.0000
Cross-section Chi-square	2625.835330	88	0.0000

Kriteria pengujian:

- i) jika $p < 0,05$, maka hipotesis nol akan ditolak, sehingga uji regresi linear menggunakan model *FEM*
- ii) jika $p > 0,05$, maka hipotesis nol diterima, sehingga uji regresi linear menggunakan model *CEM*.

Dari hasil uji *Chow*, nilai probabilitas = 0,000; Sehingga $p < 0,05$, maka yang digunakan adalah model estimasi *FEM*.

e. Hasil uji *Hausman*

Hasil Uji *Hausman* dapat dilihat pada tabel 4.6.

Tabel 4. 6. Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	199.593323	4	0.0000

Kriteria pengujian:

- i) jika $p < 0,05$, maka hipotesis nol akan ditolak, sehingga uji regresi linear menggunakan model *FEM*
- ii) jika $p > 0,05$, maka hipotesis nol diterima, sehingga uji regresi linear menggunakan model *REM*.

Dari hasil uji *Hausman*, nilai probabilitas = 0,000; Sehingga $p < 0,05$, maka yang digunakan adalah model estimasi *FEM*.

f. Hasil uji Multikolinearitas

Hasil Uji Multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 4.7.

Tabel 4. 7. Hasil Uji Multikolinearitas

	X1	X2	X3	X4	Y
X1	1.000000	-0.115113	0.126608	0.128400	0.265817
X2	-0.115113	1.000000	0.134601	0.271226	0.129878
X3	0.126608	0.134601	1.000000	0.510441	0.406690
X4	0.128400	0.271226	0.510441	1.000000	0.270859
Y	0.265817	0.129878	0.406690	0.270859	1.000000

Kriteria pengujian:

- i) jika koefisien korelasi masing-masing variabel bebas $> 0,8$ maka terjadi multikolinearitas
- ii) jika koefisien korelasi masing-masing variabel bebas $< 0,8$ maka tidak terjadi multikolinearitas

Hasil pengujian menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai koefisien korelasi $< 0,8$ sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

g. Hasil pemilihan model Regresi

Berdasarkan hasil tahapan uji pemilihan model terbaik melalui *Chow Test* dan *Hausman Test* didapatkan satu model estimasi terbaik dari ketiga model yaitu *Fixed Effect Model* (FEM). Model regresi FEM dapat dilihat pada tabel 4.7.

Tabel 4.7. Hasil Model Estimasi *Fixed Effect Model* (FEM)

Variabel	Koefisien Regresi	t _{hitung}	p-value
X ₁ (Dana Desa)	-0,001110	-7,638525	0,0000
X ₂ (Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan)	-0,016068	-3,877148	0,0001
X ₃ (Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi)	-0,018473	-8,304432	0,0000
X ₄ (Pengeluaran Pemerintah Bidang Perlindungan Sosial)	-0,008881	-1,447192	0,0742
Konstanta Regresi		161104,8	
p-value		0,0000	
R ²		0,976711	

Dari Tabel 4.7, diperoleh persamaan regresi linier:

$$Y = 12,88799 - 0,001110 X_1 - 0,016068 X_2 - 0,018473 X_3 - 0,008881 X_4$$

Keterangan:

Y: jumlah penduduk miskin (jiwa)

X_1 : Dana Desa (rupiah)

X_2 : Pengeluaran pemerintah bidang Pendidikan (rupiah)

X_3 : Pengeluaran pemerintah bidang Ekonomi (rupiah)

X_4 : Pengeluaran pemerintah bidang Perlindungan Sosial (rupiah)

Dari persamaan regresi linear, konstanta regresi linear sebesar 161104,8 yang berarti bahwa jika variabel dana desa, pengeluaran pemerintah bidang Pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang ekonomi, dan pengeluaran pemerintah bidang perlindungan sosial tetap, maka kemiskinan akan bertambah sebesar 161104,8 satuan. Konstanta regresi linear pada variabel dana desa sebesar $-0,001110$, yang berarti bahwa jika variabel dana desa berkurang, maka kemiskinan bertambah sebesar $0,001110$ satuan, sebaliknya jika dana desa bertambah, maka variabel kemiskinan berkurang sebanyak $0,001110$ satuan.

Konstanta regresi linear pada variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan sebesar $-0,016068$, yang berarti bahwa jika variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berkurang, maka kemiskinan bertambah sebesar $0,016068$ satuan, sebaliknya jika pengeluaran pemerintah bidang pendidikan bertambah, maka variabel kemiskinan berkurang sebanyak $0,016068$ satuan. Konstanta regresi linear pada variabel pengeluaran pemerintah bidang ekonomi sebesar $-0,018473$, yang berarti bahwa jika variabel pengeluaran pemerintah bidang ekonomi berkurang, maka kemiskinan bertambah sebesar $0,018473$ satuan, sebaliknya jika pengeluaran pemerintah bidang ekonomi bertambah, maka variabel kemiskinan berkurang sebanyak $0,018473$ satuan. Konstanta regresi linear pada variabel pengeluaran pemerintah bidang perlindungan sosial sebesar $-0,008881$, yang berarti bahwa jika variabel pengeluaran pemerintah bidang perlindungan sosial berkurang, maka kemiskinan bertambah sebesar $0,008881$ satuan, sebaliknya jika pengeluaran pemerintah bidang perlindungan sosial bertambah, maka variabel kemiskinan berkurang sebanyak $0,008881$ satuan.

2) Hasil uji hipotesis (Uji t)

i) Pengaruh Dana Desa terhadap Kemiskinan

Hipotesis:

H_0 = dana desa tidak berpengaruh terhadap kemiskinan

H_1 = dana desa berpengaruh terhadap kemiskinan

Kriteria:

1) Terima H_0 jika $p > 0,01$

2) Terima H_1 jika $p < 0,01$

$p = 0,000 < 0,01$, H_0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa dana desa berpengaruh negative secara signifikan terhadap kemiskinan.

ii) Pengaruh Pengeluaran Pemerintah bidang Pendidikan terhadap Kemiskinan

Hipotesis:

H_0 = Pengeluaran Pemerintah bidang Pendidikan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan

H_1 = Pengeluaran Pemerintah bidang Pendidikan berpengaruh terhadap kemiskinan

Kriteria:

1) Terima H_0 jika $p > 0,01$

2) Terima H_1 jika $p < 0,01$

$p = 0,0001 < 0,01$, H_0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengeluaran Pemerintah bidang Pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan.

iii) Pengaruh Pengeluaran Pemerintah bidang Ekonomi terhadap Kemiskinan

Hipotesis:

H_0 = Pengeluaran Pemerintah bidang Ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan

H_1 = Pengeluaran Pemerintah bidang Ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan

Kriteria:

1) Terima H_0 jika $p > 0,01$

2) Terima H_1 jika $p < 0,01$

$p = 0,000 < 0,01$, H_0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengeluaran Pemerintah bidang Ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan.

iv) Pengaruh Pengeluaran Pemerintah bidang Perlindungan Sosial terhadap Kemiskinan

Hipotesis:

H_0 = Pengeluaran Pemerintah bidang Sosial tidak berpengaruh terhadap kemiskinan

H_1 = Pengeluaran Pemerintah bidang Perlindungan Sosial berpengaruh terhadap kemiskinan

Kriteria:

1) Terima H_0 jika $p > 0,1$

2) Terima H_1 jika $p < 0,1$

$p = 0,1483/2 = 0,07415 < 0,1$ H_0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengeluaran Pemerintah bidang Perlindungan Sosial berpengaruh negative signifikan terhadap kemiskinan.

3) Hasil koefisien determinasi

Nilai *Adjustment R²* pada hasil model regresi FEM sebesar 0,973445, hal ini berarti bahwa variabel dana desa, pengeluaran pemerintah bidang Pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang ekonomi, dan pengeluaran pemerintah bidang perlindungan sosial berpengaruh sebanyak 97,3% terhadap kemiskinan di Pulau Jawa

4.2. Pembahasan

4.2.1. Pengaruh dana desa terhadap kemiskinan di pulau Jawa tahun 2015 – 2023

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana desa berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2015 – 2023. Dana desa dimaksudkan agar desa memiliki kesempatan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, melalui pelatihan dan pemasaran hasil produk masyarakat, pengembangan usaha peternakan, pertanian atau perkebunan masyarakat, pengembangan kawasan wisata, pembentukan BUMDes sehingga masyarakat desa dapat meningkat perekonomiannya dan terangkat dari kemiskinan (Arfiansyah, 2020). Risnasari et al. (2022) menyatakan bahwa salah satu tujuan adanya dana desa yaitu untuk mengentaskan kemiskinan. Hasil regresi linear menunjukkan bahwa jika dana desa berkurang, maka kemiskinan bertambah, sebaliknya jika dana desa bertambah, maka kemiskinan berkurang. Hal ini sesuai hasil penelitian Sigit & Kosasih (2020) yang menyatakan bahwa ketika dana desa naik maka jumlah penduduk miskin akan menurun.

4.2.2. Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terhadap kemiskinan di pulau Jawa tahun 2015 – 2023

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2015 – 2023. Tingginya pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan mampu meningkatkan sarana dan sistem pendidikan yang dapat meningkatkan kemampuan Masyarakat yang akan berpengaruh terhadap kinerjanya dalam mendorong kegiatan perekonomian dan

mampu meningkatkan kondisi perekonomian suatu Negara (Puspitasari et al., 2019). Rendahnya pendidikan, terbatasnya lapangan pekerjaan, dan keterbatasan kapital menjadi beberapa sebab dari munculnya kemiskinan (Leonita & Sari, 2019). Carolina (2022) menyatakan bahwa pendidikan merupakan investasi yang bisa mendukung perkembangan ekonomi, salah satunya dengan cara mendidik anak-anak miskin agar mempunyai kesempatan yang besar untuk keluar dari kemiskinan. Hasil regresi linear menunjukkan bahwa jika pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berkurang, maka kemiskinan bertambah, sebaliknya jika pengeluaran pemerintah bidang pendidikan bertambah, maka kemiskinan berkurang. Muhamad & Rahmi (2023) menyatakan bahwa peningkatan Pengeluaran pemerintah di sector Pendidikan dapat digunakan untuk pembangunan sarana Pendidikan sehingga membantu meningkatkan kualitas modal sumber daya manusia. Peningkatan pendidikan penduduk akan meningkatkan produktivitas mereka. Semakin tinggi produktivitasnya maka semakin tinggi pula dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Semakin banyak kebutuhan hidup terpenuhi, maka semakin sedikit kemiskinan (Putri & Putri, 2021).

4.2.3. Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang ekonomi terhadap kemiskinan di pulau Jawa tahun 2015 – 2023

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah bidang ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2015 – 2023. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian Angraini et al. (2023) yang menyatakan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah untuk kegiatan pembangunan ekonomi daerah mempunyai efek positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. (Firmansyah et al., 2020) juga menyatakan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah untuk kegiatan pembangunan ekonomi daerah mempunyai efek positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi.

4.2.4. Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang perlindungan sosial terhadap kemiskinan di pulau Jawa tahun 2015 – 2023

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah bidang perlindungan sosial berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2015 – 2023. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari bahwa pengeluaran pemerintah digunakan untuk membantu mereka yang rentan terhadap kemiskinan dari segi pendapatan melalui suatu sistem perlindungan sosial modern yang meningkatkan kemampuan

mereka sendiri untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi. Ramdayani et al. (2019) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah sektor perlindungan sosial dan ketertiban keamanan merupakan kebijakan rasional yang diciptakan dalam rangka mewujudkan suatu perlindungan komprehensif yang tidak hanya memberikan perlindungan dari sisi keamanan juga perlindungan sosial bagi kesejahteraan masyarakat sehingga akan tercipta kehidupan kondusif dan sejahtera. Pemerintah hadir untuk memberikan segala jenis perlindungan dari risiko-risiko mikro yang dapat mengancam masyarakat sejak di kandungan hingga usia senja, seperti risiko bayi terkena stunting hingga ketidakmampuan mengurus diri dan hidup sebatang kara di masa tua (Hidarini & Bawono, 2020). Akan tetapi, hasil penelitian Setiawan & Fikriah (2020) menjelaskan bahwa apabila anggaran perlindungan sosial setiap tahunnya terus meningkat, hal ini berarti ada ketidak efektifan dalam pelaksanaan program perlindungan sosial, yang awalnya bertujuan mencegah namun yang terjadi sebaliknya kemiskinan tidak terlalu menurun namun peningkatan jumlah masyarakat yang beresiko semakin tinggi, ini mencerminkan kalau perekonomian dan kesejahteraan tidak dalam kondisi yang baik.

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis yang telah dilakukan sebelumnya, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pada hasil dari pengujian dengan *Fixed Effect Model* dalam analisis regresi dan hasil uji t parsial, menunjukkan terdapat pengaruh negatif yang signifikan dari Dana Desa terhadap Kemiskinan di Jawa tahun 2015-2023. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Dana Desa mampu mengurangi kemiskinan di Jawa, karena pada dasarnya dana desa sendiri dianggarkan dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, khususnya untuk tingkat desa.
2. Berdasarkan pada hasil dari pengujian dengan *Fixed Effect Model* dalam analisis regresi dan hasil uji t parsial, menunjukkan terdapat pengaruh negatif yang signifikan dari Pengeluaran Pemerintah bidang Pendidikan terhadap Kemiskinan di Jawa tahun 2015-2023. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah bidang Pendidikan mampu mengurangi kemiskinan di Jawa, karena Pengeluaran pemerintah di sektor Pendidikan dapat digunakan untuk pembangunan sarana, prasarana, dan sistem pendidikan untuk membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan kondisi perekonomian Negara.
3. Berdasarkan pada hasil dari pengujian dengan *Fixed Effect Model* dalam analisis regresi dan hasil uji t parsial, menunjukkan terdapat pengaruh negatif yang signifikan dari Pengeluaran Pemerintah bidang Ekonomi terhadap Kemiskinan di Jawa tahun 2015-2023. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah bidang Ekonomi mampu mengurangi kemiskinan di Jawa, karena pengeluaran tersebut umumnya dialokasikan untuk program-program yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, seperti pembangunan infrastruktur ekonomi, pemberdayaan UMKM, dan penciptaan lapangan kerja. Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan peluang kerja, pendapatan masyarakat

pun meningkat sehingga mampu mengurangi tingkat kemiskinan secara nyata di wilayah yang diteliti.

4. Berdasarkan pada hasil dari pengujian dengan *Fixed Effect Model* dalam analisis regresi dan hasil uji t parsial, menunjukkan terdapat pengaruh negatif yang signifikan dari Pengeluaran Pemerintah bidang Perlindungan Sosial terhadap Kemiskinan di Jawa tahun 2015-2023. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah bidang Perlindungan Sosial mampu mengurangi kemiskinan di Jawa, karena Pengeluaran Pemerintah bidang Perlindungan Sosial tersebut mencakup bantuan sosial, subsidi, dan program jaminan sosial yang secara langsung meningkatkan daya beli serta ketahanan ekonomi kelompok masyarakat miskin dan rentan. Dengan adanya intervensi fiskal melalui perlindungan sosial, kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi, sehingga risiko jatuh ke dalam kemiskinan dapat dikurangi secara efektif.
5. Berdasarkan pada hasil dari pengujian dengan *Fixed Effect Model* dalam analisis regresi, menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan dari Dana desa, pengeluaran pemerintah bidang Pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang ekonomi, dan pengeluaran pemerintah bidang perlindungan sosial terhadap Kemiskinan di Jawa tahun 2015-2023. Dana Desa terbukti efektif dalam mendukung pembangunan lokal dan meningkatkan akses layanan dasar di pedesaan. Pengeluaran di bidang pendidikan berkontribusi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mendorong mobilitas ekonomi. Sementara itu, belanja pemerintah di sektor ekonomi memperkuat pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja, dan pengeluaran untuk perlindungan sosial memberikan bantalan ekonomi bagi kelompok rentan. Secara keseluruhan, sinergi kebijakan fiskal lintas sektor ini terbukti berperan penting dalam mengurangi tingkat kemiskinan secara signifikan di wilayah Jawa.

5.2. Implikasi

1. Pemerintah pusat dan daerah perlu terus memperkuat tata kelola dan pengawasan penggunaan Dana Desa agar lebih tepat sasaran dalam upaya pengentasan kemiskinan. Alokasi Dana Desa hendaknya difokuskan pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, pembangunan infrastruktur dasar, serta peningkatan kapasitas masyarakat desa agar dampak terhadap pengurangan kemiskinan dapat lebih optimal dan berkelanjutan.
2. Pemerintah perlu meningkatkan kualitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran pendidikan, terutama untuk memperluas akses pendidikan berkualitas, memperbaiki fasilitas pendidikan di daerah tertinggal, serta memperkuat program pendidikan vokasional yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan akan memperkuat daya saing dan kemampuan masyarakat dalam keluar dari kemiskinan.
3. Pemerintah disarankan untuk memperluas dan memperkuat program-program pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, seperti pemberdayaan UMKM, pengembangan infrastruktur ekonomi, dan peningkatan akses pembiayaan usaha kecil. Kebijakan fiskal di bidang ini harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan, khususnya di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi.
4. Pemerintah perlu menjaga kesinambungan dan ketepatan sasaran program perlindungan sosial seperti bantuan langsung tunai, jaminan sosial, dan subsidi kebutuhan pokok. Perlu juga dilakukan penguatan sistem data terpadu agar bantuan dapat menjangkau kelompok masyarakat miskin dan rentan secara akurat dan efisien. Perlindungan sosial harus menjadi instrumen mitigasi risiko ekonomi yang adaptif terhadap dinamika sosial-ekonomi.
5. Diperlukan pendekatan lintas sektor yang terpadu antara kebijakan Dana Desa, pendidikan, ekonomi, dan perlindungan sosial. Pemerintah perlu menyusun perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi antar sektor

untuk memaksimalkan dampak kebijakan terhadap pengurangan kemiskinan. Evaluasi secara berkala terhadap efektivitas program di masing-masing sektor juga penting untuk menyesuaikan arah kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat miskin di Jawa.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. K. F., & Taufiq, M. (2022). The Effect of Government Expenditure in Education, Health and Social Assistance Spending on the Poverty Rate of Yogyakarta Special Region Province. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, 2(4), 1–15. <https://doi.org/10.55927/ministal.v2i4.5267>
- Alviano, R. A., Aini, I. N., & Kusuma, H. (2020). Pengaruh kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan di Kalimantan Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 4(2), 222–237. <https://doi.org/10.22219/jie.v4i2.11555>
- Anggoro, B., Hamidy, F., & Putra, A. D. (2022). Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus : Desa Isorejo Kec. Bunga Mayang Kab. Lampung Utara). *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi Akuntansi (JIMASIA)*, 2(2), 54–61.
- Angraini, D., Fathiyah, F., & Masnun, M. (2023). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi dan Pelayanan Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 14(2), 157–164. <https://doi.org/10.33087/eksis.v14i2.408>
- Arfiansyah, M. A. (2020). Dampak Dana Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Jawa Tengah. *Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 1(1), 91–106. <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v1i1.20>
- Arina, A. I. S., Masinambow, V., & Walewangko, E. N. (2021). Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 22(3), 22–41.
- Carolina, M. (2022). The Effect of Government Expenditures in The Field of Subsidies, Education and Health on Poverty. *Jurnal Budget*, 7(1), 165–180.
- Fadillah, N., & Sabar, W. (2023). Efek belanja pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran, dan kemiskinan di Kabupaten Gowa (2006–2021). *Bulletin of Economic Studies (BEST)*, 3(1). <https://doi.org/10.24252/best.v3i1.35390>

- Firmansyah, R., Ilman, A. H., & Cita, F. P. (2020). Pengaruh pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten Sumbawa tahun 2004-2017. *Nusantara Journal of Economic*, 2(1), 53–62.
- Hasibuan, S. A., & Syahbudi, M. (2022). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(4), 1158–1166. <https://doi.org/10.30651/jms.v7i4.13218>
- Hidarini, R. A., & Bawono, A. D. B. (2020). Peran Belanja Pendidikan dan Belanja Perlindungan Sosial sebagai Variabel Moderating Terhadap Hubungan Ruang Fiskal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Studi Empiris di Seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2018). *Seminar Nasional Dan Call For Paper 2020 : "Paradigma Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Era 4.0,"* 285–296.
- Irawan, F. F., Junaidi, J., & Sultan, S. (2024). Analysis of the effect of social assistance and capital expenditure on poverty. *RELASI: Jurnal Ekonomi*, 20(1), 1–13. <https://doi.org/10.31967/relasi.v20i1.644>
- Juliani, H. (2020). Kebijakan Fiskal: Anggaran Belanja Negara Untuk Perlindungan Sosial Dalam Penanganan Pandemi Covid 19. *Online Administrative Law & Governance Journal*, 3(4), 595–616.
- Kaharudin, R., Kumenaung, A. G., & Niode, A. O. (2019). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan (Studi Kasus Pada Kota Manado Tahun 2001-2017). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19, 13–23.
- Killay, F. N., Keliwon, F. D., & Rariandhy, S. (2022). Pengaruh Dana Desa terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Maluku Barat Daya. *Kupna: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Humaniora*, 3(1), 1–15. <https://doi.org/10.30598/kupna.v3i1.6151>
- Leonita, L., & Sari, R. K. (2019). Pengaruh PDRB, Pengangguran dan Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *ISOQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(2), 1–8. <http://studentjournal.umpo.ac.id/index.php/isoquant>
- Misdawita, A., & Putri Sari, A. (2022). Analisis dampak pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran subsidi terhadap kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 4(2), 50. <https://doi.org/10.22212/jekp.v4i2.50>
- Muhamad, A. R., & Rahmi, D. (2023). Pengaruh Teknologi, Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat 2007-2021. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 45–52. <https://doi.org/10.29313/jrieb.v3i1.1924>

- Puspitasari, J. M., Sarfiah, S. N., & Rusmijati. (2019). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan, Sektor Kesehatan, Sektor Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Periode Tahun 2010-2017). *DINAMIC: Directory Journal of Economic*, 1(1), 29–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.31002/dinamic.v1i1>
- Putra, H. A. (2019). Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Desa terhadap Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Aceh. *Jurnal Pusaka*, 7(2), 123–133. <https://doi.org/10.31000/pusaka.v7i2.30>
- Putri, E. M., & Putri, D. Z. (2021). Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pendidikan Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembangunan*, 10(2), 106–114. <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/ekosains>
- Rahim, A., Sutanty, M., & Anggita, P. (2021). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap IPM Kabupaten Sumbawa Tahun 2015-2020. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 9(3), 276–284.
- Rahmah, N. A., Lukman, Pratiwi, R., & Sufiawan, N. A. (2023). Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap IPM di Kota Payakumbuh. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 9(1), 222–234.
- Ramdayani, S. S., Kharisma, B., & Wibowo, K. (2019). Pengeluaran Pemerintah Sektor Perlindungan Sosial, Ketertiban Keamanan, dan Kriminalitas. *Jurnal Economia*, 15(2), 259–274.
- Risnasari, A. L., Rengga, A., & Luju, E. (2022). Pengaruh Pemanfaatan Dana Desa Dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Iligai Kecamatan Lela Kabupaten Sikka. *Projemen UNIPA*, 9(2), 32–50.
- Rizki, M. (2020). Dampak program perlindungan sosial dalam mengatasi kemiskinan di tengah pandemi COVID-19. *Jurnal Good Governance*, 17(2), 1–15. <https://doi.org/10.32834/gg.v17i2.335>
- Sabuna, L., & Ruslan, R. (2022). Analisis Efektivitas Dana Desa terhadap Penurunan Kemiskinan di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Sosial, Teknologi, dan Administrasi Pemerintahan*, 2(3), 55–64. <https://doi.org/10.54082/jstar.v2i3.44>
- Setiawan, A., & Fikriah. (2020). Pengaruh Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)*, 5(4), 212–221.
- Sigit, T. A., & Kosasih, A. (2020). Pengaruh Dana Desa Terhadap Kemiskinan: Studi Tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 105–119.

- Sinaga, E., Lubis, T. A., Situmorang, E. A. O., & Harahap, A. S. (2022). Dampak program perlindungan sosial terhadap kemiskinan di Sumatra Utara. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 3(2), 116–131. <https://doi.org/10.33105/jmp.v3i2.416>
- Sumargo, B., & Simanjuntak, N. M. M. (2019). Deprivasi Utama Kemiskinan Multidimensi Antarprovinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 19(2), 160–172. <https://doi.org/10.21002/jepi.2019.10>
- Susanto, R., & Pangesti, I. (2020). Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Journal of Applied Business and Economics (JABE)*, 7(2), 271–278.
- Violin, Z. I., & Lutfi, M. Y. (2022). Analisis Ketimpangan Pendapatan di Pulau Jawa dan Faktor yang Mempengaruhinya Tahun 2010 - 2019. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(1), 227–252. <https://doi.org/10.25105/jet.v2i1.14740>
- Yusri, A. (2022). Does government expenditure affect poverty, health, and education? Evidence from Aceh, Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 6(1), 1–20. <https://doi.org/10.36574/jpp.v6i1.249>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Penelitian Tahun 2015

Wilayah	Fungsi Pendidikan	Fungsi Ekonomi	Fungsi Perlindungan Sosial	Grand Total	Dana Desa	Jml Masy. Miskin (Ribu Jiwa)
PROVINSI JAWA BARAT	0	0	0	0	-	4435.7
Kab. Bandung	Rp 1576152635714	Rp 212320612600.00	Rp 40567551766.00	Rp 1829040800080.00	Rp 87133625000.00	281
Kab. Bekasi	Rp 1126589743984	Rp 169331874251.00	Rp 28847139175.00	Rp 1324768757410.00	Rp 60185546000.00	169.2
Kab. Bogor	Rp 1842160796014	Rp 285388464504.00	Rp 49606680944.00	Rp 2177155941462.00	Rp 130262061000.00	487.1
Kab. Ciamis	Rp 3382703915037	Rp 418970594307.00	Rp 38578958331.00	Rp 3840253467675.00	Rp 74777160000.00	104.9
Kab. Cianjur	Rp 954923816126	Rp 86849299244.00	Rp 11738376647.00	Rp 1053511492017.00	Rp 106824450000.00	273.9
Kab. Cirebon	Rp 1011116026077	Rp 125085572901.00	Rp 35958036055.00	Rp 1172159635033.00	Rp 125829723000.00	313.2
Kab. Garut	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp 124926980000.00	325.7
Kab. Indramayu	Rp 896003582300	Rp 87233012458.00	Rp 25304758767.00	Rp 1008541353525.00	Rp 93551952000.00	253.1
Kab. Karawang	Rp 999311913580	Rp 144555983018.00	Rp 28320392651.00	Rp 1172188289249.00	Rp 89233910000.00	235
Kab. Kuningan	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp 100359733000.00	147.2
Kab. Majalengka	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp 93193552000.00	167.5
Kab. Purwakarta	Rp 595754076715	Rp 148324623600.00	Rp 29166339506.00	Rp 773245039821.00	Rp 51699059000.00	83.9
Kab. Subang	Rp 822279487915	Rp 120275658821.00	Rp 14242218198.00	Rp 956797364934.00	Rp 72775009000.00	187.2
Kab. Sukabumi	Rp 1051346793539	Rp 204716969998.00	Rp 33458756123.00	Rp 1289522519660.00	Rp 113975106000.00	217.9
Kab. Sumedang	Rp 762666858212	Rp 133752163177.00	Rp 18248464820.42	Rp 914667486209.42	Rp 77442881000.00	129
Kab. Tasikmalaya	Rp 1069760737953	Rp 167472193023.00	Rp 24685793839.00	Rp 1261918724815.00	Rp 101340713000.00	106.8
Kota Bandung	Rp 1482618783499	Rp 182837134388.00	Rp 33951630826.00	Rp 1699407548713.00	-	114.1
Kota Bekasi	Rp 1212043730401	Rp 121614072968.00	Rp 20992286604.00	Rp 1354650089973.00	-	146.9
Kota Bogor	Rp	Rp	Rp	Rp	-	79.2
Kota Cirebon	Rp 345448373952	Rp 67559433013.00	Rp 13387933354.00	Rp 426395740319.00	-	31.7
Kota Depok	Rp 565457781532	Rp 100389867070.73	Rp 47812206667.00	Rp 713659855269.73	-	50
Kota Sukabumi	Rp 861412334313	Rp 205213175931.00	Rp 40516114293.00	Rp 1107141624537.00	-	27.8
Kota Tasikmalaya	Rp 519401522848	Rp 60548111849.00	Rp 11376168972.00	Rp 591325803669.00	-	106.8
Kota Cimahi	Rp 354824523550	Rp 30210443956.00	-	Rp 385034967506.00	-	34.1
Kota Banjar	Rp 216072354350	Rp 33379947504.00	Rp 13355836384.00	Rp 262808138238.00	Rp 5623610000.00	13.4
Kab. Bandung Barat	Rp 762229701279	Rp 123515196506.00	Rp 25146480645.00	Rp 910891378430.00	Rp 53101326000.00	205.7
Kab. Pangandaran	Rp	Rp	Rp	Rp		42

PROV. JAWA TENGAH	Rp 307856324565	Rp 935848523587.00	Rp 200981275722.00	Rp 1444686123874.00	Rp 74810054000.00	4577
Kab. Banjarnegara	Rp 577569085851	Rp 73241167902.00	Rp 5129906212.00	Rp 655940159965.00	Rp 89291645000.00	165.4
Kab. Banyumas	Rp 1006019670555	Rp 119289082501.00	Rp 10689843375.00	Rp 1135998596431.00	Rp 66579163000.00	285.9
Kab. Batang	Rp 431608541950	Rp 66263933697.00	Rp 11203980226.00	Rp 509076455873.00	Rp 74816870000.00	83.5
Kab. Blora	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp 72548977000.00	115
Kab. Boyolali	Rp 690891467929	Rp 73547558140.00	Rp 10500720073.00	Rp 774939746142.00	Rp 94563325000.00	120
Kab. Brebes	Rp 817177984762	Rp 95012819794.00	Rp 10475359559.00	Rp 922666164115.00	Rp 81060083000.00	352
Kab. Cilacap	Rp 903178866914	Rp 121464788380.00	Rp 15740691540.00	Rp 1040384346834.00	Rp 73852473000.00	243.5
Kab. Demak	Rp 1487185713675	Rp 185636427855.00	Rp 43557308337.00	Rp 1716379449867.00	Rp 80175760000.00	160.9
Kab. Grobogan	Rp 737294410435	Rp 94112499831.00	Rp 22569598409.00	Rp 853976508675.00	Rp 55540072000.00	184.5
Kab. Jepara	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp 46196873000.00	100.6
Kab. Karanganyar	Rp 662761826828	Rp 75132871914.00	Rp 14569085512.00	Rp 752463784254.00	Rp 125844565000.00	106.4
Kab. Kebumen	Rp 815009974017	Rp 93809841978.00	Rp 9301662660.00	Rp 918121478655.00	Rp 74239102000.00	241.9
Kab. Kendal	Rp 1682181513597	Rp 320213144355.00	Rp 66921224109.00	Rp 2069315882061.00	Rp 108674969000.00	109.3
Kab. Klaten	Rp 912713721019	Rp 65156291140.00	Rp 21717153224.00	Rp 999587165383.00	Rp 36178610000.00	172.3
Kab. Kudus	Rp 499049559377	Rp 149970627547.00	Rp 9521932690.00	Rp 658542119614.00	Rp 101155122000.00	64.1
Kab. Magelang	Rp 1190288292354	Rp 181605678030.00	Rp 17788174860.00	Rp 1389682145244.00	Rp 110946620000.00	162.4
Kab. Pati	Rp 738532037368	Rp 101424310867.00	Rp 9619791425.00	Rp 849576139660.00	Rp 77762725000.00	147.1
Kab. Pekalongan	Rp 599506251283	Rp 71649655550.00	Rp 13946401240.00	Rp 685102308073.00	Rp 66619532000.00	112.1
Kab. Pemalang	Rp 703149939646	Rp 109961897846.00	Rp 9973758503.00	Rp 823085595995.00	Rp 66606973000.00	235.5
Kab. Purbalingga	Rp 232945877182	Rp 27737446961.00	Rp 4424060201.00	Rp 265107384344.00	Rp 124419463000.00	176.5
Kab. Purworejo	Rp 619850665131	Rp 83113197649.00	Rp 22557662633.00	Rp 725521525413.00	Rp 79709975000.00	101.2
Kab. Rembang	Rp 439823347476	Rp 89415650587.00	Rp 6490110035.00	Rp 535729108098.00	Rp 57840951000.00	119.1
Kab. Semarang	Rp 594752584378	Rp 93305397974.00	Rp 14285187210.00	Rp 702343169562.00	Rp 56174163000.00	81.2
Kab. Sragen	Rp 731373874247	Rp 81566308193.00	Rp 9891153326.00	Rp 822831335766.00	Rp 43045054000.00	130.4
Kab. Sukoharjo	Rp 625384096994	Rp 21128550163.00	Rp 19856113325.00	Rp 666368760482.00	Rp 81620159000.00	79.9
Kab. Tegal	Rp 705090420312	Rp 69224886338.00	Rp 26163049929.00	Rp 800478356579.00	Rp 72423652000.00	143.5
Kab. Temanggung	Rp 704410305150	Rp 146567037536.00	Rp 30482811804.00	Rp 881460154490.00	Rp 69330086000.00	87.5
Kab. Wonogiri	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp .00	123
Kab. Wonosobo	Rp 496034046361	Rp 78975180268.00	Rp 14469326572.00	Rp 589478553201.00	Rp 66862280000.00	166.4
Kota Magelang	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp .00	10.9

Kota Pekalongan	Rp 6171261800	Rp 2636800458.00	-Rp 4064545700.00	Rp 4743516558.00	Rp .00	24.1
Kota Salatiga	Rp 180964560237	Rp 38285324895.00	Rp 8753888423.00	Rp 228003773555.00	Rp .00	10.6
Kota Semarang	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp .00	84.3
Kota Surakarta	Rp 574502708395	Rp 147721623411.00	Rp 15583983864.00	Rp 737808315670.00	Rp .00	55.7
Kota Tegal	Rp 246958573610	Rp 42806860043.00	Rp 10545047568.00	Rp 300310481221.00	Rp .00	20.3
PROV. D.I. YOGYAKARTA	Rp 215667476690	Rp 246709315570.00	Rp 48523899900.00	Rp 510900692160.00	Rp .00	550.23
Kab. Bantul	Rp 686923763260	Rp 69316232907.00	Rp 18381884022.00	Rp 774621880189.27	Rp 26962671000.00	160.15
Kab. Gunung Kidul	Rp 621256167190	Rp 89765094991.00	Rp 21077570315.00	Rp 732098832496.00	Rp 46117057000.00	155
Kab. Kulon Progo	Rp 463406542186	Rp 77149547418.00	Rp 5781837397.00	Rp 546337927001.00	Rp 26948074000.00	35.98
Kab. Sleman	-	-	-	-	Rp 28048816000.00	88.13
Kota Yogyakarta	-	-	-	-	-	110.96
PROV. JAWA TIMUR	-	-	-	-	-	4789.12
Kab. Bangkalan	-	-	-	-	Rp 79115023000.00	216.23
Kab. Banyuwangi	Rp 343227063078	Rp 868231568608.00	Rp 55028380864.00	Rp 1266487012550.00	Rp 59888614000.00	146
Kab. Blitar	Rp 820159213112	Rp 94538253109.00	Rp 19939140734.00	Rp 934636606955.00	Rp 62103692000.00	114.12
Kab. Bojonegoro	Rp 718011801759	Rp 112843638676.00	Rp 22773371021.00	Rp 853628811456.00	Rp 116539758000.00	193.99
Kab. Bondowoso	Rp 528420149892	Rp 83034649513.00	Rp 11869668310.00	Rp 623324467715.00	Rp 60687619000.00	113.72
Kab. Gresik	Rp 563822297510	Rp 80737535711.00	Rp 16659708741.00	Rp 661219541962.00	Rp 91691495000.00	170.76
Kab. Jember	Rp 1170422989401	Rp 133441011384.00	Rp 26524192756.00	Rp 1330388193541.00	Rp 71400973000.00	269.54
Kab. Jombang	Rp 757847645258	Rp 73742285850.20	Rp 9780270042.00	Rp 841370201150.20	Rp 85437433000.00	133.75
Kab. Kediri	Rp 792231536368	Rp 66433037925.00	Rp 16765503201.00	Rp 875430077494.00	Rp 97418474000.00	199.38
Kab. Lamongan	Rp 641047443048	Rp 69161326009.00	Rp 16958288620.00	Rp 727167057677.00	Rp 127056805000.00	182.64
Kab. Lumajang	Rp 570962690517	Rp 44509880671.00	Rp 2672268419.00	Rp 618144839607.00	Rp 57562288000.00	118.51
Kab. Madiun	Rp 543168784123	Rp 65468794736.00	Rp 15943273003.00	Rp 624580851862.00	Rp 55287810000.00	84.74
Kab. Magetan	Rp 617437251172	Rp 78747025306.00	Rp 10059601181.00	Rp 706243877659.00	Rp 56708716000.00	71.16
Kab. Malang	Rp 725937066052	Rp 169926915601.27	Rp 11073856129.00	Rp 906937837782.27	Rp 109423772000.00	292.87
Kab. Mojokerto	Rp 561699026217	Rp 67317155137.95	Rp 9457327710.00	Rp 638473509064.95	Rp 82636892000.00	113.86
Kab. Nganjuk	Rp 719468408670	Rp 86467448021.00	Rp 15138146234.00	Rp 821074002925.00	Rp 75231367000.00	132.04
Kab. Ngawi	-	-	-	-	Rp 61959247000.00	129.32
Kab. Pacitan	Rp 492151027897	Rp 67617469446.00	Rp 10295095623.00	Rp 570063592965.60	Rp 46754834000.00	92.08
Kab. Pamekasan	Rp 571433583464	Rp 68552511974.00	Rp 18364590797.00	Rp 658350686235.00	Rp 54023090000.00	146.92

Kab. Pasuruan	Rp 747326545074	Rp 124743222101.00	Rp 11479543915.00	Rp 883549311090.00	Rp 96110603000.00	169.19
Kab. Ponorogo	Rp 696706764347	Rp 74357608705.00	Rp 10164302810.00	Rp 781228675862.00	Rp 78829344000.00	103.22
Kab. Probolinggo	Rp 1109985414880	Rp 179656865062.00	Rp 38682921510.00	Rp 1328325201452.00	Rp 94777663000.00	236.96
Kab. Sampang	Rp 445198090800	Rp 83513788038.00	Rp 26709620127.00	Rp 555421498964.50	Rp 58384564000.00	240.35
Kab. Sidoarjo	Rp 949750982570	Rp 161883539806.00	Rp 31617276350.00	Rp 1143251798726.00	Rp 91414871000.00	136.13
Kab. Situbondo	Rp 499532556633	Rp 105716821233.00	Rp 12333263965.00	Rp 617582641831.00	Rp 38962693000.00	91.17
Kab. Sumenep	-	-	-	-	Rp 94880517000.00	216.84
Kab. Trenggalek	Rp 585027648960	Rp 84889251269.00	Rp 10605457457.00	Rp 680522357686.00	Rp 44080846000.00	92.17
Kab. Tuban	Rp 677338576889	Rp 99311808808.00	Rp 16743758919.00	Rp 793394144616.00	Rp 88124523000.00	196.59
Kab. Tulungagung	Rp 799569675962	Rp 90790954970.00	Rp 29443613421.00	Rp 919804244353.00	Rp 71037288000.00	87.37
Kota Blitar	Rp 222892332495	Rp 46856583020.00	Rp 11877367418.00	Rp 281626282933.00	-	10.04
Kota Kediri	Rp 314744869432	Rp 58736731863.00	Rp 14185900515.00	Rp 387667501810.00	-	23.77
Kota Madiun	-	Rp 21572895126.00	-	Rp 21572895126.00	-	8.55
Kota Malang	Rp 624724935829	Rp 71425387704.00	Rp 33776155530.00	Rp 729926479063.00	-	39.1
Kota Mojokerto	Rp 149698016157	Rp 33430562761.00	Rp 10451472124.00	Rp 193580051041.50	-	7.72
Kota Pasuruan	Rp 173542275691	Rp 47203975214.00	Rp 14464253410.00	Rp 235210504315.00	-	14.52
Kota Probolinggo	Rp 205299728657	Rp 59380177488.00	Rp 28217168595.00	Rp 292897074740.00	-	18.66
Kota Surabaya	Rp 1627077876933	Rp 244586351221.00	Rp 105656654815.00	Rp 1977320882969.00	-	165.72
Kota Batu	-	-	-	-	Rp 6484041000.00	9.43
PROV. BANTEN	Rp 273042567994	Rp 246976208717.00	Rp 74497656579.00	Rp 594516433290.00	-	
Kab. Lebak	Rp 692348562754	Rp 95442304133.00	Rp 8043191030.00	Rp 795834057917.00	Rp 95972125000.00	
Kab. Pandeglang	Rp 391462880189	Rp 48855296870.00	Rp 20081192731.00	Rp 460399369790.00	Rp 91602411000.00	
Kab. Serang	Rp 676714670997	Rp 106126731155.00	Rp 15741896463.00	Rp 798583298615.00	Rp 89813784000.00	
Kab. Tangerang	-	-	-	-	Rp 75128048000.00	
Kota Cilegon	Rp 291952559248	Rp 60522488278.00	Rp 19571275210.00	Rp 372046322736.00	-	
Kota Serang	-	-	-	-	-	
Kota Tangerang	Rp 843448833629	Rp 87816712478.00	Rp 18499083535.00	Rp 949764629642.00	-	
Kota Tangerang Selatan	Rp 394015016053	Rp 31635081036.00	Rp 20385863286.00	Rp 446035960375.00	-	

Lampiran 2. Data Penelitian Tahun 2016

Wilayah	Fungsi Pendidikan	Fungsi Ekonomi	Fungsi Perlindungan Sosial	Grand Total	Dana Desa	Jml Masy. Miskin (Ribu Jiwa)
PROV. JAWA BARAT	Rp 192428688829	Rp 658876625688.00	Rp 86450703821.00	Rp 937756018338	-	4224.3
Kab. Bandung	Rp 86186656989	Rp 136096746969.00	Rp 37972720842.00	Rp 260256124800.00	Rp 195728743000.00	272.7
Kab. Bekasi	Rp 332884143800	Rp 127380030700.00	Rp 52053135000.00	Rp 512317309500.00	Rp 133572623194.00	164.4
Kab. Bogor	Rp 330626229718	Rp 211149068000.00	Rp 46234096000.00	Rp 588009393718.00	Rp 292555382000.00	490.8
Kab. Ciamis	Rp 26908904126	Rp 68183052667.00	Rp 9645959110.00	Rp 104737915903.00	Rp 167842952000.00	98.8
Kab. Cianjur	Rp 54540683750	Rp 80933245283.00	Rp 8197942900.00	Rp 143671871933.00	Rp 240412941000.00	261.4
Kab. Cirebon	Rp 31571900694	Rp 95516977399.00	Rp 25130647915.00	Rp 152219526008.00	Rp 282549199000.00	288.5
Kab. Garut	Rp 63697226224	Rp 215378404939	Rp 16346216593	Rp 295421847756.00	Rp 280444152000.00	298.5
Kab. Indramayu	Rp 18193141000	Rp 61671234825.00	Rp 21970039250.00	Rp 101834415075.00	Rp 209945904000.00	237
Kab. Karawang	Rp 136423336780	Rp 128749495700.00	Rp 31536562200.00	Rp 296709394680.00	Rp 200286996655.00	230.6
Kab. Kuningan	Rp 26718434500	Rp 42601126697	Rp 23629197000	Rp 92948758197.00	Rp 225175998000.00	144.1
Kab. Majalengka	Rp 47091654474	Rp 78191135084	Rp 21728875754	Rp 147011665312.00	Rp 208979702000.00	152.5
Kab. Purwakarta	Rp 42309820229	Rp 125639389248.00	Rp 11818764673.00	Rp 179767974150.00	Rp 116027677000.00	83.6
Kab. Subang	Rp 85466512125	Rp 108937821639.00	Rp 26556006932.00	Rp 220960340696.00	Rp 163506065460.00	170.4
Kab. Sukabumi	Rp 47062386832	Rp 104971119225.00	Rp 19064289019.00	Rp 171097795076.00	Rp 255438900794.00	198.7
Kab. Sumedang	Rp 24718828080	Rp 71252834974.00	Rp 17238284565.00	Rp 113209947619.00	Rp 169408490000.00	120.6
Kab. Tasikmalaya	Rp 109476940476	Rp 374063623992.00	Rp 35815717293.00	Rp 519356281761.00	Rp 227458773000.00	102.8
Kota Bandung	Rp 73212065979	Rp 105201205094.00	Rp 17787575250.00	Rp 196200846323.00	-	107.6
Kota Bekasi	Rp 43014926555	Rp 57801029416.00	Rp 24341767067.00	Rp 125157723038.00	-	140
Kota Bogor					-	77.3
Kota Cirebon	Rp 70576747532	Rp 49934984125.00	Rp 10672332800.00	Rp 131184064457.00	-	30.2
Kota Depok	Rp 43923031944	Rp 63806134667.00	Rp 18041351011.00	Rp 125770517622.00	-	50.6
Kota Sukabumi	Rp 38705448916	Rp 35517705295.00	Rp 19410765220.00	Rp 93633919431.00	-	27.5
Kota Tasikmalaya	Rp 33989805600	Rp 53708531438.00	Rp 12348305700.00	Rp 100046642738.00	-	102.8
Kota Cimahi	Rp 6828619401	Rp 2342080769.00		Rp 9170700170.00	-	35.1
Kota Banjar	Rp 78752016911	Rp 18837140216.00	Rp 15351279793.00	Rp 112940436920.00	Rp 12641064000.00	12.7
Kab. Bandung Barat	Rp 33014662337	Rp 54806132012.00	Rp 32027961128.00	Rp 119848755477.00	Rp 119272926000.00	192.5
Kab. Pangandaran	Rp 45518961834	Rp 20174107907.00	Rp 18089717231.00	Rp 83782786972.00	Rp 61677411000.00	40.1

PROV. JAWA TENGAH	Rp 184414880000	Rp 612676043019.00	Rp 161284949888.00	Rp 958375872907.00	Rp .00	4506.89
Kab. Banjarnegara	Rp 47332700200	Rp 64359664999.00	Rp 4060182000.00	Rp 115752547199.00	Rp 167884303000.00	158.2
Kab. Banyumas	Rp 70767591397	Rp 76755716315.00	Rp 4815955503.00	Rp 152339263215.00	Rp 200450575000.00	283.9
Kab. Batang	Rp 27118106269	Rp 47349126847.00	Rp 16928836443.00	Rp 91396069559.00	Rp 149403922000.00	82.6
Kab. Blora	Rp 53166444460	Rp 70695031000	Rp 5550200000	Rp 129411675460.00	Rp 167873329000.00	113.9
Kab. Boyolali	Rp 46546119900	Rp 50300390864.00	Rp 10673076000.00	Rp 107519586764.00	Rp 162801074000.00	117
Kab. Brebes	Rp 50589412000	Rp 70701204000.00	Rp 11907551000.00	Rp 133198167000.00	Rp 212385910000.00	348
Kab. Cilacap	Rp 59168832358	Rp 91657214700.00	Rp 16362806000.00	Rp 167188853058.00	Rp 181985398000.00	240.2
Kab. Demak	Rp 154145944010	Rp 65209431495.00	Rp 16822972000.00	Rp 236178347505.00	Rp 165814611000.00	158.8
Kab. Grobogan	Rp 46052583213	Rp 110827681828.00	Rp 21618100571.00	Rp 178498365612.00	Rp 179971455000.00	184.1
Kab. Jepara	Rp 206828431000	Rp 82810491000	Rp 17185546000	Rp 306824468000.00	Rp 124699832000.00	100.3
Kab. Karanganyar	Rp 64493536748	Rp 62557540798.00	Rp 9141426074.00	Rp 136192503620.00	Rp 103686344000.00	107.7
Kab. Kebumen	Rp 283464521000	Rp 62647238000.00	Rp 9797357000.00	Rp 355909116000.00	Rp 282401546000.00	235.9
Kab. Kendal	Rp 52850126599	Rp 85792483098.00	Rp 17764522708.00	Rp 156407132405.00	Rp 166412671356.00	107.8
Kab. Klaten	Rp 212163728000	Rp 45103518500.00	Rp 16137051000.00	Rp 273404297500.00	Rp 243866425000.00	168
Kab. Kudus	Rp 52244312000	Rp 89607992000.00	Rp 11085118000.00	Rp 152937422000.00	Rp 81161215200.00	64.2
Kab. Magelang	Rp 52698986287	Rp 71221099361.00	Rp 13928357733.00	Rp 137848443381.00	Rp 226980301000.00	158.9
Kab. Pati	Rp 26755629757	Rp 62752389577.00	Rp 5557511000.00	Rp 95065530334.00	Rp 248952687000.00	144.2
Kab. Pekalongan	Rp 39661614129	Rp 49488215724.00	Rp 9959077138.00	Rp 99108906991.00	Rp 174527576000.00	113.3
Kab. Pemalang	Rp 34244744181	Rp 61662812500.00	Rp 4359195000.00	Rp 100266751681.00	Rp 149607350000.00	227.1
Kab. Purbalingga	Rp 49186979000	Rp 45486846000.00	Rp 9384323000.00	Rp 104058148000.00	Rp 149527020000.00	171.8
Kab. Purworejo	Rp 60055590249	Rp 57914787237.00	Rp 16950916618.00	Rp 134921294104.00	Rp 279101050000.00	99.1
Kab. Rembang	Rp 29402488908	Rp 46155570300.00	Rp 5176297800.00	Rp 80734357008.00	Rp 178863338000.00	115.5
Kab. Semarang	Rp 28977416175	Rp 50109985842.00	Rp 10552570000.00	Rp 89639972017.00	Rp 129797974000.00	80.7
Kab. Sragen	Rp 33897206000	Rp 63612495000.00	Rp 9005157000.00	Rp 106514858000.00	Rp 126080582000.00	126.8
Kab. Sukoharjo	Rp 36835218000	Rp 54735543000.00	Rp 16625010000.00	Rp 108195771000.00	Rp 96619355000.00	78.9
Kab. Tegal	Rp 34597300768	Rp 49927383060.00	Rp 19464681240.00	Rp 103989365068.00	Rp 183211736000.00	144.2
Kab. Temanggung	Rp 37052994729	Rp 61845741037.00	Rp 10879681920.00	Rp 109778417686.00	Rp 162495600000.00	87.1
Kab. Wonogiri	Rp 23756467345	Rp 82774520348.00	Rp 20885309165.00	Rp 127416296858.00	Rp 155565696000.00	124.8
Kab. Wonosobo	Rp 43923297685	Rp 68732937920.00	Rp 12990806900.00	Rp 125647042505.00	Rp 150053469000.00	160.1
Kota Magelang	Rp 31335142784	Rp 45143198988	Rp 4926212000	Rp 81404553772.00	Rp .00	10.6

Kota Pekalongan	Rp 35704925000	Rp 49853082000.00	Rp 8586717000.00	Rp 94144724000.00	Rp .00	23.6
Kota Salatiga	Rp 42584751300	Rp 43199463600.00	Rp 12203874000.00	Rp 97988088900.00	Rp .00	9.7
Kota Semarang	Rp 136147961708	Rp 192254178817	Rp 38016196275	Rp 366418336800.00	Rp .00	83.6
Kota Surakarta	Rp 56691164476	Rp 91484358622.00	Rp 6020006043.00	Rp 154195529141.00	Rp .00	55.9
Kota Tegal	Rp 42392871000	Rp 52628192000.00	Rp 11587435000.00	Rp 106608498000.00	Rp .00	20.3
PROV. D.I. YOGYAKARTA	Rp 121610779193	Rp 147456937852.00	Rp 53536632187.00	Rp 322604349232.00	Rp .00	494.94
Kab. Bantul	Rp 52567417001	Rp 63927293968.00	Rp 13085941050.00	Rp 129580652019.00	Rp 60601265000.00	142.76
Kab. Gunung Kidul	Rp 64797806944	Rp 53996827321.00	Rp 12377777941.00	Rp 131172412206.00	Rp 103567918000.00	139.15
Kab. Kulon Progo	Rp 38112738394	Rp 44444301765.00	Rp 3798873294.00	Rp 86355913453.00	Rp 60511729000.00	32.06
Kab. Sleman	Rp 62263154399	Rp 79169957330	Rp 16009637738	Rp 157442749467.00	Rp 63014717000.00	84.34
Kota Yogyakarta	Rp 35230092421	Rp 59824868865	Rp 23298186577	Rp 118353147863.00	-	96.63
PROV. JAWA TIMUR	Rp 281696081050	Rp 1256925641209	Rp 113019041320	Rp 1651640763579.00	-	4703.3
Kab. Bangkalan	Rp 16088094652	Rp 63945669332	Rp 15298293883	Rp 95332057867.00	Rp 177577145000.00	205.71
Kab. Banyuwangi				Rp .00	Rp 134144860100.00	140.45
Kab. Blitar	Rp 34789108950	Rp 69493491893.00	Rp 14987850850.00	Rp 119270451693.00	Rp 139375901000.00	113.51
Kab. Bojonegoro	Rp 38115738665	Rp 82647498346.00	Rp 19283139350.00	Rp 140046376361.00	Rp 261505396000.00	180.99
Kab. Bondowoso	Rp 21391848900	Rp 58815826247.00	Rp 10736396200.00	Rp 90944071347.00	Rp 136213107000.00	114.63
Kab. Gresik	Rp 11722322526	Rp 7021225818.00	Rp 1396987846.00	Rp 20140536190.00	Rp 205756291000.00	167.12
Kab. Jember	Rp 66652100685	Rp 88892524115.00	Rp 21529195231.00	Rp 177073820031.00	Rp 160346922000.00	265.1
Kab. Jombang	Rp 97476647561	Rp 63234244139.00	Rp 10145104289.00	Rp 170855995989.00	Rp 191745815000.00	133.32
Kab. Kediri	Rp 17594086025	Rp 55462991369.00	Rp 14477422150.00	Rp 87534499544.00	Rp 218640097000.00	197.43
Kab. Lamongan	Rp 29279941359	Rp 70286626550.00	Rp 15513525450.00	Rp 115080093359.00	Rp 285086014000.00	176.92
Kab. Lumajang	Rp 116148551599	Rp 69736866496.00	Rp 8457271339.00	Rp 194342689434.00	Rp 129202929000.00	115.91
Kab. Madiun	Rp 26077294669	Rp 47289068786.00	Rp 12779564840.00	Rp 86145928295.00	Rp 124069024000.00	85.97
Kab. Magetan	Rp 21476327180	Rp 62102165021.00	Rp 8992647400.00	Rp 92571139601.00	Rp 127243618000.00	69.24
Kab. Malang	Rp 14534255397	Rp 88737604179.00	Rp 14887332783.00	Rp 118159192359.00	Rp 245547356000.00	293.74
Kab. Mojokerto	Rp 59707604027	Rp 52949760462.00	Rp 9556657550.00	Rp 122214022039.00	Rp 184606165000.00	115.38
Kab. Nganjuk	Rp 49113898152	Rp 46964854650.00	Rp 14279792644.00	Rp 110358545446.00	Rp 168844255000.00	127.9
Kab. Ngawi	Rp 23864979201	Rp 81355323437	Rp 15672180652	Rp 120892483290.00	Rp 139073307000.00	126.65
Kab. Pacitan	Rp 29922371897	Rp 50095362317.00	Rp 7903272654.00	Rp 87921006868.00	Rp 104921170000.00	85.53
Kab. Pamekasan				Rp .00	Rp 121293498000.00	142.32

Kab. Pasuruan	Rp 66140793318	Rp 142892488016.00	Rp 16192242293.00	Rp 225225523627.00	Rp 215692362000.00	168.06
Kab. Ponorogo	Rp 18103763491	Rp 50475970062.00	Rp 7111610962.00	Rp 75691344515.00	Rp 176898233000.00	102.06
Kab. Probolinggo	Rp 54018347771	Rp 100299654000.00	Rp 22573128000.00	Rp 176891129771.00	Rp 212735793000.00	240.47
Kab. Sampang	Rp 60782811621	Rp 64722489980.00	Rp 29911582864.00	Rp 155416884465.00	Rp 131129306000.00	227.8
Kab. Sidoarjo	Rp 58868305938	Rp 118349772116.00	Rp 29522810737.00	Rp 206740888791.00	Rp 204119046975.00	136.79
Kab. Situbondo	Rp 41235482620	Rp 83095223522.00	Rp 12978752118.00	Rp 137309458260.00	Rp 87460278000.00	89.68
Kab. Sumenep	Rp 25808467432	Rp 85476469551	Rp 8001703896	Rp 119286640879.00	Rp 212948150000.00	216.14
Kab. Trenggalek	Rp 50531351448	Rp 68000271161.00	Rp 4748850176.00	Rp 123280472785.00	Rp 98943538000.00	91.49
Kab. Tuban	Rp 75232997366	Rp 97997974497.00	Rp 12193590361.00	Rp 185424562224.00	Rp 197768399000.00	198.35
Kab. Tulungagung	Rp 21916581190	Rp 69573846400.00	Rp 25090746000.00	Rp 116581173590.00	Rp 159404476000.00	84.35
Kota Blitar	Rp 53763138929	Rp 49354424102.00	Rp 12186043663.00	Rp 115303606694.00	-	9.97
Kota Kediri	Rp 89257432342	Rp 139155637918.00	Rp 10564085850.00	Rp 238977156110.00	-	23.64
Kota Madiun	Rp 71706675150	Rp 44074423000.00	Rp 12339771000.00	Rp 128120869150.00	-	9.05
Kota Malang	Rp 60237034679	Rp 78903513269.00	Rp 24054819339.00	Rp 163195367287.00	-	37.03
Kota Mojokerto	Rp 44329129573	Rp 40269470632.00	Rp 12534143000.00	Rp 97132743205.00	-	7.24
Kota Pasuruan	Rp 48874874862	Rp 192337923720.00	Rp 50451372644.00	Rp 291664171226.00	-	14.93
Kota Probolinggo	Rp 67611707307	Rp 68353545757.00	Rp 20595837409.00	Rp 156561090473.00	-	18.37
Kota Surabaya	Rp 18209036645	Rp 57367273801.00	Rp 6349269976.00	Rp 81925580422.00	-	161.01
Kota Batu	Rp 18498180797	Rp 36531521087	Rp 15227189098	Rp 70256890982.00	-	9.05
PROV. BANTEN	Rp 201755030169	Rp 346743101285.00	Rp 66386314998.00	Rp 614884446452.00	-	
Kab. Lebak	Rp 43388986915	Rp 93522074141.00	Rp 14128960129.00	Rp 151040021185.00	Rp 215365005000.00	
Kab. Pandeglang	Rp 42697286834	Rp 77224590555.00	Rp 22158327003.00	Rp 142080204392.00	Rp 205556472000.00	
Kab. Serang	Rp 68309202775	Rp 96479152331.00	Rp 16576696357.00	Rp 181365051463.00	Rp 201403466730.00	
Kab. Tangerang	Rp 595000000	Rp 288920000	Rp 100000000	Rp 983920000.00	Rp 168759814000.00	
Kota Cilegon	Rp 74908628154	Rp 76634504702.00	Rp 18794325372.00	Rp 170337458228.00	-	
Kota Serang	Rp 88826212211	Rp 92427935334	Rp 24902368214	Rp 206156515759.00	-	
Kota Tangerang	Rp 63470104978	Rp 57536640824.00	Rp 18719513073.00	Rp 139726258875.00	-	
Kota Tangerang Selatan	Rp 101744764917	Rp 93543862411.00	Rp 50866394802.00	Rp 246155022130.00	-	

Lampiran 3. Data Penelitian Tahun 2017

Wilayah	Fungsi Pendidikan	Fungsi Ekonomi	Fungsi Perlindungan Sosial	Dana Desa	Jml Masy. Miskin (Ribu Jiwa)
PROV. JAWA BARAT	Rp	Rp	Rp	-	4168.4
Kab. Bandung	Rp 1145153510252	Rp 113018216938.00	Rp 13705909940.00	Rp 249414249000.00	268
Kab. Bekasi	Rp	Rp	Rp	Rp 170420113000.00	164
Kab. Bogor	Rp 1941022970182	Rp 398947514186.00	Rp 65944267577.00	Rp 371999169989.00	487.3
Kab. Ciamis	Rp 876410462495	Rp 99374445442.00	Rp 15034444256.00	Rp 213818690000.00	96.8
Kab. Cianjur	Rp 1202940137627	Rp 132574430716.00	Rp 11833411519.00	Rp 307296048000.00	257.4
Kab. Cirebon	Rp 1189195877365	Rp 186921409334.00	Rp 67250609333.00	Rp 360496820000.00	279.6
Kab. Garut	Rp 1369314332753	Rp 176432399955	Rp 14321107469	Rp 357737882800.00	291.2
Kab. Indramayu	Rp	Rp	Rp	Rp 267773197000.00	233.4
Kab. Karawang	Rp 1061026907929	Rp 235779843808.00	Rp 44921363575.00	Rp 254981617000.00	236.8
Kab. Kuningan	Rp 952697626953	Rp 162807523236	Rp 23284489907	Rp 287105211000.00	141.6
Kab. Majalengka	Rp 143058187809	Rp 21893662683	Rp 7749539634	Rp 267111836900.00	150.3
Kab. Purwakarta	Rp 1204338658130	Rp 180700595674.00	Rp 40458861974.00	Rp 148631839000.00	85.3
Kab. Subang	Rp 40519593477	Rp 22357549922.00	Rp 6961901512.00	Rp 209208368000.00	167.8
Kab. Sukabumi	Rp 158382093506	Rp 42615846681.00	Rp 4641761880.00	Rp 326248508031.00	197.1
Kab. Sumedang	Rp 995183173731	Rp 147790901268.00	Rp 16307521277.00	Rp 217268983000.00	120.6
Kab. Tasikmalaya	Rp 1214531296493	Rp 285187904364.00	Rp 34992871331.00	Rp 290146517000.00	97.9
Kota Bandung	Rp 1811852137583	Rp 593304909769.00	Rp 82358150567.00	-	104
Kota Bekasi	Rp 1493035033849	Rp 155058573389.00	Rp 33586011364.00	-	136
Kota Bogor	Rp 599242853358	Rp 94196998731.00	Rp 23812370439.00	-	76.5
Kota Cirebon	Rp 389712820771	Rp 108227793403.00	Rp 12405345426.00	-	30.2
Kota Depok	Rp 780444538198	Rp 138475716579.00	Rp 31596745837.00	-	52.3
Kota Sukabumi	Rp 38055372358	Rp 5039123857.00	Rp 1848754872.00	-	27.4
Kota Tasikmalaya	Rp 608599874594	Rp 112093056784.00	Rp 15513198874.00	-	97.9
Kota Cimahi	Rp 376782399081	Rp 94849021362.00	Rp 7439262378.00	-	34.5
Kota Banjar	Rp 10138979821	Rp 2188196468.00	Rp 1054941922.00	Rp 16396425773.00	12.9
Kab. Bandung Barat	Rp 154206428264	Rp 44710834611.00	Rp 6078397024.00	Rp 152336279000.00	190.9
Kab. Pangandaran	Rp 348579742686	Rp 33308045570.00	Rp 15444544825.00	Rp 78242441000.00	39.5

PROV. JAWA TENGAH	Rp 63866768543	Rp 127287395240.00	Rp 27358065972.00	Rp .00	4450.72
Kab. Banjarnegara	Rp 1416880218982	Rp 212053575156.00	Rp 21613687258.00	Rp 214470940000.00	156.8
Kab. Banyumas	Rp	Rp .00	Rp .00	Rp 255734553000.00	283.2
Kab. Batang	Rp 505999695887	Rp 142703465978.00	Rp 17289798885.00	Rp 190962224000.00	81.5
Kab. Blora	Rp 698827447915	Rp 134403442322	Rp 8606153857	Rp 214102024000.00	111.9
Kab. Boyolali	Rp 180409054686	Rp 28698712560.00	Rp 6289679815.00	Rp 207823645000.00	116.4
Kab. Brebes	Rp 914141399267	Rp 147380370262.00	Rp 14094854000.00	Rp 270922338000.00	343.5
Kab. Cilacap	Rp 1102472316563	Rp 243436243071.00	Rp 23902684549.00	Rp 232084054000.00	238.3
Kab. Demak	Rp 613340709034	Rp 139298407914.00	Rp 18061979711.00	Rp 211595493000.00	152.6
Kab. Grobogan	Rp 729528274694	Rp 179959361496.00	Rp 28315995833.00	Rp 229625434000.00	181
Kab. Jepara	Rp 466949441367	Rp 108575825374	Rp 11258831208	Rp 158765096000.00	99
Kab. Karanganyar	Rp 129135845331	Rp 36639172388.00	Rp 3641397982.00	Rp 133065748000.00	106.8
Kab. Kebumen	Rp 167359892347	Rp 34154370799.00	Rp 3597812073.00	Rp 359739251800.00	233.4
Kab. Kendal	Rp 695793369106	Rp 132777583603.00	Rp 23104951411.00	Rp 212767017465.00	106.1
Kab. Klaten	Rp 1011690040754	Rp 86434594879.00	Rp 23351236356.00	Rp 311087446200.00	165
Kab. Kudus	Rp 646897817359	Rp 277071706881.00	Rp 13110848172.00	Rp 103687281000.00	64.4
Kab. Magelang	Rp 735547046898	Rp 140271361630.00	Rp 18141866911.00	Rp 289613899000.00	157.2
Kab. Pati	Rp 855367036080	Rp 170058194791.00	Rp 21087176614.00	Rp 317453410000.00	141.7
Kab. Pekalongan	Rp 554303646573	Rp 76917029446.00	Rp 14009097449.00	Rp 222535590000.00	111.6
Kab. Pemalang	Rp 815911807837	Rp 149216639030.00	Rp 14292354118.00	Rp 191002083000.00	225
Kab. Purbalingga	Rp 635052014640	Rp 130332826413.00	Rp 17754066302.00	Rp 191224910000.00	171.9
Kab. Purworejo	Rp 684773220593	Rp 77827192077.00	Rp 24723357967.00	Rp 355968663000.00	98.6
Kab. Rembang	Rp 123614626493	Rp 52886147370.00	Rp 2527507622.00	Rp 228013715000.00	115.2
Kab. Semarang	Rp 686210573781	Rp 136290367705.00	Rp 18701153140.00	Rp 165688573000.00	79.7
Kab. Sragen	Rp 762821252299	Rp 133108750327.00	Rp 12769475457.00	Rp 160952188596.00	124
Kab. Sukoharjo	Rp 724286923843	Rp 95112710589.00	Rp 22924753936.00	Rp 123576433000.00	76.7
Kab. Tegal	Rp 112839323847	Rp 14832905177.00	Rp 2422191185.00	Rp 234026299000.00	141.8
Kab. Temanggung	Rp 17349049752	Rp 5322215854.00	Rp 1212042069.00	Rp 207451723000.00	86.8
Kab. Wonogiri	Rp 617340083464	Rp 65998831377.00	Rp 13369202168.00	Rp 198745821000.00	123
Kab. Wonosobo	Rp 585811348136	Rp 65405547538.00	Rp 8258573363.00	Rp 191496626000.00	159.2
Kota Magelang	Rp 44693937111	Rp 15322951310	Rp 2346776952	Rp .00	10.6

Kota Pekalongan	Rp 243238077344	Rp 76353460520.00	Rp 17106980825.00	Rp .00	22.5
Kota Salatiga	Rp 217151437090	Rp 53174109219.00	Rp 17442558612.00	Rp .00	9.6
Kota Semarang	Rp 1068293079087	Rp 554691536180	Rp 70907951272	Rp .00	80.9
Kota Surakarta	Rp 666857864671	Rp 167582506984.00	Rp 17394451686.00	Rp .00	54.9
Kota Tegal	Rp 304702885621	Rp 64397348578.00	Rp 11951387369.00	Rp .00	20.1
PROV. D.I. YOGYAKARTA	Rp 355999483223	Rp 363624768512.00	Rp 71464913068.00	Rp .00	488.53
Kab. Bantul	Rp 796358850109	Rp 106207284676.00	Rp 14108844393.00	Rp 77730491000.00	139.67
Kab. Gunung Kidul	Rp 30345348862	Rp 3919529293.00	Rp 865703969.00	Rp 132353781000.00	135.74
Kab. Kulon Progo	Rp 517662242112	Rp 99654006876.00	Rp 7966047189.00	Rp 77627477000.00	32.2
Kab. Sleman	Rp 782647963673	Rp 301224673829	Rp 11684457651	Rp 80855810000.00	84.17
Kota Yogyakarta	Rp 589906359365	Rp 91875946301	Rp 26486067741	-	96.75
PROV. JAWA TIMUR	Rp 251204341996	Rp 1910974076518	Rp 99380091237	-	4617.01
Kab. Bangkalan	Rp	Rp	Rp	Rp 226569736000.00	206.53
Kab. Banyuwangi	Rp 1103380440421	Rp 197144136678.30	Rp 25813287112.00	Rp 172183366000.00	138.54
Kab. Blitar	Rp 874569802834	Rp 99168958178.00	Rp 26494190853.00	Rp 178027258000.00	112.93
Kab. Bojonegoro	Rp 55966053797	Rp 9870036802.00	Rp 1811480639.00	Rp 332980300000.00	178.25
Kab. Bondowoso	Rp 690216276822	Rp 120378485343.00	Rp 13688613756.00	Rp 173908433000.00	111.66
Kab. Gresik	Rp 672381139497	Rp 116653625072.01	Rp 25073453660.00	Rp 262070980000.00	164.08
Kab. Jember	Rp 212900880061	Rp 40292036198.00	Rp 5273530272.00	Rp 204705147544.00	266.9
Kab. Jombang	Rp 793789867994	Rp 128960428950.00	Rp 12248531440.00	Rp 244245612655.00	131.16
Kab. Kediri	Rp 626668454071	Rp 51331239176.00	Rp 12046564788.00	Rp 278633039000.00	191.08
Kab. Lamongan	Rp 114479865304	Rp 13498385062.00	Rp 2664253172.00	Rp 363423524000.00	171.38
Kab. Lumajang	Rp 75204860100	Rp 30806934082.00	Rp 9228403552.00	Rp 165136155000.00	112.65
Kab. Madiun	Rp 98510593624	Rp 15944981057.00	Rp 4411713323.00	Rp 158196526000.00	83.43
Kab. Magetan	Rp 90651518323	Rp 27123208077.00	Rp 1538414677.00	Rp 162234334000.00	65.87
Kab. Malang	Rp 1146385169736	Rp 161478507974.00	Rp 16361777174.00	Rp 312979737000.00	283.96
Kab. Mojokerto	Rp 689683060410	Rp 110665080616.00	Rp 10325784848.00	Rp 234108329400.00	111.79
Kab. Nganjuk	Rp 851397224974	Rp 59176929747.00	Rp 17594108046.00	Rp 215210307000.00	125.52
Kab. Ngawi	-	-	Rp	Rp 177370619000.00	123.76
Kab. Pacitan	Rp 329987289280	Rp 73154416189.00	Rp 19558360928.00	Rp 134532774000.00	85.26
Kab. Pamekasan	Rp 623525412065	Rp 87321261792.00	Rp 23662548268.00	Rp 153983324376.00	137.77

Kab. Pasuruan	Rp 865068872012	Rp 242367561064.00	Rp 14279250541.00	Rp 275262239000.00	165.64
Kab. Ponorogo	Rp 104717820714	Rp 17443957163.00	Rp 2197101168.00	Rp 225521779000.00	99.03
Kab. Probolinggo	Rp 635666442674	Rp 135123989525.00	Rp 24025562969.00	Rp 271486142000.00	236.72
Kab. Sampang	Rp 515335510363	Rp 121400319870.00	Rp 27098402526.00	Rp 167492597000.00	225.13
Kab. Sidoarjo	Rp 1078234942323	Rp 178140285575.36	Rp 33430901119.00	Rp 260720391016.00	135.42
Kab. Situbondo	Rp 548033779878	Rp 137762668713.00	Rp 11499272430.00	Rp 111434587000.00	88.23
Kab. Sumenep	Rp 614798029759	Rp 173950898629	Rp 17577682092	Rp 271522438855.00	211.92
Kab. Trenggalek	Rp 657929719273	Rp 104135919228.00	Rp 11533914796.00	Rp 126272713000.00	89.77
Kab. Tuban	Rp 747917176027	Rp 137905290177.33	Rp 15415012218.00	Rp 252388557000.00	196.1
Kab. Tulungagung	Rp 881157826533	Rp 123439361494.00	Rp 25073573060.00	Rp 203074565000.00	82.8
Kota Blitar	Rp 247109851003	Rp 72666283885.00	Rp 26639251763.00	-	11.22
Kota Kediri	Rp 61278451405	Rp 33681626398.00	Rp 3528448595.00	-	24.07
Kota Madiun	Rp 384551655560	Rp 88313947678.00	Rp 6799416602.00	-	8.7
Kota Malang	Rp 640414024200	Rp 138162898687.21	Rp 49494832541.00	-	35.88
Kota Mojokerto	Rp 38107042134	Rp 9660775958.00	Rp 3052662368.00	-	7.28
Kota Pasuruan	Rp 194986029534	Rp 65048200701.00	Rp 16359901846.00	-	14.85
Kota Probolinggo	Rp 211931162684	Rp 60654827760.00	Rp 16547568365.00	-	18.23
Kota Surabaya	Rp 1889031009376	Rp 344714667935.00	Rp 215759523012.00	-	154.71
Kota Batu	Rp 208142603191	Rp 67284795902	Rp 20547526589	Rp 18852611000.00	8.77
PROV. BANTEN	Rp 408475826186	Rp 462330972882.00	Rp 106122680429.00	-	
Kab. Lebak	Rp 718711576788	Rp 97179588226.00	Rp 12509030444.00	Rp 274521585700.00	
Kab. Pandeglang	Rp 120737060412	Rp 18100289407.00	Rp 2249239277.00	Rp 262147548000.00	
Kab. Serang	Rp 142819329240	Rp 49219115616.00	Rp 7066007916.00	Rp 256262680475.00	
Kab. Tangerang	Rp 1199401823367	Rp 138786642861	Rp 37927611591	Rp 215671732000.00	
Kota Cilegon	Rp 411912661969	Rp 96826258142.00	Rp 32204770533.00	-	
Kota Serang	Rp 170476326631	Rp 62312730214	Rp 21022830403	-	
Kota Tangerang	Rp 479840633232	Rp 67378567066.00	Rp 11420040411.00	-	
Kota Tangerang Selatan	-	-	-	-	

Lampiran 4. Data Penelitian Tahun 2018

Wilayah	Fungsi Pendidikan	Fungsi Ekonomi	Fungsi Perlindungan Sosial	Dana Desa	Jml Masy. Miskin (Ribuan Jiwa)
PROV. JAWA BARAT	Rp 7979213931850	Rp 1002129989052	Rp 166345501298	-	3615.8
Kab. Bandung	Rp 2007155964017	Rp 268473612587.00	Rp 69864911421.00	Rp 259468420000.00	246.1
Kab. Bekasi	Rp 1622496154552	Rp 409846445816.00	Rp 50001523201.00	Rp 196713680000.00	157.2
Kab. Bogor	Rp 2273954864173	Rp 343903054350.00	Rp 67112152709.00	Rp 402068048852.00	415
Kab. Ciamis	Rp 963078272519	Rp 96074522297.00	Rp 13653299681.00	Rp 217285506000.00	85.7
Kab. Cianjur	Rp 1354169989785	Rp 104136266933.00	Rp 16190262802.00	Rp 346452870400.00	221.6
Kab. Cirebon	Rp 1363307600641	Rp 187792522909.00	Rp 36949298082.00	Rp 370242221000.00	232.4
Kab. Garut	Rp 1731783632525	Rp 92554919888	Rp 6711256135	Rp 393536092000.00	241.3
Kab. Indramayu	Rp 1050379413699	Rp 151910464206.00	Rp 18223202166.00	Rp 310922174000.00	204.2
Kab. Karawang	Rp 1244800122222	Rp 181890055821.00	Rp 53286794518.00	Rp 280948448400.00	188
Kab. Kuningan	Rp 993340302486	Rp 156025260969	Rp 38326091574	Rp 262301673000.00	131.2
Kab. Majalengka	Rp 1243283994285	Rp 86500015872	Rp 21165738332	Rp 312485897000.00	129.3
Kab. Purwakarta	Rp 730752926702	Rp 77913543571.00	Rp 18438979154.00	Rp 141719243083.00	75.9
Kab. Subang	Rp 1114292053598	Rp 123877883283.00	Rp 19175024891.00	Rp 185339855150.00	136.6
Kab. Sukabumi	Rp 1209225972830	Rp 175182146889.00	Rp 61646180378.00	Rp 300895124977.00	166.3
Kab. Sumedang	Rp 985729064433	Rp 127523444655.00	Rp 14100161833.00	Rp 192462067600.00	112.1
Kab. Tasikmalaya	Rp 1309223404068	Rp 286848958279.00	Rp 27258216159.00	Rp 322586652000.00	84.2
Kota Bandung	Rp 1343720504482	Rp 489388523815.00	Rp 107576002619.00	-	89.4
Kota Bekasi	Rp 1536694103918	Rp 382365800055.00	Rp 69751838357.00	-	119.8
Kota Bogor	Rp 560715769971	Rp 93516065091.00	Rp 33205907256.00	-	64.9
Kota Cirebon	Rp 368080396403	Rp 82822748303.00	Rp 13695569580.00	-	28
Kota Depok	Rp 842625204774	Rp 150337282661.00	Rp 53364972952.00	-	49.4
Kota Sukabumi	Rp 255943678273	Rp 79659211818.00	Rp 11283628334.00	-	23.2
Kota Tasikmalaya	Rp 539908956365	Rp 115728279459.00	Rp 16684789448.00	-	84.2
Kota Cimahi	Rp 361161228233	Rp 38657702953.00	Rp 10648646639.00	-	29.9
Kota Banjar	Rp 152619443768	Rp 26325795348.00	Rp 17537859833.00	Rp 17291312000.00	10.4
Kab. Bandung Barat	Rp 997025515678	Rp 149873784092.00	Rp 37752117780.27	Rp 198291361000.00	169
Kab. Pangandaran	Rp 377910537097	Rp 43021988386.00	Rp 7718591432.00	Rp 76670519000.00	32.2

PROV. JAWA TENGAH	Rp 5203799968923	Rp 952658147420.00	Rp 216685392472.00	Rp .00	3897.2
Kab. Banjarnegara	Rp 756508828017	Rp 77301197990.00	Rp 15733357651.00	Rp 222775782000.00	141.7
Kab. Banyumas	Rp 1123975611189	Rp 113910158123.00	Rp 39803210307.00	Rp 295876047000.00	226.2
Kab. Batang	Rp 492237135158	Rp 81434214383.00	Rp 26404862314.00	Rp 168403538000.00	66.1
Kab. Blora	Rp 712440083014	Rp 110071168721	Rp 15616713668	Rp 229733837000.00	102.5
Kab. Boyolali	Rp 750223105531	Rp 152230969108.00	Rp 15375715341.00	Rp 192998474000.00	98.2
Kab. Brebes	Rp 794168559621	Rp 93934646000.00	Rp 23270001814.00	Rp 344197496000.00	309.2
Kab. Cilacap	Rp 1094741502406	Rp 185186315248.00	Rp 21887914395.00	Rp 240787259000.00	193.2
Kab. Demak	Rp 640779538279	Rp 126760069545.00	Rp 21196938715.00	Rp 229565688000.00	144.1
Kab. Grobogan	Rp 817938412726	Rp 141464374796.00	Rp 29316670467.00	Rp 248195231000.00	168.7
Kab. Jepara	Rp 754791642839	Rp 387283335398	Rp 31571022843	Rp 190273424000.00	86.5
Kab. Karanganyar	Rp 763394721559	Rp 96076706512.00	Rp 25865171143.00	Rp 138839437000.00	87.8
Kab. Kebumen	Rp 1036769005180	Rp 117218932167.00	Rp 28260409560.00	Rp 350023637000.00	208.7
Kab. Kendal	Rp 733519630014	Rp 151940681930.00	Rp 16141218229.00	Rp 215090043000.00	94.7
Kab. Klaten	Rp 875779020635	Rp 119358970979.00	Rp 26325181732.00	Rp 320940593000.00	151.7
Kab. Kudus	Rp 684773115555	Rp 215960066062.00	Rp 21053048119.00	Rp 117344518400.00	60
Kab. Magelang	Rp 838470904641	Rp 135609057785.00	Rp 32364730452.00	Rp 325360832000.00	143.4
Kab. Pati	Rp 853715549304	Rp 129908978975.00	Rp 21507948299.00	Rp 365454541000.00	123.9
Kab. Pekalongan	Rp 692710772141	Rp 71971076375.00	Rp 18268348439.00	Rp 227517071400.00	89.5
Kab. Pemasang	Rp 907817242901	Rp 111260488029.00	Rp 24376642912.00	Rp 249322556000.00	208.3
Kab. Purbalingga	Rp 701608235478	Rp 122735111962.00	Rp 27907158155.00	Rp 199934262000.00	144.2
Kab. Purworejo	Rp 666102732684	Rp 111577168330.00	Rp 30063875457.00	Rp 325017443600.00	83.5
Kab. Rembang	Rp 542307603576	Rp 108342343274.00	Rp 19990647420.00	Rp 229010130000.00	97.4
Kab. Semarang	Rp 701916802914	Rp 457601896824.92	Rp 21194988844.00	Rp 157084768000.00	75.7
Kab. Sragen	Rp 770050773762	Rp 88446634768.00	Rp 14505026071.00	Rp 146148323000.00	116.4
Kab. Sukoharjo	Rp 683062818050	Rp 86836109127.00	Rp 60655967382.00	Rp 126076256000.00	65.4
Kab. Tegal	Rp 431648273612	Rp 59252308978.00	Rp 15856873500.00	Rp 282703162997.00	114.1
Kab. Temanggung	Rp 550725033972	Rp 80633541781.00	Rp 24694103638.00	Rp 213042611000.00	75.4
Kab. Wonogiri	Rp 908853082525	Rp 158396049393.00	Rp 14592502467.00	Rp 196188133000.00	102.8
Kab. Wonosobo	Rp 600407104169	Rp 71896838879.00	Rp 15494722408.00	Rp 184414648000.00	138.3
Kota Magelang	Rp 214336017557	Rp 72511169706	Rp 11045549539	Rp .00	9.6

Kota Pekalongan	Rp 259186879282	Rp 71307700507.00	Rp 17236548099.00	Rp .00	20.5
Kota Salatiga	Rp 203396946188	Rp 93804657809.00	Rp 11412609402.00	Rp .00	9.2
Kota Semarang	Rp 1096894702931	Rp 346490722905	Rp 49332735155	Rp .00	73.6
Kota Surakarta	Rp 578899005732	Rp 134040107549.00	Rp 30807680776.00	Rp .00	47
Kota Tegal	Rp 267908527479	Rp 62356323175.00	Rp 11654998199.00	Rp .00	19.4
PROV. D.I. YOGYAKARTA	Rp 1461431757060	Rp 292615656806.00	Rp 57336373504.00	Rp .00	460.1
Kab. Bantul	Rp 728531954257	Rp 419052670603.69	Rp 7824238220.00	Rp 79076105000.00	134.84
Kab. Gunung Kidul	Rp 682833488499	Rp 85949281781.00	Rp 22583168045.00	Rp 117574520000.00	125.76
Kab. Kulon Progo	Rp 475555964732	Rp 109361168220.08	Rp 12577167865.92	Rp 76680810000.00	29.75
Kab. Sleman	Rp 1986846822	-	Rp	Rp 81187698000.00	77.72
Kota Yogyakarta	Rp 496692083255	Rp 174132872729	Rp 24896676934	-	92.04
PROV. JAWA TIMUR	Rp 9894461026595	Rp 2596585224984	Rp 225261483274	-	4332.59
Kab. Bangkalan	Rp 646763131607	Rp 116297765692	Rp 14494890148	Rp 270643937000.00	191.33
Kab. Banyuwangi	Rp 900516587243	Rp 192500284404.76	Rp 20738483422.00	Rp 167707412850.00	125.5
Kab. Blitar	Rp 865960956398	Rp 103581868826.00	Rp 26710813122.00	Rp 163105009000.00	112.4
Kab. Bojonegoro	Rp 811825927953	Rp 84239744792.00	Rp 25706562211.00	Rp 316364467000.00	163.94
Kab. Bondowoso	Rp 573660579218	Rp 107029243453.00	Rp 23060096010.00	Rp 197149839000.00	110.98
Kab. Gresik	Rp 780122750185	Rp 97645538393.00	Rp 17764869083.00	Rp 246902275000.00	154.02
Kab. Jember	Rp 1351944972907	Rp 167285550004.14	Rp 46005937252.00	Rp 235267846549.00	243.42
Kab. Jombang	Rp 770221570719	Rp 116037925847.48	Rp 21554737838.00	Rp 238440974712.00	120.19
Kab. Kediri	Rp 935815496134	Rp 84236136572.04	Rp 18204897604.00	Rp 270691907000.00	177.2
Kab. Lamongan	Rp 878529264594	Rp 126275707663.00	Rp 17070534211.00	Rp 321349755000.00	164
Kab. Lumajang	Rp 484911689916	Rp 89158354776.00	Rp 9984712222.00	Rp 163206258000.00	103.69
Kab. Madiun	Rp 624723928765	Rp 71777209787.00	Rp 25019814547.00	Rp 142156308000.00	77.75
Kab. Magetan	Rp 640477786753	Rp 75097652492.00	Rp 10828955907.00	Rp 147948351000.00	64.86
Kab. Malang	Rp 1261668182875	Rp 148061426484.65	Rp 25326990776.00	Rp 314215308000.00	268.49
Kab. Mojokerto	Rp 686584985295	Rp 117011766820.00	Rp 12285274889.00	Rp 203605688600.00	111.55
Kab. Nganjuk	Rp 802507816658	Rp 79662860756.16	Rp 12339542735.00	Rp 235353700000.00	127.28
Kab. Ngawi	Rp 624888844891	Rp 87979451241	Rp 11933585736	Rp 167815849000.00	123.09
Kab. Pacitan	Rp 535093318061	Rp 79883858376.00	Rp 9376482122.00	Rp 125652536000.00	78.64
Kab. Pamekasan	Rp 612015594051	Rp 61201505923.00	Rp 22254609046.00	Rp 162014284400.00	125.76

Kab. Pasuruan	Rp 889892142607	Rp 177564338233.70	Rp 26895073027.00	Rp 301027884400.00	152.48
Kab. Ponorogo	Rp 733197692581	Rp 120231994440.00	Rp 24908254617.00	Rp 216613335000.00	90.22
Kab. Probolinggo	Rp 656646492058	Rp 140390499224.00	Rp 46981216266.00	Rp 322100877987.00	217.06
Kab. Sampang	Rp 535087944134	Rp 83900659281.00	Rp 15480712982.00	Rp 179206635000.00	204.82
Kab. Sidoarjo	Rp 1349514052912	Rp 157030778014.00	Rp 23705623658.00	Rp 247400305606.00	125.75
Kab. Situbondo	Rp 549567958684	Rp 106256053749.00	Rp 18614481630.01	Rp 115130381000.00	80.27
Kab. Sumenep	Rp 647993749291	-	Rp	Rp 278366376000.00	218.6
Kab. Trenggalek	Rp 628402837118	Rp 95817050957.00	Rp 15068291836.00	Rp 127606280000.00	83.5
Kab. Tuban	Rp 895715528820	Rp 129559799329.00	Rp 18212482735.00	Rp 226950413000.00	178.64
Kab. Tulungagung	Rp 921414308120	Rp 131240948892.00	Rp 25726410210.00	Rp 205952328000.00	75.23
Kota Blitar	Rp 222579272387	Rp 52954784452.50	Rp 32641965262.00	-	10.47
Kota Kediri	Rp 309620123806	Rp 158744532224.00	Rp 27695723578.00	-	21.9
Kota Madiun	Rp 290934144164	Rp 64101673279.98	Rp 25261295654.00	-	7.92
Kota Malang	Rp 617889336593	Rp 86276278981.74	Rp 52194447963.25	-	35.49
Kota Mojokerto	Rp 153553031637	Rp 47270585392.00	Rp 37232461656.00	-	7.04
Kota Pasuruan	Rp 193063667990	Rp 72164340815.00	Rp 17669025785.00	-	13.45
Kota Probolinggo	Rp 217808614478	Rp 57458573581.74	Rp 24083827636.00	-	16.9
Kota Surabaya	Rp 1966834778258	Rp 366684395007.00	Rp 205442910575.00	-	140.81
Kota Batu	Rp 223841543517	Rp 60485083784	Rp 17762724317	Rp 21347494000.00	7.98
PROV. BANTEN	Rp 3329905016767	Rp 410398537578.00	Rp 85055091994.00	-	
Kab. Lebak	Rp 926365398453	Rp 115930810129.00	Rp 15083826024.00	Rp 239378424400.00	
Kab. Pandeglang	Rp 993605494891	Rp 102259433154.00	Rp 15571616551.00	Rp 231185206000.00	
Kab. Serang	Rp 958170667846	Rp 141985020435.00	Rp 24894104414.00	Rp 226934084800.00	
Kab. Tangerang	Rp 1464760229936	Rp 159875382825	Rp 43054939514	Rp 240890904216.00	
Kota Cilegon	Rp 486825002263	Rp 98763429003.00	Rp 40985226293.00	-	
Kota Serang	Rp 1084751438679	Rp 805654726435	Rp 75684755384	-	
Kota Tangerang	Rp 467741891463	Rp 76418722045.00	Rp 26659253384.00	-	
Kota Tangerang Selatan	Rp 570157722470	Rp 92851359055	Rp 27479247329	-	

Lampiran 5. Data Penelitian Tahun 2019

Wilayah	Fungsi Pendidikan	Fungsi Ekonomi	Fungsi Perlindungan Sosial	Dana Desa	Jml Masy. Miskin (Ribu Jiwa)
PROV. JAWA BARAT	Rp 13429466749281	Rp 1100466735699	Rp 159588395695	-	3399.2
Kab. Bandung	Rp 1977157085294	Rp 275046811001.00	Rp 58089790854.00	Rp 311070693000.00	223.2
Kab. Bekasi	Rp 1599586950510	Rp 250329990455.00	Rp 71399207547.00	Rp 241022957000.00	149.4
Kab. Bogor	Rp 2448911580767	Rp 393497014320.00	Rp 75688335036.00	Rp 488434209602.00	395
Kab. Ciamis	Rp 983198999345	Rp 114934404984.00	Rp 15398618281.00	Rp 254518375800.00	79.4
Kab. Cianjur	Rp 1429325514339	Rp 125606552061.00	Rp 20400497145.00	Rp 412324560600.00	207.1
Kab. Cirebon	Rp 1324323398462	Rp 205983106528.00	Rp 36296778919.00	Rp 436288708000.00	217.6
Kab. Garut	Rp 1593929064172	Rp 59833305518	Rp 7506152525	Rp 484184357000.00	235.2
Kab. Indramayu	Rp 1002272538662	Rp 114180505001.00	Rp 20967297502.00	Rp 372069062000.00	191.9
Kab. Karawang	Rp 1271545263347	Rp 175664238098.00	Rp 54554604201.00	Rp 337518698880.00	173.7
Kab. Kuningan	Rp 1004504472920	Rp 144998244918	Rp 26205907346	Rp 298926989000.00	123.2
Kab. Majalengka	Rp 1259036914980	Rp 521520733376	Rp 19363321394	Rp 376682253000.00	121.1
Kab. Purwakarta	Rp 694099493568	Rp 85805120325.00	Rp 21913962077.00	Rp 167398755000.00	71.9
Kab. Subang	Rp 947047002557	Rp 88538798003.00	Rp 27637820465.00	Rp 208795660000.00	129.2
Kab. Sukabumi	Rp 1236523912698	Rp 226126947095.00	Rp 69750346164.00	Rp 353489615288.00	153.3
Kab. Sumedang	Rp 1119206816208	Rp 150097435335.00	Rp 15617815696.00	Rp 218940541600.00	104.2
Kab. Tasikmalaya	Rp 1454047419605	Rp 241417296485.00	Rp 24213903272.00	Rp 390088429100.00	77
Kota Bandung	Rp 1617464116037	Rp 412203335056.00	Rp 134689666151.00	-	84.7
Kota Bekasi	Rp 1503260873423	Rp 375770739130.00	Rp 60068643851.00	-	113.7
Kota Bogor	Rp 604313484884	Rp 363575931249.00	Rp 32703888515.00	-	64
Kota Cirebon	Rp 348259882313	Rp 81857132348.00	Rp 16359321696.00	-	26.8
Kota Depok	Rp 863380451955	Rp 159330920764.30	Rp 60707267365.00	-	49.4
Kota Sukabumi	Rp 290841041761	Rp 94519881550.00	Rp 12601701026.00	-	21.9
Kota Tasikmalaya	Rp 536493078393	Rp 155227534984.00	Rp 20279857494.00	-	77
Kota Cimahi	Rp 381888536638	Rp 100268568063.00	Rp 12119558620.00	-	26.9
Kota Banjar	Rp 177062663613	Rp 29836042909.00	Rp 17748251200.00	Rp 22086828000.00	10.1
Kab. Bandung Barat	Rp 314868317716	Rp 45770482950.00	Rp 14509228686.00	Rp 241510582000.00	159
Kab. Pangandaran	Rp 370969680079	Rp 49676582965.00	Rp 8782982250.00	Rp 89358559000.00	30.7

PROV. JAWA TENGAH	Rp 6028745371546	Rp 1084873423892.00	Rp 270950539650.00	Rp .00	3743.23
Kab. Banjarnegara	Rp 725569487621	Rp 69339351079.00	Rp 15286504148.00	Rp 262654461000.00	136.1
Kab. Banyumas	Rp 1127340247734	Rp 134735242373.00	Rp 33842228711.00	Rp 360743521000.00	211.6
Kab. Batang	Rp 589897361068	Rp 90235031950.00	Rp 19223489695.00	Rp 192327469000.00	64.1
Kab. Blora	Rp 728534768178	Rp 106531166319	Rp 17800033420	Rp 268253846000.00	97.9
Kab. Boyolali	Rp 737667827215	Rp 195488295970.00	Rp 16607089541.00	Rp 219802085000.00	93.7
Kab. Brebes	Rp 949147695165	Rp 119311883513.00	Rp 24758705067.00	Rp 441009459000.00	293.2
Kab. Cilacap	Rp 1109163459670	Rp 159636830113.00	Rp 25028366957.00	Rp 286955948800.00	185.2
Kab. Demak	Rp 648527201541	Rp 140906166439.00	Rp 18798267127.00	Rp 276950857000.00	137.6
Kab. Grobogan	Rp 814780324261	Rp 108997834048.00	Rp 28859916653.00	Rp 289687819000.00	161.9
Kab. Jepara	Rp 749648831117	Rp 430224661768	Rp 23799074021	Rp 234090663000.00	83.5
Kab. Karanganyar	Rp 755174882779	Rp 94723140558.00	Rp 23366268561.00	Rp 160000995000.00	84.5
Kab. Kebumen	Rp 1012201803616	Rp 145085148272.00	Rp 24651755312.00	Rp 395411358600.00	201.3
Kab. Kendal	Rp 761159414424	Rp 135928878045.00	Rp 19579502778.00	Rp 240437047000.00	91.2
Kab. Klaten	Rp 847600853460	Rp 132885469346.00	Rp 22830721046.00	Rp 374660994000.00	144.1
Kab. Kudus	Rp 626904926062	Rp 177189280730.00	Rp 25439678954.00	Rp 136723311800.00	58
Kab. Magelang	Rp 775143326480	Rp 177954286556.00	Rp 24795658599.00	Rp 383071777000.00	137.4
Kab. Pati	Rp 839064974659	Rp 126479428006.00	Rp 18137334594.00	Rp 417038558000.00	119
Kab. Pekalongan	Rp 709652359039	Rp 104513674704.00	Rp 41872269624.00	Rp 259142008800.00	87
Kab. Pemalang	Rp 895394950517	Rp 147955079425.00	Rp 22071311892.00	Rp 301814036000.00	200.7
Kab. Purbalingga	Rp 672282263167	Rp 95207189731.00	Rp 16361053280.00	Rp 237221605000.00	140.1
Kab. Purworejo	Rp 641735892088	Rp 110590146550.00	Rp 22392626355.00	Rp 366917898000.00	82.2
Kab. Rembang	Rp 542872485814	Rp 129040758130.00	Rp 23611259844.00	Rp 258436412000.00	95.3
Kab. Semarang	Rp 685854397171	Rp 502832013240.00	Rp 20016119427.00	Rp 181931854000.00	73.9
Kab. Sragen	Rp 734873742538	Rp 73810954735.00	Rp 15872620182.00	Rp 168044095000.00	113.8
Kab. Sukoharjo	Rp 679178870897	Rp 81991227380.00	Rp 26281280959.00	Rp 146662487000.00	63.6
Kab. Tegal	Rp 844228211660	Rp 111309366999.00	Rp 29790798975.00	Rp 340958368997.00	109.9
Kab. Temanggung	Rp 523288135274	Rp 84642764270.00	Rp 17740453708.00	Rp 241944648000.00	72.6
Kab. Wonogiri	Rp 888415955912	Rp 170638425207.45	Rp 14744691329.00	Rp 227393914000.00	98.3
Kab. Wonosobo	Rp 620656225654	Rp 117665407169.00	Rp 18435469359.00	Rp 212114096000.00	131.3
Kota Magelang	Rp 212855948598	Rp 66878212548	Rp 12296484850	Rp .00	9.1

Kota Pekalongan	Rp 256630117925	Rp 70386886413.00	Rp 19442739174.00	Rp .00	20.2
Kota Salatiga	Rp 216644778810	Rp 107297822923.00	Rp 15126394388.00	Rp .00	9.2
Kota Semarang	Rp 1027860019968	Rp 353871289284	Rp 60679523395	Rp .00	72
Kota Surakarta	Rp 570808209765	Rp 146596239384.00	Rp 38320355805.00	Rp .00	45.2
Kota Tegal	Rp 271280060560	Rp 64028843709.00	Rp 11463374545.00	Rp .00	18.6
PROV. D.I. YOGYAKARTA	Rp 1542408871057	Rp 322880342207.72	Rp 48463786607.00	Rp .00	448.47
Kab. Bantul	Rp 737207763600	Rp 449951226549.89	Rp 10087145714.00	Rp 98359905000.00	131.15
Kab. Gunung Kidul	Rp 660983622312	Rp 80574538968.83	Rp 21247740201.00	Rp 136052137000.00	123.08
Kab. Kulon Progo	Rp 498321020434	Rp 84254630632.59	Rp 12168706869.00	Rp 90337907000.00	29.45
Kab. Sleman	Rp 868384269784	Rp 146375413267	Rp 31744117024	Rp 99035176000.00	74.62
Kota Yogyakarta	Rp 429763867002	Rp 165060234109	Rp 25846177186	-	90.17
PROV. JAWA TIMUR	Rp 9746816818902	Rp 2562471644905	Rp 248984162795	-	4112.25
Kab. Bangkalan	Rp 635818049325	Rp 128546415158	Rp 16178021926	Rp 330890066000.00	186.11
Kab. Banyuwangi	Rp 1001512037367	Rp 203646933915.35	Rp 25427020124.00	Rp 199679711400.00	121.37
Kab. Blitar	Rp 851093205060	Rp 96926584619.75	Rp 21618641044.00	Rp 185524212200.00	103.75
Kab. Bojonegoro	Rp 798992602673	Rp 85935644795.58	Rp 22786980612.00	Rp 367201310000.00	154.64
Kab. Bondowoso	Rp 586207334070	Rp 185160034793.00	Rp 21161076247.00	Rp 230866115000.00	103.33
Kab. Gresik	Rp 787823015696	Rp 97132489398.00	Rp 17311897555.00	Rp 280483802000.00	148.61
Kab. Jember	Rp 1183248520078	Rp 163164355143.12	Rp 32470298259.00	Rp 285367067000.00	226.57
Kab. Jombang	Rp 756834487027	Rp 114681729462.85	Rp 25415259576.00	Rp 274889384712.00	116.44
Kab. Kediri	Rp 907974224577	Rp 101388821990.00	Rp 22369163844.00	Rp 310974159000.00	163.95
Kab. Lamongan	Rp 909262887587	Rp 134636626964.00	Rp 19256237170.00	Rp 367123481000.00	157.11
Kab. Lumajang	Rp 693195467795	Rp 118223255177.77	Rp 12523316038.00	Rp 188469078400.00	98.88
Kab. Madiun	Rp 604200394251	Rp 72848627006.29	Rp 22671416109.00	Rp 162170498000.00	71.91
Kab. Magetan	Rp 633399406166	Rp 94306683521.41	Rp 11886558325.00	Rp 167445096800.00	60.43
Kab. Malang	Rp 1212118815365	Rp 153941483997.69	Rp 29169288293.00	Rp 365827590000.00	246.6
Kab. Mojokerto	Rp 688076553621	Rp 102117681677.00	Rp 15600965150.00	Rp 234330122000.00	108.81
Kab. Nganjuk	Rp 810158067101	Rp 90658867060.00	Rp 15570911050.00	Rp 277415447400.00	118.51
Kab. Ngawi	Rp 2802034551642	Rp 63319210020	Rp 63406438533	Rp 192609327000.00	119.43
Kab. Pacitan	Rp 543506814151	Rp 87830222830.10	Rp 9609074248.92	Rp 145072735000.00	75.86
Kab. Pamekasan	Rp 595593161025	Rp 67260219843.83	Rp 37559975578.00	Rp 198798855000.00	122.43

Kab. Pasuruan	Rp 889671335594	Rp 166553081586.00	Rp 21187017477.00	Rp 361738924000.00	141.09
Kab. Ponorogo	Rp 713095758198	Rp 118744095759.00	Rp 22917317536.00	Rp 252106956000.00	83.97
Kab. Probolinggo	Rp 663057653707	Rp 143589824948.00	Rp 30674488228.00	Rp 392410256987.00	207.22
Kab. Sampang	Rp 539215586292	Rp 83952628040.00	Rp 12314742924.00	Rp 232543589000.00	202.21
Kab. Sidoarjo	Rp 1322146379134	Rp 202236155935.28	Rp 26462668189.00	Rp 292819178057.00	119.29
Kab. Situbondo	Rp 575583166328	Rp 134777571834.36	Rp 16499976702.00	Rp 132840677600.00	76.44
Kab. Sumenep	Rp 689951532993	Rp 198104915023	Rp 17469783743	Rp 338395870000.00	211.98
Kab. Trenggalek	Rp 604914703239	Rp 115995184440.48	Rp 15925614856.00	Rp 148700015000.00	76.44
Kab. Tuban	Rp 659194209024	Rp 140805992355.26	Rp 19359755453.00	Rp 256256128000.00	170.8
Kab. Tulungagung	Rp 909878020192	Rp 118548881546.00	Rp 28428018596.00	Rp 233413883000.00	70.01
Kota Blitar	Rp 207811729581	Rp 46507253725.50	Rp 38418207563.00	-	10.1
Kota Kediri	Rp 295473560778	Rp 158559201833.50	Rp 25784824010.00	-	20.54
Kota Madiun	Rp 218980449137	Rp 80477258631.00	Rp 23947933766.00	-	7.69
Kota Malang	Rp 670324779675	Rp 98468784758.31	Rp 61251437661.25	-	35.39
Kota Mojokerto	Rp 181520100382	Rp 52909143534.71	Rp 40913981995.00	-	6.63
Kota Pasuruan	Rp 202137615164	Rp 71634112161.04	Rp 18319902941.00	-	12.92
Kota Probolinggo	Rp 214198065908	Rp 69113804328.00	Rp 20537130035.00	-	16.37
Kota Surabaya	Rp 2077487666724	Rp 404185357434.00	Rp 207523268102.00	-	130.55
Kota Batu	Rp 244407090157	Rp 74775086249	Rp 23872941549	Rp 26548999000.00	7.89
PROV. BANTEN	Rp 3603844398496	Rp 395343265633.45	Rp 81482628599.00	-	
Kab. Lebak	Rp 920998398377	Rp 101966298554.00	Rp 15302150796.00	Rp 286755343000.00	
Kab. Pandeglang	Rp 1032962403061	Rp 95870418677.00	Rp 16878737550.00	Rp 264064732000.00	
Kab. Serang	Rp 960636196139	Rp 72373343805.00	Rp 23069959596.00	Rp 257969465600.00	
Kab. Tangerang	Rp 1269369871256	Rp	Rp	Rp 278749719828.00	
Kota Cilegon	Rp 451527767353	Rp 117623043845.00	Rp 34610065088.00	-	
Kota Serang	Rp 1217718489159	Rp 235727467500	Rp 70878456188	-	
Kota Tangerang	Rp 450419629476	Rp 74448642803.00	Rp 28069891132.00	-	
Kota Tangerang Selatan	Rp 818088231865	Rp 111394241338	Rp 36343862523	-	

Lampiran 6. Data Penelitian Tahun 2020

Wilayah	Fungsi Pendidikan	Fungsi Ekonomi	Fungsi Perlindungan Sosial	Dana Desa	Jml Masy. Miskin (Ribu Jiwa)
PROV. JAWA BARAT	Rp 17390986752331	Rp 1898932623660	Rp 258959044856	0	3920.2
Kab. Bandung	Rp 1203822515495	Rp 278191274071.02	Rp 65425754940.68	Rp 318473742000.00	263.6
Kab. Bekasi	Rp 1884437080000	Rp 282579944818.00	Rp 83952177000.00	Rp 255841111000.00	186.3
Kab. Bogor	Rp 1584074222500	Rp 463107603000.00	Rp 88374655500.00	Rp 506923429252.00	465.7
Kab. Ciamis	Rp 786334232154	Rp 124000125293.00	Rp 22947455523.00	Rp 260240548000.00	91.4
Kab. Cianjur	Rp 1069687506050	Rp 118779285546.00	Rp 31641950380.00	Rp 423935085000.00	234.5
Kab. Cirebon	Rp 1152422306358	Rp 224747394600.00	Rp 34369811900.00	Rp 452375165000.00	247.9
Kab. Garut	Rp 1689855552451	Rp 111145984151	Rp 17800942123	Rp 504941320000.00	262.8
Kab. Indramayu	Rp 1144690203000	Rp 118501350375.00	Rp 27386025000.00	Rp 390299016000.00	220.3
Kab. Karawang	Rp 1472327039836	Rp 187676008413.10	Rp 61390685178.00	Rp 342895076000.00	195.4
Kab. Kuningan	Rp 943183496380	Rp 152429210709	Rp 25361664895	Rp 303168088000.00	139.2
Kab. Majalengka	Rp 1037293893049	Rp 100206724759	Rp 39093852325	Rp 391668514000.00	138.2
Kab. Purwakarta	Rp 730521115996	Rp 128225623114.00	Rp 32715257703.00	Rp 167468522000.00	80.2
Kab. Subang	Rp 903084353012	Rp 117747216876.62	Rp 53074754266.78	Rp 212605496000.00	149.8
Kab. Sukabumi	Rp 1160649306461	Rp 268269666168.00	Rp 67280901026.00	Rp 366011004000.00	175.1
Kab. Sumedang	Rp 966950493872	Rp 171907523428.44	Rp 28786934020.00	Rp 222389199000.00	118.4
Kab. Tasikmalaya	Rp 1232273038604	Rp 154594697960.60	Rp 29723629100.00	Rp 399451057000.00	86.1
Kota Bandung	Rp 4112635666794	Rp 555412080670.43	Rp 113833508676.68	Rp .00	100
Kota Bekasi	Rp 1476139225266	Rp 193911313760.00	Rp 68415934000.00	Rp .00	134
Kota Bogor	Rp 569979629890	Rp 371950870326.00	Rp 39392473157.00	Rp .00	75
Kota Cirebon	Rp 382945792600	Rp 131264580106.00	Rp 19915208000.00	Rp .00	30.6
Kota Depok	Rp 821283561282	Rp 181360879410.00	Rp 83738111626.00	Rp .00	60.4
Kota Sukabumi	Rp 297933181283	Rp 76504764265.00	Rp 17184967895.00	Rp .00	25.4
Kota Tasikmalaya	Rp 513558083432	Rp 112253837919.95	Rp 24727162987.94	Rp .00	86.1
Kota Cimahi	Rp 360641112103	Rp 51509036219.00	Rp 19927847600.00	Rp .00	31.6
Kota Banjar	Rp 194686164429	Rp 41034190415.61	Rp 16827786785.80	Rp 23265229000.00	11.2
Kab. Bandung Barat	Rp 805812889976	Rp 165866496651.00	Rp 30773254407.00	Rp 251204318589.00	179.5
Kab. Pangandaran	Rp 386156609723	Rp 35349879866.40	Rp 22220666053.80	Rp 88353508000.00	36.1

PROV. JAWA TENGAH	Rp 12228609229000	Rp 1318671978000.00	Rp 321239007000.00	Rp .00	3980.9
Kab. Banjarnegara	Rp 729815372796	Rp 65680092840.00	Rp 15957893256.00	Rp 265128597000.00	144.95
Kab. Banyumas	Rp 1221856092031	Rp 152652846631.00	Rp 30174442849.00	Rp 378545183000.00	225.84
Kab. Batang	Rp 625423855878	Rp 82228691697.00	Rp 25120089572.00	Rp 193031345000.00	70.57
Kab. Blora	Rp 664839214710	Rp	Rp	Rp 267071340000.00	103.73
Kab. Boyolali	Rp 741553433800	Rp 198447825250.00	Rp 22018646500.00	Rp 216981458000.00	100.59
Kab. Brebes	Rp 1024827736480	Rp 110170070430.00	Rp 32718155370.00	Rp 492478504000.00	308.78
Kab. Cilacap	Rp 1129106544634	Rp 176667801521.00	Rp 30034474040.00	Rp 293893896000.00	198.6
Kab. Demak	Rp 733139888237	Rp 106504705062.00	Rp 19114675437.00	Rp 284463387000.00	146.87
Kab. Grobogan	Rp 892234183275	Rp 141943625615.00	Rp 28853400755.00	Rp 302016826500.00	172.26
Kab. Jepara	Rp 848398299000	Rp 69336030000	Rp 10639549000	Rp 247118045000.00	91.14
Kab. Karanganyar	Rp 844619305000	Rp 93337350218.00	Rp 28062254542.00	Rp 166130456001.00	91.72
Kab. Kebumen	Rp 1000910423000	Rp 188512273000.00	Rp 24756162000.00	Rp 405025869000.00	211.09
Kab. Kendal	Rp 800628980953	Rp 141610156342.00	Rp 24740924610.00	Rp 248445837000.00	97.49
Kab. Klaten	Rp 1016055365569	Rp 141973385560.00	Rp 32738123350.00	Rp 380846600500.00	151.83
Kab. Kudus	Rp 465878354000	Rp 107433385000.00	Rp 20552210000.00	Rp 147823461000.00	64.24
Kab. Magelang	Rp 806976785505	Rp 124617620604.00	Rp 30323285426.00	Rp 391044107982.00	146.34
Kab. Pati	Rp 960777049150	Rp 133891869450.00	Rp 26335686200.00	Rp 426380834000.00	127.37
Kab. Pekalongan	Rp 725100560090	Rp 109319442339.00	Rp 22617888098.00	Rp 263397106000.00	91.86
Kab. Pemasang	Rp 903532255225	Rp 162893654500.00	Rp 28884034000.00	Rp 327255484000.00	209.03
Kab. Purbalingga	Rp 733223306000	Rp 93264091000.00	Rp 17924829000.00	Rp 245675204000.00	149.48
Kab. Purworejo	Rp 679628511010	Rp 91855002394.00	Rp 22015110854.00	Rp 363993225000.00	84.79
Kab. Rembang	Rp 494039993800	Rp 142801271866.00	Rp 21093276391.00	Rp 260523814000.00	100.08
Kab. Semarang	Rp 783568516000	Rp 582378409089.00	Rp 30352151000.00	Rp 184666676000.00	79.88
Kab. Sragen	Rp 714682024000	Rp 118037732500.00	Rp 20475357000.00	Rp 171103129000.00	119.38
Kab. Sukoharjo	Rp 720835339000	Rp 87899175000.00	Rp 33490312000.00	Rp 144973519600.00	68.89
Kab. Tegal	Rp 922237675432	Rp 126140705498.00	Rp 31305544738.00	Rp 358311953000.00	117.5
Kab. Temanggung	Rp 567098267088	Rp 65890397640.00	Rp 39436624992.00	Rp 247881825000.00	77.33
Kab. Wonogiri	Rp 957546968256	Rp 102277988004.00	Rp 20411882236.00	Rp 224649959500.00	104.37
Kab. Wonosobo	Rp 632059822378	Rp 159260931699.00	Rp 23281842819.00	Rp 217226851000.00	137.63
Kota Magelang	Rp 213422888000	Rp 65389034339	Rp 12152499065	Rp .00	9.27

Kota Pekalongan	Rp 274622411000	Rp 88016619280.00	Rp 18107098000.00	Rp .00	22.16
Kota Salatiga	Rp 229974467000	Rp 123355088800.00	Rp 14190595000.00	Rp .00	9.69
Kota Semarang	Rp 1197002743000	Rp 449513457000	Rp 89145299000	Rp .00	79.58
Kota Surakarta	Rp 667413548374	Rp 160406596317.00	Rp 41275321607.00	Rp .00	47.03
Kota Tegal	Rp 334152806000	Rp 70435914000.00	Rp 17801189000.00	Rp .00	19.55
PROV. D.I. YOGYAKARTA	Rp 2202107385635	Rp 225071466735.00	Rp 114314376093.00	Rp .00	475.72
Kab. Bantul	Rp 709668156494	Rp 533424306610.14	Rp 20746181918.00	Rp 105405470000.00	138.66
Kab. Gunung Kidul	Rp 684933976609	Rp 84077251503.00	Rp 27128537478.00	Rp 140465795000.00	127.61
Kab. Kulon Progo	Rp 494649213465	Rp 178754906857.00	Rp 16341407180.65	Rp 93551808000.00	31.62
Kab. Sleman	Rp 717789095161	Rp 161149148699	Rp 29909250139	Rp 105026595300.00	78.06
Kota Yogyakarta	Rp 455505980208	Rp 240040612157	Rp 33074699536	Rp .00	99.78
PROV. JAWA TIMUR	Rp 13388197619748	Rp 2022496917759	Rp 398747992720	Rp .00	4419.1
Kab. Bangkalan	Rp 659896168644	Rp 158847824868	Rp 35124257024	Rp 327939755000.00	204
Kab. Banyuwangi	Rp 1081161227620	Rp 191146737022.00	Rp 30525420484.00	Rp 210904572000.00	130.37
Kab. Blitar	Rp 861424654080	Rp 119660746924.00	Rp 25220007300.00	Rp 189098858000.00	108.55
Kab. Bojonegoro	Rp 1331297295682	Rp 254667488087.00	Rp 52346846010.00	Rp 362198052000.00	161.1
Kab. Bondowoso	Rp 580910924393	Rp 101142004322.50	Rp 23302911700.00	Rp 236217008000.00	110.24
Kab. Gresik	Rp 846819749577	Rp 128925498840.00	Rp 24579815750.00	Rp 284325494000.00	164.05
Kab. Jember	Rp 1330388594486	Rp 122841363181.01	Rp 49042508910.50	Rp 302669947000.00	247.99
Kab. Jombang	Rp 914004377010	Rp 164477264930.28	Rp 37791097784.10	Rp 276886419000.00	125.94
Kab. Kediri	Rp 977935646985	Rp 249077052320.00	Rp 26857413500.00	Rp 319175844000.00	179.93
Kab. Lamongan	Rp 808192028591	Rp 146239398180.00	Rp 32883301400.00	Rp 366764832000.00	164.68
Kab. Lumajang	Rp 666720445864	Rp 144521050175.00	Rp 24434400385.00	Rp 193127732000.00	102.6
Kab. Madiun	Rp 628074270795	Rp 97488547563.52	Rp 17707403132.07	Rp 160451269000.00	78.3
Kab. Magetan	Rp 645987252195	Rp 109396142690.00	Rp 16148454208.00	Rp 169140615000.00	65.09
Kab. Malang	Rp 1430412649069	Rp 186503380857.00	Rp 39622549320.00	Rp 379396622412.00	265.56
Kab. Mojokerto	Rp 759153925782	Rp 66524308700.00	Rp 23456826440.00	Rp 234937062000.00	118.8
Kab. Nganjuk	Rp 853456382558	Rp 108085471091.04	Rp 18745681947.00	Rp 284983204000.00	122.73
Kab. Ngawi	Rp 759660275522	Rp 311433942893	Rp 1403269000	Rp 194961707000.00	128.19
Kab. Pacitan	Rp 592501246657	Rp 86186605513.00	Rp 12066005130.00	Rp 148862768000.00	80.82
Kab. Pamekasan	Rp 699322547445	Rp 111580947776.00	Rp 37837096014.00	Rp 202724217800.00	129.41

Kab. Pasuruan	Rp 950826359584	Rp 207356577699.51	Rp 26612394156.60	Rp 364839287200.00	151.43
Kab. Ponorogo	Rp 715076213240	Rp 91369358111.86	Rp 13608886815.70	Rp 254319268000.00	86.74
Kab. Probolinggo	Rp 680479527072	Rp 155111698251.00	Rp 32631052072.00	Rp 429195412000.00	218.35
Kab. Sampang	Rp 592429012015	Rp 82252248266.06	Rp 18546878245.00	Rp 231242401000.00	224.74
Kab. Sidoarjo	Rp 1428111219312	Rp 261232341987.00	Rp 32201478822.00	Rp 291100114800.00	127.05
Kab. Situbondo	Rp 595670105453	Rp 131140479267.78	Rp 33813057277.00	Rp 137842701000.00	83.74
Kab. Sumenep	Rp 729794602929	Rp 241710931484	Rp 45093236543	Rp 337720100000.00	220.23
Kab. Trenggalek	Rp 679972757841	Rp 115850020013.00	Rp 20404961816.00	Rp 153239973867.00	81.06
Kab. Tuban	Rp 781093709555	Rp 123379223183.00	Rp 24967206615.00	Rp 260084089000.00	187.13
Kab. Tulungagung	Rp 919588639700	Rp 134262719050.00	Rp 16750349000.00	Rp 234886566299.00	76.4
Kota Blitar	Rp 253399105655	Rp 64294682176.00	Rp 44284575242.00	Rp .00	11.1
Kota Kediri	Rp 309081273978	Rp 232796804448.00	Rp 25412169940.00	Rp .00	22.19
Kota Madiun	Rp 366490782377	Rp 90405968855.00	Rp 37322265380.00	Rp .00	8.83
Kota Malang	Rp 687807848199	Rp 84866312116.46	Rp 90529321898.90	Rp .00	38.77
Kota Mojokerto	Rp 224579083420	Rp 115532789624.00	Rp 45235956350.00	Rp .00	8.09
Kota Pasuruan	Rp 231849174800	Rp 103219622696.00	Rp 18765977648.00	Rp .00	13.4
Kota Probolinggo	Rp 243130224437	Rp 144834425898.38	Rp 21085460185.20	Rp .00	17.72
Kota Surabaya	Rp 1942717503661	Rp 1303856887059.00	Rp 155674177009.00	Rp .00	145.67
Kota Batu	Rp 231657033046	Rp 83964009755	Rp 32150938463	Rp 28987722000.00	8.12
PROV. BANTEN	Rp 4851593122060	Rp 580748472835.00	Rp 77571331507.00	Rp .00	
Kab. Lebak	Rp 953022572613	Rp 161549597748.00	Rp 17714821550.00	Rp 287400392000.00	
Kab. Pandeglang	Rp 1008695970689	Rp 119589582310.74	Rp 18111283646.90	Rp 266266569000.00	
Kab. Serang	Rp 798586498500	Rp 77899767750.00	Rp 44131375839.00	Rp 261898051000.00	
Kab. Tangerang	Rp 1648589947608	Rp 238685863145	Rp 60535192729	Rp 291455144000.00	
Kota Cilegon	Rp 473569053165	Rp 123347861294.00	Rp 41291831356.00	Rp .00	
Kota Serang	Rp 1365649908399	Rp 640541834785	Rp 75621730610	Rp .00	
Kota Tangerang	Rp 507891999131	Rp 81373866231.00	Rp 35541129649.00	Rp .00	
Kota Tangerang Selatan	Rp 838974602526	Rp 110556334841	Rp 52076001371	Rp .00	

Lampiran 7. Data Penelitian Tahun 2021

Wilayah	Fungsi Pendidikan	Fungsi Ekonomi	Fungsi Perlindungan Sosial	Dana Desa	Jml Masy. Miskin (Ribu Jiwa)
PROV. JAWA BARAT	Rp 13235266950451	Rp 4314828093443	Rp 70175923192		4195.3
Kab. Bandung	Rp 218557755900	Rp 451810610541.20	Rp 23047614774.00	Rp 334046576.00	269.2
Kab. Bekasi	Rp 992172445450	Rp 615134516111.00	Rp 19052929000.00	Rp 264332147.00	202.7
Kab. Bogor	Rp 1948933717402	Rp 344616485000.00	Rp 24515139000.00	Rp 523393765.00	491.2
Kab. Ciamis	Rp 742695362297	Rp 93125368170.00	Rp 28063503000.00	Rp 263615735.00	96.6
Kab. Cianjur	Rp 34202526000	Rp 178511067175.00	Rp 4967388950.00	Rp 430246084.00	260
Kab. Cirebon	Rp 1057738182698	Rp 194273051390.00	Rp 44049770385.00	Rp 454574807.00	271
Kab. Garut	Rp 1515457025780	Rp 66122470639	Rp 19254545412	Rp 506831553.00	281.4
Kab. Indramayu	Rp 293512700640	Rp 352726671640.00	Rp 4875692050.00	Rp 396162113.00	228.6
Kab. Karawang	Rp 451655754300	Rp 576363487100.00	Rp 23863071000.00	Rp 349344485.00	210.8
Kab. Kuningan	Rp 898124663272	Rp 129570196624	Rp 18716801066	Rp 305029334.00	143.4
Kab. Majalengka	Rp 1158447058486	Rp 148779541475	Rp 25691215716	Rp 391668514.00	151.1
Kab. Purwakarta	Rp 207830348684	Rp 161110877370.00	Rp 4334555598.00	Rp 170355883.00	84.3
Kab. Subang	Rp 882766374091	Rp 166909693366.00	Rp 64235855745.00	Rp 220076242.00	159
Kab. Sukabumi	Rp 437113317069	Rp 304678354868.00	Rp 11390962000.00	Rp 377384015.00	194.4
Kab. Sumedang	Rp 511707870384	Rp 141102668490.00	Rp 23194105610.00	Rp 227319620.00	126.3
Kab. Tasikmalaya	Rp 313275098000	Rp 163822232497.00	Rp 6178959257.00	Rp 402887661.00	89.5
Kota Bandung	Rp 584839473711	Rp 479525395049.00	Rp 19344906261.00	-	112.5
Kota Bekasi	Rp 686002673418	Rp 895188872105.00	Rp 13254026000.00	-	144.1
Kota Bogor	Rp 554247328819	Rp 446312772248.00	Rp 18706708741.00	-	80.1
Kota Cirebon	Rp 139400219748	Rp 68312260387.00	Rp 1689128750.00	-	32
Kota Depok	Rp 759196590775	Rp 215690183491.00	Rp 43883398786.00	-	63.9
Kota Sukabumi	Rp 300807557157	Rp 140669209436.00	Rp 7243360148.00	-	27.2
Kota Tasikmalaya	Rp 123821858372	Rp 143961509298.00	Rp 6674360000.00	-	89.5
Kota Cimahi	Rp 162650370884	Rp 70706002550.00	Rp 65353545149.00	-	32.5
Kota Banjar	Rp 32176995600	Rp 32059284593.00	Rp 6019562500.00	Rp 25369574.00	13.4
Kab. Bandung Barat	Rp 11308198204	Rp 159807952085.00	Rp 45914694399.00	Rp 257381269.00	190.8
Kab. Pangandaran	Rp 107576549108	Rp 286543212544.00	Rp 703024657.00	Rp 90603565.00	39.1

PROV. JAWA TENGAH	Rp 11840602206000	Rp 1356891709000.00	Rp 327599280000.00		4109.75
Kab. Banjarnegara	Rp 204704755635	Rp 296437307030.00	Rp 3944618600.00	Rp 265745328000.00	150.19
Kab. Banyumas	Rp 292685387560	Rp 325600918734.00	Rp 4863841331.00	Rp 381247099000.00	232.91
Kab. Batang	Rp 190175153147	Rp 145161134788.00	Rp 5408544977.00	Rp 195716503235.00	74.91
Kab. Blora	Rp 164997837260	Rp 221931912000	Rp 2524580000	Rp 266940335600.00	107.05
Kab. Boyolali	Rp 214538252000	Rp 168652522000.00	Rp 1018378000.00	Rp 216981458000.00	104.82
Kab. Brebes	Rp 309930349013	Rp 386308263860.00	Rp 5419919420.00	Rp 492478504000.00	314.95
Kab. Cilacap	Rp 345996604505	Rp 498898710604.00	Rp 6469939550.00	Rp 299424381200.00	201.71
Kab. Demak	Rp 214131637656	Rp 235817612114.00	Rp 3335630000.00	Rp 284463387000.00	151.74
Kab. Grobogan	Rp 270884394850	Rp 204466826300.00	Rp 3243461300.00	Rp 303339252000.00	175.72
Kab. Jepara	Rp 724217217000	Rp 54274076000	Rp 12921239000	Rp 250171633000.00	95.22
Kab. Karanganyar	Rp 166455216500	Rp 159631013000.00	Rp 4649114500.00	Rp 169314064000.00	95.41
Kab. Kebumen	Rp 230120881000	Rp 246639111000.00	Rp 4357758000.00	Rp 405260453000.00	212.92
Kab. Kendal	Rp 214517157805	Rp 114415642452.00	Rp 2984287100.00	Rp 251060030000.00	100
Kab. Klaten	Rp 191725494625	Rp 179302042626.00	Rp 7897358000.00	Rp 380846601000.00	158.23
Kab. Kudus	Rp 60535276000	Rp 136454663567.00	Rp 4645766000.00	Rp 151037149800.00	67.06
Kab. Magelang	Rp 221714987210	Rp 174794687445.00	Rp 1420760170.00	Rp 391044109000.00	154.91
Kab. Pati	Rp 893866124000	Rp 124530872000.00	Rp 27482030000.00	Rp 426380834000.00	128.74
Kab. Pekalongan	Rp 214290530300	Rp 163011143173.00	Rp 6393985550.00	Rp 262704272391.00	95.26
Kab. Pemalang	Rp 285056080000	Rp 217105862240.00	Rp 17587591700.00	Rp 327890826000.00	215.08
Kab. Purbalingga	Rp 206994365220	Rp 164900961645.00	Rp 8874879642.00	Rp 246883340000.00	153.08
Kab. Purworejo	Rp 162684278036	Rp 222986289906.00	Rp 2855592700.00	Rp 363993225000.00	88.8
Kab. Rembang	Rp 124246655800	Rp 162009068000.00	Rp 3935941000.00	Rp 260523814000.00	101.4
Kab. Semarang	Rp 236359901000	Rp 200971319250.00	Rp 7203266000.00	Rp 188339520000.00	83.61
Kab. Sragen	Rp 174199367835	Rp 111181113589.00	Rp 5374273538.00	Rp 175365649000.00	122.91
Kab. Sukoharjo	Rp 171231626000	Rp 360387165700.00	Rp 7052199300.00	Rp 148043106000.00	73.84
Kab. Tegal	Rp 295173504000	Rp 220389411500.00	Rp 5828935000.00	Rp 359354987400.00	123.52
Kab. Temanggung	Rp 4749999300	Rp 17642434250.00	Rp 170000000.00	Rp 247881825000.00	79.09
Kab. Wonogiri	Rp 915702419120	Rp 107704781312.00	Rp 8125154576.00	Rp 224681357000.00	110.46
Kab. Wonosobo	Rp 192161144000	Rp 186458965165.00	Rp 6192815000.00	Rp 218570581593.00	139.67
Kota Magelang	Rp 68582311000	Rp 121702963000	Rp 5882456000	Rp .00	9.44

Kota Pekalongan	Rp 118181077000	Rp 102117326000.00	Rp 3624309000.00	Rp .00	23.49
Kota Salatiga	Rp 63014201706	Rp 123064739212.00	Rp 6004043410.00	Rp .00	10.14
Kota Semarang	Rp 959661272975	Rp 860203400985	Rp 58746593000	Rp .00	84.45
Kota Surakarta	Rp 223066278955	Rp 217611089703.00	Rp 11101545645.00	Rp .00	48.78
Kota Tegal	Rp 130787217021	Rp 174030296467.00	Rp 7838484900.00	Rp .00	20.27
PROV. D.I. YOGYAKARTA	Rp 2077759100210	Rp 392909264596.00	Rp 115501839128.00	Rp .00	506.45
Kab. Bantul	Rp 781447125549	Rp 373363548145.00	Rp 28970586302.00	Rp 109399072000.00	146.98
Kab. Gunung Kidul	Rp 755460028878	Rp 119396261464.00	Rp 18145991877.00	Rp 144614409000.00	135.33
Kab. Kulon Progo	Rp 170456804768	Rp 161429813185.00	Rp 16414781600.00	Rp 95885997000.00	34.07
Kab. Sleman	Rp 270532648966	Rp 212435672386	Rp 30077180449	Rp 110556360000.00	81.14
Kota Yogyakarta	Rp 468614851890	Rp 84981853802	Rp 87450091616	Rp .00	108.93
PROV. JAWA TIMUR	Rp 12824582102609	Rp 1963243540045	Rp 913489659250		4572.73
Kab. Bangkalan	Rp 171267146193	Rp 206927475286	Rp 2868537445	Rp 327867897600.00	215.97
Kab. Banyuwangi	Rp 307280370769	Rp 442050048499.00	Rp 4510002260.00	Rp 220080459000.00	130.93
Kab. Blitar	Rp 167175281300	Rp 197810016585.00	Rp 6412009340.00	Rp 194591362000.00	112.62
Kab. Bojonegoro	Rp 298007641421	Rp 2110101708762.00	Rp 40435731480.00	Rp 362133802200.00	166.52
Kab. Bondowoso	Rp 166776242121	Rp 190136057985.00	Rp 3985899710.00	Rp 236217008000.00	115.18
Kab. Gresik	Rp 414162174519	Rp 365640962793.00	Rp 13455915380.00	Rp 286675868000.00	166.35
Kab. Jember	Rp 321852101808	Rp 616153426135.00	Rp 3286692100.00	Rp 312350908000.00	257.09
Kab. Jombang	Rp 263093305190	Rp 160923331964.00	Rp 11740363745.00	Rp 280590734000.00	127.3
Kab. Kediri	Rp 267209427503	Rp 361991083542.00	Rp 7356540437.00	Rp 320204759400.00	184.49
Kab. Lamongan	Rp 796128050745	Rp 157083854344.00	Rp 25016996480.00	Rp 367859016000.00	166.82
Kab. Lumajang	Rp 272557056517	Rp 174606081682.00	Rp 11773647156.00	Rp 197245436200.00	105.25
Kab. Madiun	Rp 159062264892	Rp 100121584244.00	Rp 3069103607.00	Rp 163773167000.00	81.61
Kab. Magetan	Rp 121293906290	Rp 141359446348.00	Rp 6235122055.00	Rp 171218734000.00	67.75
Kab. Malang	Rp 1349190579120	Rp 206396322530.00	Rp 48050057206.00	Rp 388606797000.00	276.58
Kab. Mojokerto	Rp 192247471852	Rp 233988098978.00	Rp 5939245400.00	Rp 238562799000.00	120.54
Kab. Nganjuk	Rp 145905542913	Rp 179974742185.00	Rp 5907525450.00	Rp 286114908000.00	125.53
Kab. Ngawi	Rp 727862160970	Rp 283973851564	Rp 7046474418	Rp 198596447000.00	130.81
Kab. Pacitan	Rp 570777032731	Rp 83630673028.00	Rp 32693620559.00	Rp 151108021000.00	84.19
Kab. Pamekasan	Rp 708005378566	Rp 388617996415.00	Rp 8382534994.00	Rp 203832089800.00	137.12

Kab. Pasuruan	Rp 340602988346	Rp 419574160017.00	Rp 5619035243.00	Rp 365281200370.00	159.78
Kab. Ponorogo	Rp 159597536041	Rp 1477593659.00	Rp 21144381848.00	Rp 255221886000.00	89.94
Kab. Probolinggo	Rp 158205756200	Rp 290889624519.00	Rp 6495645900.00	Rp 429195411929.00	223.32
Kab. Sampang	Rp	Rp .00	Rp .00	Rp 231888794000.00	237.23
Kab. Sidoarjo	Rp	Rp .00	Rp .00	Rp 297295337200.00	137.15
Kab. Situbondo	Rp 600471174201	Rp 231640517652.00	Rp 16883060330.00	Rp 140287901000.00	86.95
Kab. Sumenep	Rp 734417516503	Rp 203386788150	Rp 48169906239	Rp 337720100000.00	224.73
Kab. Trenggalek	Rp 144872592552	Rp 158012670669.00	Rp 6160077120.00	Rp 156421774000.00	84.89
Kab. Tuban	Rp 199624682508	Rp 264852222844.00	Rp 21858181354.00	Rp 263813073200.00	192.58
Kab. Tulungagung	Rp 821697154098	Rp 262481465077.00	Rp 6407029836.00	Rp 237606485000.00	78.59
Kota Blitar	Rp 86709648699	Rp 94812998272.00	Rp 24496871000.00	Rp .00	11.33
Kota Kediri	Rp 292614312676	Rp 70532504063.00	Rp 39440780058.00	Rp .00	22.55
Kota Madiun	Rp 131130288005	Rp 166636609107.00	Rp 15450998580.00	Rp .00	9.06
Kota Malang	Rp	Rp .00	Rp .00	Rp .00	40.62
Kota Mojokerto	Rp 102511283849	Rp 159434151395.00	Rp 10927737812.00	Rp .00	8.37
Kota Pasuruan	Rp 237110413995	Rp 93136806388.00	Rp 45430418621.00	Rp .00	13.97
Kota Probolinggo	Rp 228689596599	Rp 193005892980.00	Rp 11100729896.00	Rp .00	17.91
Kota Surabaya	Rp 2086008772968	Rp 494518966389.00	Rp 157362913230.00	Rp .00	152.49
Kota Batu	Rp 221977338516	Rp 96342907990	Rp 43773235467	Rp 31457712000.00	8.63
PROV. BANTEN	Rp 5051341264907	Rp 3712614924054.00	Rp 118492811000.00		
Kab. Lebak	Rp 961665828012	Rp 429567600043.00	Rp 9193061091.00	Rp 291983725000.00	
Kab. Pandeglang	Rp 239485724300	Rp 145521540046.00	Rp 8888725000.00	Rp 270986700000.00	
Kab. Serang	Rp 849667720129	Rp 649557720541.00	Rp 15541050545.00	Rp 266073295000.00	
Kab. Tangerang	Rp 1436229750413	Rp 696717441983	Rp 26500644910	Rp 301280535000.00	
Kota Cilegon	Rp 143287890667	Rp 249873398983.00	Rp 12215585795.00	Rp .00	
Kota Serang	Rp 833677205977	Rp 640445065404	Rp 19562985100	Rp .00	
Kota Tangerang	Rp 382296304105	Rp 167288224497.00	Rp 22473204582.00	Rp .00	
Kota Tangerang Selatan	Rp 378995029795	Rp 657817608770	Rp 6740175200	Rp .00	

Lampiran 8. Data Penelitian Tahun 2022

Wilayah	Fungsi Pendidikan	Fungsi Ekonomi	Fungsi Perlindungan Sosial	Dana Desa	Jml Masy. Miskin (Ribu Jiwa)
PROV. JAWA BARAT	Rp 7622512217941	Rp 6852944468112	Rp 177855613339		4071
Kab. Bandung	Rp 2156662615512	Rp 870449787521.00	Rp 38210942357.00	Rp 345331515.00	258.6
Kab. Bekasi	Rp 1971789135721	Rp 619199650377.00	Rp 43380844673.00	Rp 264353007.00	201.1
Kab. Bogor	Rp 2670109712926	Rp 1272218864634.00	Rp 34166265802.00	Rp 544358095.00	474.7
Kab. Ciamis	Rp 995908418268	Rp 375815547121.00	Rp 24446927316.00	Rp 270502288.00	94
Kab. Cianjur	Rp 1341379018673	Rp 383498787642.00	Rp 26786900176.00	Rp 442113458.00	246.8
Kab. Cirebon	Rp 1340189739583	Rp 381390265327.00	Rp 24190588903.00	Rp 471363639.00	266.1
Kab. Garut	Rp 1575378726480	Rp 798677371344	Rp 27587355836	Rp 518247019.00	276.7
Kab. Indramayu	Rp 985139199636	Rp 366276668566.00	Rp 25675874708.00	Rp 401253897.00	225
Kab. Karawang	Rp 1277595220572	Rp 937642619270.00	Rp 41365120902.00	Rp 355943391.00	199.9
Kab. Kuningan	Rp 982768556224	Rp 257659647000	Rp 11484293367	Rp 315201708.00	140.3
Kab. Majalengka	Rp 923786801751	Rp 564726938580	Rp 5332069829	Rp 389573880.00	147.1
Kab. Purwakarta	Rp 663941665541	Rp 295366887186.00	Rp 8983122255.00	Rp 172438898.00	83.4
Kab. Subang	Rp 893120636284	Rp 458392802313.00	Rp 14584490863.00	Rp 234728039.00	155.3
Kab. Sukabumi	Rp 1237229142361	Rp 530227449966.00	Rp 25401906039.00	Rp 401786292.00	186.3
Kab. Sumedang	Rp 1038607968294	Rp 322729367828.00	Rp 15437984110.00	Rp 238130726.00	120.1
Kab. Tasikmalaya	Rp 1130594200905	Rp 339959890326.00	Rp 15460887499.00	Rp 410638722.00	87.1
Kota Bandung	Rp 1889304932149	Rp 640901012944.37	Rp 63321519838.00		109.8
Kota Bekasi	Rp 1653415305267	Rp 896239129365.00	Rp 32474139430.00		137.4
Kota Bogor	Rp 714882068980	Rp 473135321681.00	Rp 23999696934.00		79.2
Kota Cirebon	Rp 406182298152	Rp 123787143541.00	Rp 10329714779.00		31.5
Kota Depok	Rp 771305158974	Rp 604136939175.00	Rp 40728687684.00		64.4
Kota Sukabumi	Rp 273622972884	Rp 141675535638.00	Rp 15477021653.00		26.6
Kota Tasikmalaya	Rp 533668795842	Rp 425332981430.00	Rp 27476819169.00		87.1
Kota Cimahi	Rp 369319989670	Rp 161529660284.17	Rp 16646213905.00		31.2
Kota Banjar	Rp 179515085403	Rp 109695540836.00	Rp 11314127325.00	Rp 16018603.00	12.7
Kab. Bandung Barat	Rp 748374174569	Rp 998935376218.00	Rp 15058449120.00	Rp 252779336.00	183.7
Kab. Pangandaran	Rp 404287109265	Rp 265210927226.00	Rp 14240174678.00	Rp 86475185.00	37.9

PROV. JAWA TENGAH	Rp 7516926850266	Rp 1882082024929.00	Rp 350393490024.00	Rp .00	3831.44
Kab. Banjarnegara	Rp 719511657526	Rp 165328337423.00	Rp 7650552637.00	Rp 266535723000.00	141.25
Kab. Banyumas	Rp 882922152093	Rp 447053393057.00	Rp 12821508762.00	Rp 383196882000.00	220.47
Kab. Batang	Rp 547444981087	Rp 244449228547.00	Rp 13194057065.00	Rp 200193418000.00	69.94
Kab. Blora	Rp 704065619998	Rp 445035860005	Rp 15660853101	Rp 264843962050.00	99.83
Kab. Boyolali	Rp 703851934007	Rp 379182758009.00	Rp 13182203687.00	Rp 223033286000.00	97.18
Kab. Brebes	Rp 942724927020	Rp 434926456843.00	Rp 10119983575.00	Rp 453819700000.00	290.66
Kab. Cilacap	Rp 1831809042424	Rp 486477960100.00	Rp 14302346639.00	Rp 308764756104.00	190.96
Kab. Demak	Rp 751700090708	Rp 300881873597.00	Rp 22023890380.00	Rp 279969116000.00	143.01
Kab. Grobogan	Rp 846888311099	Rp 456902458993.00	Rp 14281570874.00	Rp 307655877000.00	163.2
Kab. Jepara	Rp 814574393854	Rp 295124257620	Rp 24204156375	Rp 245689231000.00	89.08
Kab. Karanganyar	Rp 762757848358	Rp 219889627751.00	Rp 17007752607.00	Rp 169874596000.00	88.56
Kab. Kebumen	Rp 969191179350	Rp 276334853404.00	Rp 8969942283.00	Rp 416756373000.00	196.16
Kab. Kendal	Rp 741198104673	Rp 344960463045.00	Rp 20719517892.00	Rp 255193805000.00	93.03
Kab. Klaten	Rp 797722806643	Rp 305948435753.00	Rp 17633242480.00	Rp 379338801000.00	144.87
Kab. Kudus	Rp 633279735067	Rp 231498958281.00	Rp 98242647294.00	Rp 146122990000.00	66.06
Kab. Magelang	Rp 653750773212	Rp 310493694249.00	Rp 15523814024.00	Rp 393231309000.00	145.33
Kab. Pati	Rp 834220521289	Rp 328064196969.00	Rp 12333726984.00	Rp 426815696200.00	118.04
Kab. Pekalongan	Rp 678778241731	Rp 239025545178.00	Rp 10008096865.00	Rp 263714089350.00	87.53
Kab. Pemasang	Rp 917358096167	Rp 249793366912.00	Rp 17738325365.00	Rp 320209861900.00	195.84
Kab. Purbalingga	Rp 766485106273	Rp 190931859901.00	Rp 19331296477.00	Rp 246998927400.00	145.33
Kab. Purworejo	Rp 625880133653	Rp 329850453005.00	Rp 13713403177.00	Rp 346381470375.00	82.64
Kab. Rembang	Rp 559454260561	Rp 291298092048.00	Rp 13776912176.00	Rp 252064026000.00	94.56
Kab. Semarang	Rp 785456550532	Rp 386340452221.00	Rp 19382329170.00	Rp 190973161000.00	78.6
Kab. Sragen	Rp 680555456675	Rp 323932684066.00	Rp 10691359979.00	Rp 182671645000.00	115.14
Kab. Sukoharjo	Rp 601705440653	Rp 261434233546.00	Rp 38464220995.00	Rp 148559522000.00	68.72
Kab. Tegal	Rp 895292191428	Rp 234686177604.00	Rp 20988678616.00	Rp 359312887800.00	113.62
Kab. Temanggung	Rp 604999864874	Rp 143858321426.00	Rp 22782538549.00	Rp 245879771000.00	73.04
Kab. Wonogiri	Rp 834252565604	Rp 270340731388.00	Rp 15943098528.00	Rp 213348940400.00	105.19
Kab. Wonosobo	Rp 623021729163	Rp 292339551359.00	Rp 14189579233.00	Rp 221885021000.00	128.11
Kota Magelang	Rp 194309879981	Rp 123205719300	Rp 14476357732	Rp .00	8.65

Kota Pekalongan	Rp 241774087635	Rp 179519384001.00	Rp 8513338035.00	Rp .00	21.81
Kota Salatiga	Rp 214581483127	Rp 129277000730.00	Rp 17205049763.00	Rp .00	9.45
Kota Semarang	Rp 1146868291503	Rp 1016307619401	Rp 46525552978	Rp .00	79.87
Kota Surakarta	Rp 581310482220	Rp 398944249201.00	Rp 30116226855.00	Rp .00	45.94
Kota Tegal	Rp 286701711904	Rp 147860686967.00	Rp 14429045658.00	Rp .00	19.78
PROV. D.I. YOGYAKARTA	Rp 1990570504122	Rp 783130716929.29	Rp 118691473029.00		454.76
Kab. Bantul	Rp 708446650036	Rp 264781426053.14	Rp 26361413857.00	Rp 101247697000.00	130.13
Kab. Gunung Kidul	Rp 754826979936	Rp 214420337883.00	Rp 15064978153.00	Rp 144366117000.00	122.82
Kab. Kulon Progo	Rp 442150593902	Rp 166146372637.48	Rp 19200595348.00	Rp 88152875000.00	29.68
Kab. Sleman	Rp 906838873997	Rp 456198558892	Rp 38363909418	Rp 105499075000.00	73.21
Kota Yogyakarta	Rp 516345049639	Rp 277971887581	Rp 36428587775	Rp .00	98.92
PROV. JAWA TIMUR	Rp 8601010946190	Rp 3879259498300	Rp 442179881948		4181.29
Kab. Bangkalan	Rp 583848604125	Rp 405406903918	Rp 9856548302		196.11
Kab. Banyuwangi	Rp 343617534377	Rp 575394989822.00	Rp 5342126285.00	Rp 221710360000.00	122.01
Kab. Blitar	Rp 633697597000	Rp 351958124424.14	Rp 23288967698.00	Rp 204807099000.00	101.94
Kab. Bojonegoro	Rp 909313742082	Rp 1443831387929.60	Rp 47773046503.12	Rp 358753665827.00	153.4
Kab. Bondowoso	Rp 482763628029	Rp 166824768560.00	Rp 22359379102.00	Rp 231667832000.00	105.69
Kab. Gresik	Rp 940947808615	Rp 323374649629.24	Rp 26070852188.57	Rp 294321749600.00	149.64
Kab. Jember	Rp 476864749766	Rp 1868727527682.62	Rp 24103669461.00	Rp 315343690000.00	232.73
Kab. Jombang	Rp 820151263829	Rp 430568331548.67	Rp 29488553386.00	Rp 293111955000.00	115.48
Kab. Kediri	Rp 904979454831	Rp 797338720656.93	Rp 27464762748.00	Rp 336968063000.00	169.46
Kab. Lamongan	Rp 862969127229	Rp 413669288255.08	Rp 26742862217.00	Rp 384739389000.00	151.08
Kab. Lumajang	Rp 655369616959	Rp 353054906139.04	Rp 30043862150.00	Rp 202373672440.00	95.04
Kab. Madiun	Rp 585147441011	Rp 224604719385.00	Rp 14986675503.00	Rp 167717386200.00	74.07
Kab. Magetan	Rp 565777008054	Rp 305229121121.50	Rp 24049575573.00	Rp 172413890000.00	62.65
Kab. Malang	Rp 1273195183223	Rp 736942726763.55	Rp 55546690368.00	Rp 409429612400.00	252.88
Kab. Mojokerto	Rp 681052208785	Rp 268194402448.00	Rp 20855815802.00	Rp 253366051800.00	111.03
Kab. Nganjuk	Rp 741410347046	Rp 341907427726.06	Rp 17325743057.00	Rp 288473460800.00	113.63
Kab. Ngawi	Rp 672629844396	Rp 326652017922	Rp 29027009013	Rp 203269311000.00	119.02
Kab. Pacitan	Rp 524150067743	Rp 171296352596.00	Rp 12437343538.00	Rp 150896400000.00	76.93
Kab. Pamekasan	Rp 665278576644	Rp 238840691764.00	Rp 36918379924.00	Rp 198575032000.00	126.02

Kab. Pasuruan	Rp 965628471291	Rp 486792584819.11	Rp 27136274906.00	Rp 370739138800.00	148.62
Kab. Ponorogo	Rp 758979882158	Rp 365547604553.36	Rp 29088393672.00	Rp 258704586000.00	81.8
Kab. Probolinggo	Rp 664764123401	Rp 249165008716.00	Rp 36132962256.00	Rp 403909728000.00	203.23
Kab. Sampang	Rp 628833560146	Rp 455973000716.83	Rp 14296019656.00	Rp 227571894000.00	217.97
Kab. Sidoarjo	Rp 1115059539083	Rp 1947991690435.82	Rp 33451330810.00	Rp 313804958000.00	125.69
Kab. Situbondo	Rp 540621635180	Rp 254834133681.00	Rp 22305445848.00	Rp 136619102400.00	81.46
Kab. Sumenep	Rp 702688027925	Rp 295845736405	Rp 35673102930	Rp 332807461000.00	206.2
Kab. Trenggalek	Rp 641234682209	Rp 393791519784.61	Rp 14214831497.36	Rp 156790476400.00	76.75
Kab. Tuban	Rp 676670107703	Rp 412411916372.19	Rp 34000568341.85	Rp 280347177200.00	178.05
Kab. Tulungagung	Rp 847896733889	Rp 294290994979.52	Rp 22578783199.00	Rp 245102197000.00	70.52
Kota Blitar	Rp 215855957868	Rp 136985853933.89	Rp 33381955458.89	Rp .00	10.65
Kota Kediri	Rp 321681744259	Rp 162887477386.31	Rp 30099647061.00	Rp .00	21.15
Kota Madiun	Rp 251353825307	Rp 233750741371.96	Rp 33242905065.00	Rp .00	8.49
Kota Malang	Rp 592333897593	Rp 431333914791.00	Rp 37400630761.00	Rp .00	38.56
Kota Mojokerto	Rp 201868245543	Rp 275156595116.61	Rp 18465338626.00	Rp .00	7.88
Kota Pasuruan	Rp 202350259476	Rp 144622276739.85	Rp 28651660575.00	Rp .00	13.02
Kota Probolinggo	Rp 209934643104	Rp 283083415189.86	Rp 8869070311.00	Rp .00	16.16
Kota Surabaya	Rp 2072886697637	Rp 2199958112794.00	Rp 97645773421.00	Rp .00	138.21
Kota Batu	Rp 201489451373	Rp 160504666477	Rp 30417243019	Rp 21487586000.00	8.05
PROV. BANTEN	Rp 2853744409251	Rp 1476912020529.88	Rp 141089301620.00		
Kab. Lebak	Rp 952953236479	Rp 361698267463.00	Rp 13099081955.00	Rp 316177854000.00	
Kab. Pandeglang	Rp 902101721937	Rp 437087054666.00	Rp 13904063248.00	Rp 293752641000.00	
Kab. Serang	Rp 997525197730	Rp 470112689931.00	Rp 17769157669.00	Rp 298378779000.00	
Kab. Tangerang	Rp 1603729209743	Rp 996832921414	Rp 51804802811	Rp 315901807430.00	
Kota Cilegon	Rp 511574549063	Rp 269595452485.00	Rp 39080461224.00	Rp .00	
Kota Serang	Rp 1275276459827	Rp 787533027704	Rp 51494228482	Rp .00	
Kota Tangerang	Rp 483811371038	Rp 252103603873.00	Rp 20992219334.00	Rp .00	
Kota Tangerang Selatan	Rp 763636592276	Rp 1083902910918	Rp 35787782927	Rp .00	

Lampiran 9. Data Penelitian Tahun 2023

Wilayah	Fungsi Pendidikan	Fungsi Ekonomi	Fungsi Perlindungan Sosial	Dana Desa	Jml Masy. Miskin (Ribu Jiwa)
PROV. JAWA BARAT	Rp 10462254312173	Rp 3442603572902	Rp 197805563939		3888.6
Kab. Bandung	Rp 1394573377121	Rp 842136989505.00	Rp 38235807107.00	Rp 366813940.00	245.5
Kab. Bekasi	Rp 2255329794213	Rp 989506263109.00	Rp 37170209000.00	Rp 253694685.00	204.1
Kab. Bogor	Rp 2749287181765	Rp 1218562547187.00	Rp 37387672346.00	Rp 589286423.00	453.8
Kab. Ciamis	Rp 916065972671	Rp 190644741793.00	Rp 17715310100.00	Rp 259544809.00	90.8
Kab. Cianjur	Rp 1525704114709	Rp 477247960583.00	Rp 27520648540.00	Rp 422301848.00	240.1
Kab. Cirebon	Rp 1176351507727	Rp 324184788881.00	Rp 12665524050.00	Rp 454999253.00	249.2
Kab. Garut	Rp 1716461451394	Rp 492992436194	Rp 30246413382	Rp 480458664.00	260.5
Kab. Indramayu	Rp 1053900632266	Rp 516907097092.00	Rp 14354147654.00	Rp 341601699.00	214.7
Kab. Karawang	Rp 1592499748585	Rp 673597122982.00	Rp 43176422169.00	Rp 344345343.00	187.2
Kab. Kuningan	Rp 1119713852037	Rp 220909267946	Rp 11474760932	Rp 342964640.00	133.9
Kab. Majalengka	Rp 1063758091055	Rp 566358347434	Rp 29232972903	Rp 319732709.00	138.7
Kab. Purwakarta	Rp 722585310009	Rp 309974661433.00	Rp 11088453872.00	Rp 185441490.00	81.5
Kab. Subang	Rp 891566934903	Rp 380114250823.00	Rp 15030631858.00	Rp 273767528.00	152.3
Kab. Sukabumi	Rp 1359692268793	Rp 422370503532.00	Rp 21223144460.00	Rp 436532604.00	178.7
Kab. Sumedang	Rp 957311053059	Rp 233222893045.00	Rp 22133235863.00	Rp 270187429.00	111.4
Kab. Tasikmalaya	Rp 1317890373990	Rp 196978807098.00	Rp 15712056685.00	Rp 391495129.00	79.4
Kota Bandung	Rp 1916131884878	Rp 742861109992.00	Rp 71110425055.00		102.8
Kota Bekasi	Rp 1770972388737	Rp 739334291052.00	Rp 38689519628.00		129.4
Kota Bogor	Rp 772860056159	Rp 513010306787.00	Rp 22799366051.00		75
Kota Cirebon	Rp 357330918674	Rp 156972210429.00	Rp 10898502923.00		29.5
Kota Depok	Rp 838653322349	Rp 616480073663.00	Rp 40621774125.00		62
Kota Sukabumi	Rp 278502714703	Rp 85666302723.00	Rp 9376117046.00		25
Kota Tasikmalaya	Rp 537855453687	Rp 141447847736.00	Rp 22281122226.00		79.4
Kota Cimahi	Rp 404687729464	Rp 174615081300.00	Rp 24948146050.00		28.6
Kota Banjar	Rp 169381262912	Rp 64526671048.00	Rp 10034391958.00	Rp 17356833.00	11.7
Kab. Bandung Barat	Rp 1179060718963	Rp 412749261833.00	Rp 14378916119.00	Rp 238089429.00	179.4
Kab. Pangandaran	Rp 214158301046	Rp 86999751580.00	Rp 13041922169.00	Rp 9018623.00	36.7

PROV. JAWA TENGAH	Rp 8390323670000	Rp 2035533713000.00	Rp 383365157000.00		3791.5
Kab. Banjarnegara	Rp 692961426215	Rp 206216258012.00	Rp 10126606494.00	Rp 277886658.00	138.99
Kab. Banyumas	Rp 1334504505768	Rp 237001164952.00	Rp 14341751526.00	Rp 346592982.00	216.5
Kab. Batang	Rp 583962660871	Rp 163216831259.00	Rp 10658352248.00	Rp 216576622.00	69.97
Kab. Blora	Rp 782794363000	Rp 224915675500	Rp 11941000000	Rp 258020113.00	99.61
Kab. Boyolali	Rp 737009614000	Rp 286703677000.00	Rp 12112996000.00	Rp 258860591.00	97.48
Kab. Brebes	Rp 1074550205460	Rp 353283461057.00	Rp 18890775000.00	Rp 328233319.00	286.14
Kab. Cilacap	Rp 1354285409266	Rp 326377617065.00	Rp 8936503030.00	Rp 321870697.00	191
Kab. Demak	Rp 803625585355	Rp 264470710335.00	Rp 29437145637.00	Rp 255703420.00	143.26
Kab. Grobogan	Rp 914574398394	Rp 286675833828.00	Rp 11878514322.00	Rp 304183399.00	162.52
Kab. Jepara	Rp 876709889310	Rp 312675253089	Rp 22592996000	Rp 207388977.00	86.75
Kab. Karanganyar	Rp 832664284564	Rp 201263663293.00	Rp 17839550796.00	Rp 175562791.00	88.64
Kab. Kebumen	Rp 1063719528000	Rp 256370054000.00	Rp 9320503000.00	Rp 444275016.00	195.45
Kab. Kendal	Rp 799139065969	Rp 284680719060.00	Rp 17717662184.00	Rp 254567478.00	92.64
Kab. Klaten	Rp 1003759601301	Rp 329723904768.00	Rp 10561408191.00	Rp 369793696.00	144.43
Kab. Kudus	Rp 585370552140	Rp 296921630807.00	Rp 51828849669.00	Rp 133255036.00	65.16
Kab. Magelang	Rp 946949520752	Rp 228090786140.00	Rp 18694761580.00	Rp 35843704.00	144.49
Kab. Pati	Rp 940487128000	Rp 226672588200.00	Rp 9960045000.00	Rp 372985244.00	118.18
Kab. Pekalongan	Rp 761537589163	Rp 147963964520.00	Rp 7695058000.00	Rp 257679902.00	87.93
Kab. Pemalang	Rp 1129932773500	Rp 195776419800.00	Rp 8177307175.00	Rp 255347209.00	195.57
Kab. Purbalingga	Rp 806742089000	Rp 150904800000.00	Rp 20428455000.00	Rp 248274033.00	143.41
Kab. Purworejo	Rp 746955967355	Rp 197266441027.00	Rp 17839986755.00	Rp 371833451.00	81.28
Kab. Rembang	Rp 604565581297	Rp 294730810650.00	Rp 13968694300.00	Rp 240767753.00	91.97
Kab. Semarang	Rp 840932456000	Rp 280222053100.00	Rp 16675686000.00	Rp 200079055.00	78.35
Kab. Sragen	Rp 775326190799	Rp 365225869646.00	Rp 12643315900.00	Rp 208127799.00	114.62
Kab. Sukoharjo	Rp 716038799786	Rp 246944302599.00	Rp 19865857175.00	Rp 156983503.00	68.79
Kab. Tegal	Rp 1064206177000	Rp 240228079000.00	Rp 15714305000.00	Rp 300740717.00	105.03
Kab. Temanggung	Rp 699286219123	Rp 185734589942.00	Rp 20016067258.00	Rp 235340840.00	72.96
Kab. Wonogiri	Rp 1009059563194	Rp 283601915522.00	Rp 12773657271.00	Rp 252712712.00	104.82
Kab. Wonosobo	Rp 655010985893	Rp 304100728614.00	Rp 15410697553.00	Rp 241533073.00	123.7
Kota Magelang	Rp 200898519651	Rp 114360921541	Rp 11980838492	Rp .00	7.45

Kota Pekalongan	Rp 258760021000	Rp 129358535000.00	Rp 8845915000.00	Rp .00	21.36
Kota Salatiga	Rp 227538070852	Rp 123328269588.00	Rp 19025786981.00	Rp .00	9.41
Kota Semarang	Rp 873516451635	Rp 1096400611091	Rp 47545952277	Rp .00	80.53
Kota Surakarta	Rp 667711934569	Rp 333586802673.00	Rp 20425824604.00	Rp .00	43.89
Kota Tegal	Rp 317958814772	Rp 161684886046.00	Rp 13524854282.00	Rp .00	19.22
PROV. D.I. YOGYAKARTA	Rp 2395281391054	Rp 512960029246.00	Rp 102587776867.00		448.47
Kab. Bantul	Rp 759689969345	Rp 304980184319.00	Rp 23612425828.00	Rp 124209753.00	128.51
Kab. Gunung Kidul	Rp 698886529482	Rp 208348170082.00	Rp 12838568474.00	Rp 175848933.00	122.54
Kab. Kulon Progo	Rp 537909204240	Rp 180889468093.00	Rp 18662148684.00	Rp 102006470.00	29.48
Kab. Sleman	Rp 896186363782	Rp 435531180719	Rp 50477113316	Rp 121764139.00	70.74
Kota Yogyakarta	Rp 564502080510	Rp 239944848241	Rp 32167584955		97.5
PROV. JAWA TIMUR	Rp 8803945005984	Rp 3404169559903	Rp 503651777120		4188.81
Kab. Bangkalan	Rp 719868652531	Rp 278533101787	Rp 10779763949	Rp 304577576.00	196.66
Kab. Banyuwangi	Rp 690399335036	Rp 714432715515.00	Rp 20602243016.00	Rp 224082023.00	119.52
Kab. Blitar	Rp 835005654390	Rp 387695704944.00	Rp 20761487496.00	Rp 228656418.00	101.94
Kab. Bojonegoro	Rp 1371692978075	Rp 2619157956389.00	Rp 73571759386.00	Rp 395962330.00	153.25
Kab. Bondowoso	Rp 615912663600	Rp 191651013999.00	Rp 23229713200.00	Rp 218497440.00	105.13
Kab. Gresik	Rp 1005440829366	Rp 642813221350.00	Rp 33602464920.00	Rp 309991419.00	149.75
Kab. Jember	Rp 1360160194235	Rp 474301359286.00	Rp 72183340865.00	Rp 317667883.00	236.46
Kab. Jombang	Rp 864793715952	Rp 253606964272.00	Rp 22825691307.00	Rp 307473648.00	117.36
Kab. Kediri	Rp 972417349365	Rp 525913547718.00	Rp 16321463763.00	Rp 372386307.00	171.18
Kab. Lamongan	Rp 799694443785	Rp 337608093900.00	Rp 33971740290.00	Rp 407204635.00	149.94
Kab. Lumajang	Rp 651101619591	Rp 256436310458.00	Rp 35293000900.00	Rp 212912011.00	93.82
Kab. Madiun	Rp 589148264924	Rp 230997846051.00	Rp 15828474712.00	Rp 191091276.00	75.87
Kab. Magetan	Rp 540516647521	Rp 294982531899.00	Rp 18170562845.00	Rp 185929926.00	62.49
Kab. Malang	Rp 1458549613432	Rp 678854840208.00	Rp 40708260093.00	Rp 452532871.00	251.36
Kab. Mojokerto	Rp 760259267644	Rp 292082052584.00	Rp 18909514106.00	Rp 286840742.00	112.86
Kab. Nganjuk	Rp 878587906538	Rp 263469983434.00	Rp 13830591920.00	Rp 264423074.00	115.86
Kab. Ngawi	Rp 726730007693	Rp 394738906240	Rp 31949843381	Rp 229781332.00	121.3
Kab. Pacitan	Rp 606466739533	Rp 130350245242.00	Rp 13049157013.00	Rp 167205216.00	76.2
Kab. Pamekasan	Rp 682296579742	Rp 266843223087.00	Rp 38810536483.00	Rp 197259886.00	126.43

Kab. Pasuruan	Rp 1148394680963	Rp 487317643717.00	Rp 30048581453.00	Rp 341926186.00	154.09
Kab. Ponorogo	Rp 798042883419	Rp 386289757059.00	Rp 25869581643.00	Rp 255901720.00	83.71
Kab. Probolinggo	Rp 797972898869	Rp 234598239527.00	Rp 35580635616.00	Rp 336014953.00	205.02
Kab. Sampang	Rp 719002160233	Rp 167883007460.00	Rp 12474391656.00	Rp 224094810.00	221.71
Kab. Sidoarjo	Rp 1489397011239	Rp 676775302804.00	Rp 45597553105.00	Rp 315057014.00	119.15
Kab. Situbondo	Rp 619248753110	Rp 275261187558.00	Rp 16492134644.00	Rp 147780620.00	82.62
Kab. Sumenep	Rp 779856513256	Rp 339225811284	Rp 36382677162	Rp 350788483.00	206.1
Kab. Trenggalek	Rp 603769096480	Rp 171795249731.00	Rp 14182250718.00	Rp 161879416.00	74.58
Kab. Tuban	Rp 956886517599	Rp 488514580977.00	Rp 34214320199.00	Rp 299100896.00	177.25
Kab. Tulungagung	Rp 923806368127	Rp 226880404441.00	Rp 25222903969.00	Rp 244856659.00	68.81
Kota Blitar	Rp 243429646988	Rp 135451350436.00	Rp 31058978388.00	Rp .00	10.61
Kota Kediri	Rp 370219671783	Rp 214956902371.00	Rp 35418236380.00	Rp .00	21.03
Kota Madiun	Rp 332375362610	Rp 214708353268.00	Rp 28447673214.00	Rp .00	8.46
Kota Malang	Rp 749933909344	Rp 543530964522.00	Rp 57746806211.00	Rp .00	37.78
Kota Mojokerto	Rp 223477048674	Rp 259253339809.00	Rp 20727562880.00	Rp .00	7.65
Kota Pasuruan	Rp 237520952953	Rp 214319088663.00	Rp 31511056608.00	Rp .00	13.56
Kota Probolinggo	Rp 232614468946	Rp 154691035920.00	Rp 9264741342.00	Rp .00	15.86
Kota Surabaya	Rp 2294843767417	Rp 2562919997870.00	Rp 254116996169.00	Rp .00	136.37
Kota Batu	Rp 233666557761	Rp 155551806492	Rp 30145925228	Rp 20156318.00	7.1
PROV. BANTEN	Rp 422723909140	Rp 130699286337.00	Rp 13442419344.00		
Kab. Lebak	Rp 244758950175	Rp 121697598373.00	Rp 18405263670.00	Rp 345528304.00	
Kab. Pandeglang	Rp 212533844679	Rp 171677123726.00	Rp 13101984758.00	Rp 323136298.00	
Kab. Serang	Rp 234038495318	Rp 108870938182.00	Rp 7061987874.00	Rp 316473229.00	
Kab. Tangerang	Rp 195443412859	Rp 182939038614	Rp 8794401756	Rp 329904517.00	
Kota Cilegon	Rp 994493783700	Rp 658359109046.00	Rp 43477502117.00	Rp .00	
Kota Serang	Rp 207436235386	Rp 218897931271	Rp 10355391618	Rp .00	
Kota Tangerang	Rp 249089029114	Rp 308584967717.00	Rp 9060677904.00	Rp .00	
Kota Tangerang Selatan	Rp 355964103806	Rp 327608722837	Rp 8866896695	Rp .00	

Lampiran 10. Hasil Analisis Data

Hasil Analisis Deskriptif

Sample: 2015 2023

	X1	X2	X3	X4	Y
Mean	1.78E+11	2.43E+11	6.59E+11	2.12E+10	144355.4
Median	1.84E+11	1.49E+11	6.81E+11	1.82E+10	128110.0
Maximum	5.07E+11	2.62E+12	3.38E+12	9.82E+10	491200.0
Minimum	9018623.	5.95E+08	2.89E+08	1.00E+08	7100.000
Std. Dev.	1.25E+11	2.74E+11	4.65E+11	1.37E+10	72187.08
Skewness	0.148983	3.400267	1.030177	1.644415	1.331206
Kurtosis	2.162960	19.80959	5.897159	7.193663	6.527716
Jarque-Bera	24.63644	10261.59	394.4292	886.4171	609.5993
Probability	0.000004	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Sum	1.33E+14	1.82E+14	4.94E+14	1.59E+13	1.08E+08
Sum Sq. Dev.	1.16E+25	5.60E+25	1.62E+26	1.40E+23	3.90E+12
Observations	749	749	749	749	749

	Y	X1	X2	X3	X4
Mean	144355.4	177737.3	242886.9	659007.8	21180.71
Median	128110.0	184414.6	148779.5	680555.5	18248.46
Maximum	491200.0	506923.4	2619158.	3382704.	98242.65
Minimum	7100.000	9.018600	595.0000	288.9200	100.0000
Std. Dev.	72187.08	124630.6	273517.3	464661.9	13669.17
Skewness	1.331206	0.148983	3.400267	1.030177	1.644415
Kurtosis	6.527716	2.162960	19.80959	5.897159	7.193663
Jarque-Bera	609.5993	24.63644	10261.59	394.4292	886.4171
Probability	0.000000	0.000004	0.000000	0.000000	0.000000
Sum	1.08E+08	1.33E+08	1.82E+08	4.94E+08	15864348
Sum Sq. Dev.	3.90E+12	1.16E+13	5.60E+13	1.62E+14	1.40E+11
Observations	749	749	749	749	749

Pemilihan Model Regresi

A. Common Effect Model (CEM)

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 01/30/25 Time: 09:09
 Sample: 2015 2023
 Periods included: 9
 Cross-sections included: 89
 Total panel (unbalanced) observations: 749

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	74842.15	5619.440	13.31843	0.0000
X1	1.32E-07	1.91E-08	6.917784	0.0000
X2	2.62E-08	8.97E-09	2.924129	0.0036
X3	5.35E-08	5.85E-09	9.154820	0.0000
X4	2.04E-07	2.05E-07	0.993255	0.3209
R-squared	0.224312	Mean dependent var		144355.4
Adjusted R-squared	0.220141	S.D. dependent var		72187.08
S.E. of regression	63748.13	Akaike info criterion		24.96992
Sum squared resid	3.02E+12	Schwarz criterion		25.00075
Log likelihood	-9346.235	Hannan-Quinn criter.		24.98180
F-statistic	53.78700	Durbin-Watson stat		0.368629
Prob(F-statistic)	0.000000			

Dependent Variable: LOG_Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 03/12/25 Time: 22:25
 Sample: 2015 2023
 Periods included: 9
 Cross-sections included: 89
 Total panel (unbalanced) observations: 749

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.432474	0.804585	6.751893	0.0000
LOG_X1	0.048088	0.008358	5.753581	0.0000
LOG_X2	0.124191	0.025274	4.913692	0.0000
LOG_X3	0.093629	0.020702	4.522754	0.0000
LOG_X4	-0.025308	0.032485	-0.779053	0.4362
R-squared	0.104556	Mean dependent var		11.74185
Adjusted R-squared	0.099742	S.D. dependent var		0.587641
S.E. of regression	0.557565	Akaike info criterion		1.676177
Sum squared resid	231.2937	Schwarz criterion		1.707010
Log likelihood	-622.7285	Hannan-Quinn criter.		1.688059
F-statistic	21.71828	Durbin-Watson stat		0.208160
Prob(F-statistic)	0.000000			

B. Fixed Effect Model (FEM)

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 01/30/25 Time: 09:09
 Sample: 2015 2023
 Periods included: 9
 Cross-sections included: 89
 Total panel (unbalanced) observations: 749

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	161104.8	1309.989	122.9818	0.0000
X1	-3.18E-08	4.17E-09	-7.638525	0.0000
X2	-8.19E-09	2.11E-09	-3.877148	0.0001
X3	-1.17E-08	1.41E-09	-8.304432	0.0000
X4	-6.55E-08	4.53E-08	-1.447192	0.1483

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.976711	Mean dependent var	144355.4
Adjusted R-squared	0.973445	S.D. dependent var	72187.08
S.E. of regression	11763.32	Akaike info criterion	21.69911
Sum squared resid	9.08E+10	Schwarz criterion	22.27260
Log likelihood	-8033.318	Hannan-Quinn criter.	21.92010
F-statistic	299.0470	Durbin-Watson stat	1.191471
Prob(F-statistic)	0.000000		

Dependent Variable: LOG_Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 03/12/25 Time: 22:29
 Sample: 2015 2023
 Periods included: 9
 Cross-sections included: 89
 Total panel (unbalanced) observations: 749

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	12.88799	0.124644	103.3982	0.0000
LOG_X1	-0.001110	0.001189	-0.933958	0.3507
LOG_X2	-0.016068	0.004235	-3.794536	0.0002
LOG_X3	-0.018473	0.003280	-5.632621	0.0000
LOG_X4	-0.008881	0.004737	-1.874604	0.0613

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.986543	Mean dependent var	11.74185
Adjusted R-squared	0.984655	S.D. dependent var	0.587641
S.E. of regression	0.072793	Akaike info criterion	-2.286633

Sum squared resid	3.476056	Schwarz criterion	-1.713144
Log likelihood	949.3439	Hannan-Quinn criter.	-2.065642
F-statistic	522.7219	Durbin-Watson stat	1.128322
Prob(F-statistic)	0.000000		

1. Uji Chow

Kriteria:

- Jika $p < 0,05$, maka hipotesis nol akan ditolak, sehingga uji regresi linear menggunakan model *FEM*
- jika $p > 0,05$, maka hipotesis nol diterima, sehingga uji regresi linear menggunakan model *CEM*.

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	240.839108	(88,656)	0.0000
Cross-section Chi-square	2625.835330	88	0.0000

hasil log linear:

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	488.564350	(88,656)	0.0000
Cross-section Chi-square	3144.144745	88	0.0000

Dari hasil uji Chow, nilai probabilitas = 0,000; Sehingga $p < 0,05$, maka yang digunakan adalah **model FEM**

2. Uji Haussman

Kriteria:

- 1) Jika $p < 5\%$, maka hipotesis nol akan ditolak, sehingga uji regresi linear menggunakan model *FEM*
- 2) jika $p > 5\%$, maka hipotesis nol diterima, sehingga uji regresi linear menggunakan model *REM*.

Random Effect Model (REM)

Dependent Variable: Y
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 01/30/25 Time: 09:10
 Sample: 2015 2023
 Periods included: 9
 Cross-sections included: 89
 Total panel (unbalanced) observations: 749
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	157114.6	4677.324	33.59069	0.0000
X1	-2.89E-08	4.16E-09	-6.960050	0.0000
X2	-8.00E-09	2.11E-09	-3.796761	0.0002
X3	-1.04E-08	1.40E-09	-7.386571	0.0000
X4	-6.77E-08	4.51E-08	-1.498948	0.1343
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			42367.57	0.9284
Idiosyncratic random			11763.32	0.0716
Weighted Statistics				
R-squared	0.147240	Mean dependent var		13602.13
Adjusted R-squared	0.142655	S.D. dependent var		14202.95
S.E. of regression	13226.92	Sum squared resid		1.30E+11
F-statistic	32.11519	Durbin-Watson stat		0.797729
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	-0.107259	Mean dependent var		144355.4
Sum squared resid	4.32E+12	Durbin-Watson stat		0.024059

Hasil log linear

Dependent Variable: LOG_Y

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 03/12/25 Time: 22:33

Sample: 2015 2023

Periods included: 9

Cross-sections included: 89

Total panel (unbalanced) observations: 749

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	12.82058	0.131617	97.40824	0.0000
LOG_X1	-0.000858	0.001188	-0.722458	0.4702
LOG_X2	-0.015715	0.004228	-3.717207	0.0002
LOG_X3	-0.017497	0.003275	-5.342776	0.0000
LOG_X4	-0.009370	0.004734	-1.979150	0.0482
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.398996	0.9678
Idiosyncratic random			0.072793	0.0322
Weighted Statistics				
R-squared	0.120102	Mean dependent var		0.731944
Adjusted R-squared	0.115372	S.D. dependent var		0.104210
S.E. of regression	0.079595	Sum squared resid		4.713528
F-statistic	25.38820	Durbin-Watson stat		0.820335
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	-0.036670	Mean dependent var		11.74185
Sum squared resid	267.7725	Durbin-Watson stat		0.014440

Hasil Uji Haussman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	199.593323	4	0.0000

hasil log linear:

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	128.096223	4	0.0000

Dari hasil uji Huassman, nilai probabilitas = 0,000; Sehingga $p < 0,05$, maka yang digunakan adalah **model FEM**

3. Uji LM

Kriteria:

- 1) Jika $p < 5\%$, maka hipotesis nol akan ditolak, sehingga uji regresi linear menggunakan model *FEM*
- 2) jika $p > 5\%$, maka hipotesis nol diterima, sehingga uji regresi linear menggunakan model *REM*.

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided
(all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	1378.238 (0.0000)	808.8264 (0.0000)	2187.065 (0.0000)
Honda	37.12463 (0.0000)	28.43987 (0.0000)	46.36111 (0.0000)
King-Wu	37.12463 (0.0000)	28.43987 (0.0000)	38.02389 (0.0000)
Standardized Honda	37.72657 (0.0000)	34.15331 (0.0000)	44.33540 (0.0000)
Standardized King-Wu	37.72657 (0.0000)	34.15331 (0.0000)	40.35340 (0.0000)
Gourieroux, et al.	--	--	2187.065 (0.0000)

hasil uji log linear:

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided
(all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	1749.810 (0.0000)	262.1373 (0.0000)	2011.948 (0.0000)
Honda	41.83073 (0.0000)	16.19066 (0.0000)	41.02732 (0.0000)
King-Wu	41.83073 (0.0000)	16.19066 (0.0000)	27.67768 (0.0000)
Standardized Honda	42.31530 (0.0000)	21.05627 (0.0000)	39.40344 (0.0000)
Standardized King-Wu	42.31530 (0.0000)	21.05627 (0.0000)	29.88509 (0.0000)
Gourieroux, et al.	--	--	2011.948 (0.0000)

Dari hasil uji Langrange Multiplier, nilai probabilitas = 0,000; Sehingga $p < 0,05$, maka yang digunakan adalah **model FEM**

4. Uji Multikolinearitas

	X1	X2	X3	X4	Y
X1	1.000000	-0.115113	0.126608	0.128400	0.265817
X2	-0.115113	1.000000	0.134601	0.271226	0.129878
X3	0.126608	0.134601	1.000000	0.510441	0.406690
X4	0.128400	0.271226	0.510441	1.000000	0.270859
Y	0.265817	0.129878	0.406690	0.270859	1.000000

Hasil uji log linear:

	LOG_X1	LOG_X2	LOG_X3	LOG_X4
LOG_X1	1.000000	-0.270292	-0.091372	-0.017694
LOG_X2	-0.270292	1.000000	0.366142	0.377846
LOG_X3	-0.091372	0.366142	1.000000	0.503446
LOG_X4	-0.017694	0.377846	0.503446	1.000000

Dari analisis data panel, maka disimpulkan analisis regresi linearnya menggunakan model FEM

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 01/30/25 Time: 09:09
 Sample: 2015 2023
 Periods included: 9
 Cross-sections included: 89
 Total panel (unbalanced) observations: 749

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	161104.8	1309.989	122.9818	0.0000
X1	-3.18E-08	4.17E-09	-7.638525	0.0000
X2	-8.19E-09	2.11E-09	-3.877148	0.0001
X3	-1.17E-08	1.41E-09	-8.304432	0.0000
X4	-6.55E-08	4.53E-08	-1.447192	0.1483
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				

R-squared	0.976711	Mean dependent var	144355.4
Adjusted R-squared	0.973445	S.D. dependent var	72187.08
S.E. of regression	11763.32	Akaike info criterion	21.69911
Sum squared resid	9.08E+10	Schwarz criterion	22.27260
Log likelihood	-8033.318	Hannan-Quinn criter.	21.92010
F-statistic	299.0470	Durbin-Watson stat	1.191471
Prob(F-statistic)	0.000000		

persamaan regresi linear:

$$y = 161104,8 - 3,18 \times 10^{-8} X_1 - 8,19 \times 10^{-9} X_2 - 1,17 \times 10^{-8} X_3 - 6,55 \times 10^{-8} X_4$$

1. uji F

Kriteria:

- 1) Jika $p > 0,05$, maka H_0 diterima, tidak ada pengaruh
- 2) Jika $p < 0,05$, maka H_0 ditolak, ada pengaruh

Nilai Prob(F-statistic) = 0.000000 < 0,05, maka H_0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan antara X_1 , X_2 , X_3 , dan X_4 terhadap Y

2. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menggunakan adjusted R^2

Nilai $R^2 = 0,977$, sehingga dapat disimpulkan bahwa keempat variabel tersebut secara signifikan berpengaruh sebesar 97,7% terhadap kemiskinan di Jawa

3. Hasil uji t (Parsial)

Kriteria:

- 1) Jika probabilitas > 0,05, maka H_0 diterima,
- 2) Jika probabilitas < 0,05, maka H_0 ditolak

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	161104.8	1309.989	122.9818	0.0000
X1	-3.18E-08	4.17E-09	-7.638525	0.0000
X2	-8.19E-09	2.11E-09	-3.877148	0.0001
X3	-1.17E-08	1.41E-09	-8.304432	0.0000
X4	-6.55E-08	4.53E-08	-1.447192	0.1483

Probability $X_1 = 0,00 < 0,05$, signifikan

Probability $X_2 = 0,00 < 0,05$, signifikan

Probability $X_3 = 0,00 < 0,05$, signifikan

Probability $X_4 = 0,14 > 0,05$, tidak signifikan

FEM log linear:

Dependent Variable: LOG_Y

Method: Panel Least Squares

Date: 03/12/25 Time: 22:29

Sample: 2015 2023

Periods included: 9

Cross-sections included: 89

Total panel (unbalanced) observations: 749

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	12.88799	0.124644	103.3982	0.0000
LOG_X1	-0.001110	0.001189	-0.933958	0.3507
LOG_X2	-0.016068	0.004235	-3.794536	0.0002
LOG_X3	-0.018473	0.003280	-5.632621	0.0000
LOG_X4	-0.008881	0.004737	-1.874604	0.0613

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.986543	Mean dependent var	11.74185
Adjusted R-squared	0.984655	S.D. dependent var	0.587641
S.E. of regression	0.072793	Akaike info criterion	-2.286633
Sum squared resid	3.476056	Schwarz criterion	-1.713144
Log likelihood	949.3439	Hannan-Quinn criter.	-2.065642
F-statistic	522.7219	Durbin-Watson stat	1.128322
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 11. Surat Ijin Penelitian